

# **POLITIK BAHASA NASIONAL**

2

Editor: AMRAN HALIM

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**JAKARTA 1976**

# POLITIK BAHASA NASIONAL

2

PERPUSTAKAAN  
PUSAT PEMBINAAN DAN  
PENGEMBANGAN BAHASA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

editor

AMRAN HALIM

PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
JAKARTA 1976

PD  
306.449.578  
POL  
P

Perpustakaan Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa	
No. Klasifikasi U 306.449.528 POL P	No. Induk <u>320</u> Tgl. : <u>16-4-77</u> Ttd. : _____

K5

**POLITIK BAHASA  
NASIONAL**

**2**

ABSTRAK  
KATA KUNCI  
DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

	Halaman
I. KATA PENGANTAR .....	i
II. PIDATO PENGARAHAN OLEH KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .....	9
III. PIDATO PEMBUKAAN OLEH MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA .....	13
IV. KERTAS KERJA .....	
1. <i>Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia</i> oleh Amran Halim .....	17
2. <i>Ciri-ciri Bahasa Indonesia yang Baku</i> oleh Anton M. Moeliono .....	27
3. <i>Tata Cara Standardisasi dan Pengembangan Bahasa Nasional</i> oleh Harinurti Kridalaksana .....	35
4. <i>Pembinaan Pengajaran Bahasa Indonesia</i> oleh I Gusti Ngurah Oka .....	45
5. <i>Fungsi dan Kedudukan Bahasa Daerah</i> oleh S. Wojowasito .....	61
6. <i>Inventarisasi Bahasa Daerah</i> oleh S. Effendi .....	85
7. <i>Pengajaran Bahasa Daerah</i> oleh Tarwotjo .....	93
8. <i>Pengembangan Bahasa Daerah</i> oleh Ajip Rosidi .....	101
9. <i>Kedudukan dan fungsi Bahasa Asing di Indonesia</i> oleh Giri Kartono .....	117
10. <i>Pengajaran Bahasa Asing dalam rangka Politik Bahasa Nasional</i> oleh Retmono .....	127
V. LAMPIRAN .....	
1. <i>Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 096/1967</i> .....	138
2. <i>Kesimpulan, pendapat, dan usul seminar Politik Bahasa Nasional</i> .....	141
3. <i>Daftar Peserta</i> .....	153
4. <i>Panitia Penyelenggara</i> .....	160

## KATA PENGANTAR

Praseminar Politik Bahasa Nasional, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 29-31 Oktober 1974, seperti yang digambarkan di dalam "Kata Pengantar" *Politik Bahasa Nasional*, Jilid I, telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu penyusunan kerangka dasar kebijaksanaan bahasa nasional. Di dalam Praseminar Politik Bahasa Nasional itu dicapai kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan "kebijaksanaan bahasa nasional" adalah kebijaksanaan nasional di dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. Kerangka dasar kebijaksanaan bahasa nasional itu adalah satu kesatuan kebijaksanaan yang dijalin oleh pengolahan tiga kelompok masalah kebahasaan, yaitu:

1. masalah pembinaan, pengembangan, pembakuan, dan pengajaran bahasa Indonesia,
2. masalah pembinaan, pengembangan, pembakuan, dan pengajaran bahasa daerah, terutama bahasa daerah yang dipelihara oleh masyarakat pemakainya, dan
3. masalah pemakaian dan pengembangan pengajaran bahasa asing.

Langkah selanjutnya adalah mengisi kerangka dasar kebijaksanaan bahasa nasional yang telah disepakati itu. Langkah ini diambil dengan jalan menyelenggarakan Seminar Politik Bahasa Nasional di Jakarta pada tanggal 25-28 Februari 1975. Tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. perencanaan dan perumusan isi kerangka dasar kebijaksanaan bahasa nasional,
2. perumusan dan penyusunan ketentuan-ketentuan dan garis-garis kebijaksanaan umum mengenai penelitian, pengembangan, pembakuan, dan pengajaran bahasa dan sastra, dan
3. penyusunan rencana umum pengembangan kebijaksanaan bahasa nasional.

Di dalam Seminar Politik Bahasa Nasional itu disajikan dan dibahas sepuluh buah kertas kerja, yaitu: (1) "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia" oleh Amran Halim, (2) "Ciri-ciri Bahasa Indonesia Baku" oleh Anton M. Moeliono, (3) "Tata Cara Pembakuan dan Pengembangan Bahasa Indonesia" oleh Harimurti Kridalaksana, (4) "Pengajaran Bahasa Indonesia" oleh I Gusti Ngurah Oka, (5) "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Daerah" oleh S. Wojowasito, (6) "Pengembangan Bahasa Daerah" oleh Ajip Rosidi, (7) "Pengajaran Bahasa Daerah" oleh Tarwotjo, (8) "Inventarisasi Bahasa Daerah" oleh S. Effendi, (9) "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Asing" oleh Giri Kartono, dan (10)

"Pengajaran Bahasa Asing" oleh Retmono.

Kertas-kertas kerja yang disajikan dan dibahas di dalam Seminar Politik Bahasa Nasional itu dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul *Politik Bahasa Nasional*, Jilid II, ini. Tujuan yang hendak dicapai adalah pemanfaatan kertas-kertas kerja itu oleh masyarakat luas.

Penerbitan buku ini telah dimungkinkan oleh tersedianya biaya yang disalurkan melalui Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan penerbitan buku ini diatur oleh Drs. Djajanto Supraba.

Kepada Semua pihak yang telah memungkinkan penerbitan buku ini diucapkan terima kasih tak terhingga.

Amran Halim  
*Editor*

Jakarta, 1 Februari 1977.

## PENGANTAR

Hadirin yang saya hormati,

Perkenankan kiranya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara sekalian yang telah meringankan langkah dan menyisihkan waktu saudara yang berharga untuk menghadiri pembukaan Seminar Politik Bahasa Nasional ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga ini ingin khusus saya sampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pagi ini berkenan membuka seminar ini, dan kepada para peserta yang telah menyiapkan kertas kerjanya di tengah-tengah kesibukan kerja lainnya, sehingga memungkinkan penyelenggaraan seminar ini.

Seminar ini merupakan lanjutan Praseminar Politik Bahasa Nasional yang telah diselenggarakan pada hari-hari sesudah peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-46 bulan Oktober yang lalu. Peristiwa-peristiwa ini dimungkinkan oleh tersedianya biaya Pelita untuk Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Bersama-sama dengan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Proyek Pengembangan ini dikelola oleh Lembaga Bahasa Nasional, yang dalam struktur baru Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Salah satu masalah yang ingin digarap oleh Proyek Pengembangan ialah pengembangan politik bahasa nasional di negeri kita, yaitu politik atau kebijaksanaan bahasa untuk kepentingan nasional.

Memang kebijaksanaan pemerintah kita mengenai bahasa telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan penjelasannya, yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara, dan bahwa bahasa daerah yang masih dipakai sebagai alat perhubungan, yang dibina oleh masyarakat pemakainya dihargai dan dipelihara oleh negara sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Memang landasan terutama dan pertama bagi kebijaksanaan bahasa telah terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Memang sebagai negara kita merupakan negara beruntung karena telah lahir sebagai negara yang merdeka dengan bekal satu bahasa yang telah diikrarkan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa nasional, bahasa pemersatu berbagai-bagai suku bangsa, 17 tahun sebelum kemerdekaan kita, yang terkenal dengan Hari Sumpah Pemuda. Dengan bekal yang sangat berharga itu pemilihan bahasa resmi pemerintahan, bahasa negara, pada tahun 1945 tidaklah merupakan sesuatu yang pelik, dan hal ini diterima dengan wajar oleh bangsa kita. Tetapi, masalah bahasa di negara kita tidaklah berhenti dengan ini. Masalah

kebahasaan di Indonesia disebabkan oleh kenyataan bahwa di samping bahasa Indonesia terdapat beratus-ratus bahasa daerah dan dialek, dan bahasa-bahasa asing tertentu yang dipakai sebagai bahasa perhubungan internasional. Penanganan masalah bahasa Indonesia tidaklah dapat dipisahkan dari penanganan masalah bahasa-bahasa daerah yang dipergunakan di Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup, dan masalah pemakaian dan pemanfaatan bahasa-bahasa asing tertentu di Indonesia.

Kebijaksanaan bahasa di Indonesia merupakan masalah nasional yang meliputi perencanaan, pengarahani, dan ketentuan-ketentuan yang mendasari penanganan masalah bahasa secara nasional. Karena perencanaan dan pengembangan politik bahasa nasional merupakan masalah nasional yang memerlukan pengolahan bersama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebagai badan resmi yang bertugas menangani masalah kebahasaan dengan berbagai lapisan masyarakat, saudara-saudara peserta dan peninjau seminar kami ajak berpartisipasi dalam Seminar Politik Bahasa Nasional yang kami adakan selama empat hari ini. Partisipasi saudara-saudara tentulah akan mencerminkan adanya kerja sama di dalam penanganan masalah nasional ini. Sumbangan fikiran yang saudara-saudara berikan tentulah menjamin bertambah lengkapnya segi-segi kebahasaan yang dibahas demi menyeluruhnya kebijaksanaan bahasa nasional itu sehingga ia akan bermanfaat sepenuhnya bagi kepentingan penanganan masalah kebahasaan nasional kita.

Saudara-saudara sekalian, selamat berseminar!

Pemimpin Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

*S.W. Rujati Mulyadi*

## PIDATO PENGARAHAN

Hadirin yang saya muliakan,

Seminar Politik Bahasa Nasional, yang akan berlangsung selama empat hari ini, adalah kelanjutan Praseminar Politik Bahasa Nasional yang diadakan pada tanggal 29-31 Oktober tahun yang lalu, dan merupakan salah satu kegiatan di dalam usaha kita untuk memiliki satu kebijaksanaan nasional yang berencana, terarah, dan terperinci mengenai keseluruhan masalah kebahasaan yang kita hadapi. Tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. perencanaan dan perumusan kerangka dasar kebijaksanaan nasional di dalam bidang kebahasaan,
2. perumusan dan penyusunan ketentuan-ketentuan dan garis-garis kebijaksanaan umum mengenai penelitian, pengembangan, pembakuan, dan pengajaran bahasa, termasuk sastra, dan
3. penyusunan rencana pengembangan kebijaksanaan bahasa nasional.

Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah pemanfaatan kebijaksanaan bahasa nasional itu sebagai alat untuk kepentingan pembangunan bangsa. Dengan kebijaksanaan bahasa nasional yang berencana, terarah, dan terperinci kita dapat mengatur pembinaan dan pengembangan serta pembakuan bahasa nasional dan bahasa-bahasa daerah kita sedemikian rupa sehingga bahasa-bahasa ini benar-benar dapat dijadikan alat komunikasi yang dapat diandalkan di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bangsa kita, di dalam usaha kita untuk mencapai tujuan pembangunan itu, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan di dalam usaha kita untuk meningkatkan kesetiaan serta kebanggaan atas kehidupan dan kebudayaan nasional. Dengan kebijaksanaan bahasa nasional yang berencana, terarah, dan terperinci kita dapat mengatur pengembangan dan pembakuan bahasa nasional kita sedemikian rupa sehingga ia benar-benar dapat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga pendidikan kita, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, di dalam usahanya untuk menjadikan anak-anak kita warga negara yang cakap dan bertanggung jawab, yang memiliki kesetiaan dan kebanggaan akan negara, bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasanya, serta yang sanggup mengikuti dan ikut serta di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk kepentingan pembangunan bangsanya. Di samping itu, dengan kebijaksanaan bahasa nasional yang berencana, terarah, dan terperinci itu kita dapat mengatur pembedaan fungsi antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa

daerah, serta antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah pada satu pihak dan bahasa-bahasa asing yang dipergunakan di Indonesia pada pihak lain. Pembedaan fungsi ini memungkinkan kita menempatkan bahasa-bahasa asing tertentu, terutama bahasa-bahasa Inggris, Belanda, Jerman dan Perancis, pada kedudukan yang tidak lebih dari penggunaannya sebagai alat perhubungan antarbangsa, sebagai alat yang memungkinkan kita mengambil faedah dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat di negara-negara lain, dan sebagai salah satu sumber bahan untuk memperkaya bahasa nasional kita.

Hadirin yang saya muliakan,

Jelaslah kiranya bahwa ruang lingkup kebijaksanaan bahasa nasional tidak terbatas kepada pengolahan masalah bahasa nasional saja, bukan saja karena besarnya jumlah bahasa yang terdapat dan dipakai di Indonesia tetapi juga karena pemakaian berbagai-bagai bahasa itu di dalam masyarakat yang sama, yaitu masyarakat Indonesia, menyebabkan terjadinya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi di antara bahasa-bahasa itu sedemikian rupa sehingga keseluruhan masalah bahasa yang kita hadapi itu merupakan satu jaringan masalah, yang bagian-bagiannya tidak berdiri sendiri. Atas dasar ini, Praseminar Politik Bahasa Nasional yang lalu itu mencapai kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan politik bahasa nasional di dalam hubungan ini adalah kebijaksanaan nasional yang resmi mengenai keseluruhan masalah kebahasaan kita itu. Kebijaksanaan bahasa nasional itu berisi ketentuan-ketentuan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa daerah, serta fungsi dan kedudukan bahasa-bahasa asing yang dipergunakan di negara kita ini. Ia memberikan dasar pegangan dan pengarahan yang diperlukan di dalam penentuan ciri-ciri bahasa baku, di dalam usaha pembakuan dan pengembangan bahasa, dan di dalam pengembangan pengajaran bahasa. Di samping itu, sebagai kebijaksanaan nasional yang resmi, kebijaksanaan bahasa nasional dapat dijadikan dasar di dalam penentuan skala prioritas di dalam perencanaan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra di masa yang akan datang.

Masalah bahasa menyangkut berbagai segi kehidupan dan kebudayaan kita. Masalah bahasa berhubungan erat dengan kepentingan segenap lapisan masyarakat kita. Oleh karena itu, masalah bahasa adalah masalah kemasyarakatan nasional kita, dan sebagai akibatnya pengolahan masalah bahasa itu memerlukan adanya peninjauan masalah itu dari segala segi, dan membutuhkan adanya kerja sama nasional yang erat dan bersungguh-sungguh. Di dalam hubungan ini, praseminar bulan Oktober yang lalu itu membahas beberapa masalah pokok yang dituangkan di dalam sembilan kertas kerja, yaitu:

1. masalah fungsi politik bahasa nasional,
2. masalah Lembaga Bahasa Nasional dan peranannya di dalam pengembangan bahasa Indonesia,
3. masalah politik bahasa nasional di dalam hubungannya dengan pembinaan bahasa Indonesia,
4. masalah pengembangan bahasa Indonesia sebagai unsur kebudayaan,
5. masalah politik bahasa nasional di dalam hubungannya dengan pengajaran bahasa,
6. masalah politik bahasa nasional di dalam hubungannya dengan ketahanan nasional,
7. masalah politik bahasa nasional di dalam hubungannya dengan pengembangan pendidikan,
8. masalah politik bahasa nasional di dalam hubungannya dengan pengembangan kesusastraan, dan
9. persoalan bahasa Indonesia untuk pers.

Hadirin yang saya muliakan,

Sekarang, di dalam seminar ini, tibalah saatnya bagi kita untuk melanjutkan usaha kita sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai, seperti yang disebutkan tadi. Pola kerangka dasar kebijaksanaan bahasa nasional yang hendak kita hasilkan itu sudah jelas. Ia merupakan satu kesatuan yang dijalin oleh pola pengolahan tiga kelompok masalah kebahasaan, yaitu (1) masalah pembinaan, pengembangan, pembakuan, dan pengajaran bahasa Indonesia, (2) masalah pembinaan, pengembangan, pembakuan, dan pengajaran bahasa daerah, terutama bahasa daerah yang dipelihara oleh masyarakat pemakainya, dan (3) masalah pengembangan pengajaran dan pemanfaatan bahasa asing.

Sebagai bahan pengarah pembahasan, di dalam seminar ini akan disajikan sepuluh kertas kerja mengenai:

1. fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia,
2. ciri-ciri bahasa baku,
3. tata cara pembakuan dan pengembangan bahasa Indonesia,
4. pengajaran bahasa Indonesia,
5. fungsi dan kedudukan bahasa daerah,
6. pengembangan bahasa daerah,
7. pengajaran bahasa daerah,
8. inventarisasi bahasa daerah,
9. fungsi dan kedudukan bahasa asing, dan
10. pengajaran bahasa asing.

Saya yakin bahwa saudara-saudara sependapat dengan panitia pelaksana seminar ini bahwa hasil yang sebesar-besarnya yang dapat kita capai di dalam seminar ini tergantung sepenuhnya kepada ketekunan, kesungguhan, dan

ketelitian kita di dalam pembicaraan selama seminar ini berlangsung nanti. Saya yakin pula bahwa kita semua menginginkan tercapainya hasil yang sebesar-besarnya itu.

Mudah-mudahan hasil seminar ini dan perumusan selanjutnya oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dapat segera disampaikan kepada pemerintah —dalam hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan— sehingga di dalam waktu yang dekat ini dapat diumumkan dengan resmi kebijaksanaan nasional di dalam bidang kebahasaan, dan dengan demikian manfaat yang sebesar-besarnya dapat dinikmati oleh masyarakat bangsa kita. Mudah-mudahan usaha kita ke arah ini diberkahi oleh Yang Mahaesa.

*Amran Halim*

Kepala Pusat  
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

## PIDATO PEMBUKAAN

*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dengan senang hati saya menyongsong Seminar Politik Bahasa Nasional yang dihadiri oleh berbagai kalangan baik sebagai peserta maupun sebagai peninjau.

Lebih dari 29 tahun yang lalu Undang-Undang Dasar 45 telah menetapkan garis-garis kebijaksanaan dalam masalah kebahasaan yang terkenal, sebagai yang termaktub dalam Bab XV, Pasal 36, yaitu bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara kita, dan bahwa bahasa daerah yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik akan dihormati juga oleh negara karena merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara merupakan lambang semangat kebangsaan Indonesia, pemersatu bangsa dan budaya, alat ketahanan nasional, alat perhubungan antardaerah dan suku bangsa Indonesia, bahasa resmi pemerintah, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat pengembangan pendidikan dan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Kita boleh berbangga dan merasa beruntung bahwa kita sebagai bangsa yang relatif masih muda memiliki bahasa nasional. Saya percaya anda sekalian akan sependapat dengan saya bahwa kita tidak boleh terhanyut oleh kebanggaan saja tetapi hendaknya kita dapat mengimbanginya dengan kesungguhan hati untuk memelihara dan memberikan arah kepada perkembangan bahasa nasional kita itu. Hendaknya kebanggaan kita itu dilengkapi pula dengan keagairahan kita untuk meningkatkan mutu dan luas pemakaiannya di dalam masyarakat kita, terutama peningkatan mutu pengajarannya di lembaga-lembaga pendidikan kita mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Pengajaran dan pemakaian bahasa Indonesia hendaknya sedemikian rupa sehingga makin lama pengetahuan mengenai bahasa Indonesia makin mendalam dan penggunaannya makin meluas sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai wahana pengungkapan budaya, sebagai pendukung dan alat pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai sarana kenegaraan.

Berdasarkan penjelasan mengenai ketetapan Undang-Undang Dasar kita, tidaklah perlu dikhawatirkan bahwa kedudukan bahasa daerah akan terdesak atau tersingkir sama sekali oleh bahasa nasional. Perasaan ini tidaklah benar oleh karena di luar lembaga-lembaga pendidikan anak didik umumnya tetap

memakai bahasa daerah masing-masing, baik di dalam lingkungan keluarganya maupun di dalam masyarakat daerahnya. Sebagai bagian yang penting dalam kebudayaan nasional, bahasa daerah tentulah akan tetap mendapat perhatian dari pemerintah, baik di dalam hubungannya dengan kehidupan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia pendidikan. Selain daripada itu, peranan bahasa daerah sebagai salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya bahasa nasional perlu tetap kita pelihara.

Pada waktu ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sedang mengadakan persiapan-persiapan agar dalam abad XX ini dapat diwujudkan siaran nasional melalui radio dan televisi khusus untuk guru (tahun 1978). Usaha ini nanti akan diteruskan untuk kepentingan anak didik dari sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan. Seluruh kegiatan ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Ini merupakan salah satu usaha untuk membantu para guru dalam tugasnya di seluruh pelosok tanah air kita. Murid-murid yang putus sekolah diharapkan pula dapat memanfaatkan sarana ini untuk meningkatkan ilmu yang telah diperolehnya bagi bekal hidup selanjutnya.

Di dalam hubungan ini jelaslah betapa pentingnya peranan yang dimainkan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Untuk ini, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia perlu diberi prioritas tinggi.

Sebagai warga masyarakat dunia, kita tidak dapat melepaskan diri dari masalah pemakaian dan pengajaran bahasa-bahasa asing yang lazim dipakai di dalam hubungan antarbangsa dan di dalam dunia ilmu pengetahuan. Seharusnya kita dapat mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi kepentingan nasional kita; bahkan kita harus dapat memanfaatkannya sebagai salah satu sumber untuk kepentingan pengembangan bahasa nasional kita, terutama di dalam pengembangan tata istilah.

Pengajaran bahasa-bahasa asing perlu dimulai sejak pendidikan menengah, dan dalam kedudukannya sebagai bahasa asing, bahasa-bahasa ini tidaklah boleh bersaing baik dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara maupun dengan bahasa-bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

Semua masalah yang saya sebutkan ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan nasional dalam bidang kebahasaan. Saya minta agar segenap masalah kebahasaan ini dapat dibahas dengan seteliti-telitinya di dalam seminar ini. Sumbangan pendapat dan saran anda sekalian di dalam perumusan kebijaksanaan nasional itu merupakan bahan yang tak ternilai harganya di dalam usaha kita bersama untuk menanganai masalah bahasa, yang merupakan salah satu masalah

nasional itu. Dan oleh karena itu, masalah bahasa memerlukan kerja sama nasional pula untuk mengatasinya.

Mudah-mudahan usaha anda sekalian selama dan sesudah seminar ini berlangsung untuk ikut mengolah masalah nasional ini diberkahi oleh Yang Mahakuasa.

*Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Syarif Thajeb  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

**1**

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN  
BAHASA INDONESIA**

**AMRAN HALIM**

## Umum

Salah satu masalah kebahasaan yang perumusan dan dasar penggarapannya perlu dicakup oleh kebijaksanaan nasional di dalam bidang kebahasaan adalah fungsi dan kedudukan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan *fungsi bahasa* di dalam hubungan ini adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu di dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Yang dimaksud dengan kedudukan bahasa adalah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya, yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan.

Mengapa fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia perlu dirumuskan? Mengapa masalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia perlu dicakup oleh kebijaksanaan bahasa nasional dalam arti kebijaksanaan nasional mengenai kebahasaan? Jawaban atas kedua pertanyaan ini berhubungan erat dan isi-mengisi. Perumusan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia diperlukan oleh karena perumusan itu memungkinkan kita mengadakan pembedaan antara fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia pada satu pihak serta fungsi dan kedudukan bahasa-bahasa lain, baik bahasa-bahasa daerah yang hidup sebagai unsur kebudayaan kita maupun bahasa-bahasa asing yang dipakai di Indonesia. Kekaburan yang terdapat di dalam pembedaan fungsi dan kedudukan antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain itu bukan saja merugikan bagi perkembangan dan pembakuan bahasa Indonesia tetapi juga dapat menyebabkan terjadinya kekacauan di dalam cara berfikir pada anak-anak kita. Salah satu akibat yang dapat ditimbulkan oleh kekaburan pembedaan fungsi dan kedudukan itu adalah mengalirnya unsur-unsur bahasa yang pada dasarnya tidak diperlukan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Demikianlah terjadinya pembanjiran bahasa Indonesia oleh unsur-unsur yang tidak diperlukan dari bahasa-bahasa lain, terutama bahasa Inggris. Dengan mengalirnya unsur-unsur bahasa dari bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia itu, pembakuan bahasa Indonesia menjadi jauh lebih rumit daripada yang semestinya. Pembedaan fungsi dan kedudukan bahasa memungkinkan kita mengatur masuknya unsur-unsur baru dari bahasa-bahasa lain itu sedemikian rupa sehingga hanya unsur-unsur yang benar-benar dibutuhkan untuk memperkaya bahasa nasional kita sajalah yang kita terima. Meniadakan sama sekali masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia tidak mungkin dilakukan oleh karena adalah suatu kenyataan bahwa apabila dua bahasa atau lebih dipergunakan di dalam masyarakat yang sama, maka terjadilah apa yang disebut kontak bahasa, yang mau tidak mau mengakibatkan terjadinya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, yang perlu dilaksanakan adalah pengaturan hubungan timbal balik itu sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kepincangan di dalam

perkembangan bahasa yang bersangkutan, dan sehingga masing-masing bahasa itu tetap mempertahankan identitasnya masing-masing. Selain daripada itu, masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia tidak perlu dihindarkan sama sekali, asal saja pemasukannya itu sesuai dengan keperluan di dalam usaha kita untuk mengembangkan dan membakukan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, bahasa Indonesia sebagai bahasa modern hendaklah bersifat terbuka dengan pengertian bahwa ia memberikan tempat bagi unsur-unsur baru yang diperlukannya, yang apabila perlu dipungut dari bahasa-bahasa lain dengan melalui penyerasian dengan sistem bahasa Indonesia itu sendiri yang pada waktu yang sama tetap mempertahankan identitasnya. Untuk ini perlu dirumuskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu dengan secermat-cermatnya.

Masalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia adalah salah satu di antara masalah kebahasaan yang kita hadapi. Ia merupakan satu bagian dari keseluruhan jaringan masalah kebahasaan kita itu. Oleh karena itu, kebijaksanaan bahasa nasional yang lengkap harus mencakup juga masalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu.

### **Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional**

Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kedudukan sebagai bahasa nasional ini dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu, yang mendasari bahasa Indonesia itu, telah dipakai sebagai *lingua franca* selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita, dan bahwa di dalam masyarakat kita tidak terjadi "persaingan bahasa", yaitu persaingan di antara bahasa daerah yang satu dan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa nasional. Dengan demikian, pengumandangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di dalam Sumpah Pemuda 1928 itu tidak menimbulkan kesukaran apa-apa.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan kebangsaan, (2) lambang identitas nasional, (3) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan (4) alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya.

Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Dengan melalui bahasa nasionalnya, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikannya pegangan hidup. Atas dasar kebanggaan

ini, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan, dan rasa kebanggaan memakainya senantiasa kita bina.

2 Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan negara kita. Di dalam melaksanakan fungsi ini bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri pula, sehingga ia serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya sendiri hanya apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga ia bersih dari unsur-unsur bahasa lain, terutama bahasa asing seperti bahasa Inggris, yang tidak benar-benar diperlukan.

3. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan dan sebagai lambang identitas nasional berhubungan erat dengan fungsinya yang ketiga, yaitu sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai-bagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai-bagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Malah lebih dari itu. Dengan bahasa nasional itu, kita dapat meletakkan kepentingan nasional kita jauh di atas kepentingan daerah dan golongan kita.

4. Latar belakang sosial budaya dan latar belakang kebahasaan yang berbeda-beda itu tidak pula menghambat adanya perhubungan antardaerah dan antarbudaya. Berkat adanya bahasa nasional kita, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Kita dapat berpersionan dari pelosok yang satu ke pelosok yang lain di tanah air kita ini dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Kenyataan ini dan meningkatnya penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia di dalam fungsinya sebagai alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya telah dimungkinkan pula oleh meningkatnya perbaikan sarana perhubungan darat, laut, dan udara, oleh bertambah luasnya penggunaan alat-alat perhubungan massa seperti radio, televisi, radio dan majalah, oleh bertambah meningkatnya arus perpindahan penduduk baik dalam bentuk perantauan perorangan maupun dalam bentuk transmigrasi yang berencana, oleh meningkatnya jumlah perkawinan antar-suku, serta oleh pemindahan petugas-petugas negara baik sipil maupun militer dari satu daerah ke daerah yang lain.

Sejalan dengan fungsinya sebagai alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya, bahasa Indonesia telah berhasil pula melaksanakan fungsinya sebagai alat pengungkapan perasaan. Kalau beberapa tahun yang lalu masih

ada orang yang merasa bahwa bahasa Indonesia belum sanggup mengungkapkan nuansa peranan yang halus-halus, maka sekarang kita lihat kenyataan bahwa seni sastra dan drama — baik yang dituliskan maupun yang dilisankan — serta dunia perfilman kita telah berkembang sedemikian rupa sehingga nuansa perasaan yang betapa pun halusnyapun dapat diungkapkan dengan memakai bahasa Indonesia. Kenyataan ini tentulah menambah tebalnya rasa bangga kita akan kemampuan bahasa nasional kita itu.

### **Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara**

Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan, dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Di dalam hubungan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, istilah "bahasa resmi" sengaja tidak dipakai di dalam kertas kerja ini. Penghindaran istilah "bahasa resmi" itu disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak semua bahasa resmi adalah bahasa negara. Bahasa daerah dapat pula menjadi bahasa resmi di dalam lingkungan sosial budayanya sendiri. Upacara-upacara resmi kraton di Jawa, misalnya, dilaksanakan dengan mempergunakan bahasa Jawa, tidak dengan memakai bahasa Indonesia. Demikian pula halnya dengan penggunaan bahasa Sunda di dalam upacara-upacara adat di Jawa Barat, dan pemakaian bahasa Minangkabau di dalam upacara-upacara adat di Sumatra Barat. Malah bahasa Indonesia pun dapat dikatakan merupakan bahasa resmi selama masa penjajahan karena ia dipakai baik oleh Belanda maupun — dan terutama — oleh Jepang sebagai bahasa pemerintahan di dalam menghadapi penduduk asli di samping bahasa Belanda selama masa-masa penjajahan Belanda dan bahasa Jepang selama masa penjajahan Jepang. Namun, jelaslah bahwa bahasa Indonesia pada waktu itu tidak memiliki kedudukan sebagai bahasa negara.

Salah satu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah pemakaiannya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Di dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan.

Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat-menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditulis di

dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Hanya di dalam keadaan tertentu, demi kepentingan komunikasi antarbangsa, kadang-kadang pidato resmi ditulis dan diucapkan di dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Demikian pula halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat kita di dalam hubungan dengan upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Dengan kata lain, komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat berlangsung dengan mempergunakan bahasa Indonesia.

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan dengan sebaik-baiknya, pemakaian bahasa Indonesia di dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan perlu senantiasa dibina dan dikembangkan, penguasaan bahasa Indonesia perlu dijadikan salah satu faktor yang menentukan di dalam pengembangan ketenagaan seperti penerimaan karyawan baru, kenaikan pangkat, baik sipil maupun militer, dan pemberian tugas-tugas khusus baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu, mutu kebahasaan siaran radio dan televisi perlu pula senantiasa dibina dan ditingkatkan.

2 Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia kecuali di daerah-daerah bahasa seperti daerah bahasa Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali dan Makasar. Di daerah-daerah bahasa ini bahasa daerah yang bersangkutan dipakai sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga pendidikan dasar.

Masalah pemakaian bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar di segala jenis dan tingkat pendidikan di seluruh Indonesia tampaknya masih merupakan masalah yang meminta perhatian. Penelitian-penelitian yang hasilnya memperkuat perlunya pemakaian bahasa ibu sebagai bahasa pengantar selama tahun-tahun pertama pendidikan cukup banyak. Sebaliknya, ada pula penelitian dan observasi yang hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh pemakaian bahasa yang bukan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar. Apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini adalah penelitian jangka panjang — sekurang-kurangnya enam tahun — yang melibatkan dua kelompok anak didik dengan latar belakang bahasa daerah yang sama. Penelitian dimulai ketika anak-anak didik itu masuk kelas 1 sekolah dasar, dan berakhir ketika mereka akan masuk kelas 1 sekolah menengah pertama. Kelompok anak didik yang satu dididik dengan memakai bahasa ibu mereka sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga, dan sesudah itu dengan memakai bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar. Kelompok anak didik yang satu lagi dididik dengan memakai bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar mulai dari kelas satu sampai dengan kelas 6.

Dengan persiapan yang cermat dan penelitian yang bersungguh-sungguh dapatlah kita ketahui pada akhir tahun keenam apakah terdapat perbedaan di antara kedua kelompok anak didik itu baik dipandang dari segi penguasaan bahasanya maupun ditinjau dari segi perkembangan kepribadiannya. Sementara itu, agaknya jalan yang dapat ditempuh adalah pemakaian bahasa ibu sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga dan pengajaran bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran mulai dari tahun pertama pendidikan dasar.

Namun, pemakaian bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan dapat dipertimbangkan atas dasar sebagai berikut:

1. Luasnya pemakaian bahasa Indonesia baik sebagai akibat pemakaiannya sebagai alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya maupun sebagai akibat meningkatnya pemanfaatan sarana komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar dan majalah menempatkan bahasa Indonesia itu pada posisi yang tidak benar-benar asing bagi anak didik.
2. Anak didik pada usia sampai dengan 9 atau 10 tahun memiliki kapasitas dasar bagi penguasaan bahasa Indonesia yang dapat diandalkan.
3. Rencana Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengadakan program pendidikan bagi guru dan murid melalui radio dan televisi dengan mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar akan menempatkan anak didik yang tidak mengenal bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada posisi yang tidak menguntungkan.
4. Pemandahan penduduk dan kepentingan tempat bekerja orang tua dari satu daerah ke daerah yang lain menyulitkan anak didik di dalam penyesuaian mereka dengan pemakaian bahasa pengantar yang baru.

3 ✓ Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan berhubungan erat dengan fungsinya sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan. Di dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antardaerah dan antarsuku, tetapi juga sebagai alat perhubungan antardaerah dan antarsuku; dengan katalain, sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar sosial budaya dan bahasanya. Dari ilmu sosiolinguistik kita ketahui bahwa pemilihan bahasa apa yang dipakai dalam keadaan tertentu di dalam masyarakat yang mengenal pemakaian dua buah bahasa atau lebih adalah salah satu pokok persoalan yang diperkatakan. Jadi, apabila pokok persoalan yang diperkatakan itu adalah masalah yang menyangkut tingkat nasional, bukan tingkat daerah, maka terdapatlah kecenderungan untuk mempergunakan bahasa nasional,

bukan bahasa daerah, apalagi apabila di antara orang-orang yang bersangkutan terdapat jarak sosial yang cukup besar.

4v Akhirnya, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri, yang membedakannya dari kebudayaan daerah. Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia kita pergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional kita.

Di samping itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk kepentingan nasional kita. Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta manfaat yang dapat diberikannya kepada perencanaan dan pelaksanaan kita, baik melalui penulisan dan penterjemahan buku-buku teks serta penyajian pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan maupun melalui penulisan buku-buku untuk masyarakat umum dan melalui sarana-sarana lain di luar lembaga-lembaga pendidikan, dilaksanakan dengan mempergunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bangsa kita tidak tergantung sepenuhnya kepada bahasa-bahasa asing di dalam usahanya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta untuk ikut serta di dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu sendiri.

## Kesimpulan

Jelaslah bahwa, sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928 dan Undang-Undang Dasar 1945 (Bab XV, Pasal 36), bahasa Indonesia berkedudukan sebagai (1) bahasa nasional dan (2) bahasa negara.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan (4) alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan (4) alat pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S. Takdir. 1957. *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Fishman, Joshua A., Editor. 1974. *Advances in Language Planning*. The Hague: Mouton.
- Halim, Amran. 1971. "Multilingualism in Relation to the Development of Bahasa Indonesia". *RELC JOURNAL*, Desember 1971: 4-19.
- , dan Latief, A. 1973. "Some Sociolinguistic Problems of Indonesia". *Bahasa dan Kesusastraan*, No. 2, Tahun 1973: 1-15.
- , 1974. "Fungsi Politik Bahasa Nasional". Di dalam *Politik Bahasa Nasional: Laporan Praseminar 29-31 Oktober 1974*. Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional.
- Lembaga Bahasa Nasional. 1974. *Politik Bahasa Nasional: Laporan Praseminar 29-31 Oktober 1974*. Jakarta.
- Rice, Frank A. 1962. *Study of the Role of Second Languages in Asia, Africa, and Latin America*. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics, Modern Language Association of America.
- UNESCO. 1953. *The Use of Vernacular Languages in Education*. Paris.

**2**

**CIRI-CIRI BAHASA  
INDONESIA YANG BAKU**

**ANTON M. MOELIONO**

## 1. Ciri Bahasa Baku

**B**ahasa baku perlu memiliki sifat kemandirian dinamis, yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Tetapi kemandirian itu cukup terbuka untuk perubahan yang sistematis di bidang kosa kata dan peristilahan dan untuk perkembangan berjenis ragam dan gaya di bidang kalimat dan makna.

Untuk mencapai kemandirian itu perlu diusahakan pekerjaan kodifikasi bahasa. Kodifikasi tersebut menyangkut dua aspek yang penting: (1) bahasa menurut situasi pemakai dan pemakaiannya; (2) bahasa menurut strukturnya sebagai suatu sistem komunikasi.

Kodifikasi yang pertama akan menghasilkan sejumlah ragam bahasa dan gaya bahasa. Perbedaan ragam dan gaya tampak dalam pemakaian bahasa lisan (ujaran) dan bahasa tulisan. Masing-masing akan mengembangkan variasi menurut pemakaiannya di dalam pergaulan keluarga dan sahabat; di dalam hubungan yang formal seperti administrasi pemerintahan, perundang-undangan, dan peradilan; dan di lingkungan pengajaran, sarana komunikasi massa, dan ilmu pengetahuan.

Kodifikasi yang kedua akan menghasilkan tata bahasa dan kosa kata yang baku. Pada umumnya yang layak dianggap baku ialah ujaran, dan tulisan yang dipakai oleh golongan masyarakat yang paling luas pengaruhnya dan paling besar kewibawaannya. Termasuk di dalamnya para pejabat negara, para guru, warga media massa, alim ulama, dan kaum cendekiawan. Karena golongan ini dapat disebut kelompok pembina pendapat umum, maka mereka jugalah yang sebaiknya jadi sasaran usaha pembinaan. Karena bahasa Indonesia digunakan oleh orang yang beraneka ragam daerah dan bahasanya, yang masing-masing mempengaruhi sikap orang berbahasa, maka bahasa yang baku, yang bersandar pada faktor kewibawaan dan pada kenyataan keanekaragaman warga masyarakat kita, akan tumbuh di tempat yang jadi pusat pertemuan berbagai wakil daerah, berbagai macam bidang pengaruh, dan berbagai ragam bidang kehidupan. Pada hemat saya, lambat-laun, bahasa Indonesia yang digunakan di kota metropolitan dan sekitarnya akan jadi tolok bagi semua warga masyarakat bahasa.

✓ Ciri lain yang harus dimiliki bahasa baku yang modern ialah ciri kecendekiwaan. Bahasa Indonesia harus mampu mengungkapkan proses pemikiran yang rumit di berbagai bidang ilmu; teknologi, dan antarhubungan manusia, tanpa menghilangkan kodrat dan kepribadiannya.

Proses pencendekiwaan ini amat penting untuk menampung aspirasi generasi muda yang menuntut taraf kemajuan yang lebih tinggi dan yang ingin mencari pengalaman hidup sebagai akibat perkenalannya dengan kebudayaan lain. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan modern, harus dapat dicapai lewat bahasa Indonesia. Orang yang ragu-ragu terhadap kemampuan

bahasa Indonesia ini akan lari ke bahasa Inggris. Sebagai bahan perbandingan dapat diajukan situasi Jepang. Dengan mempertahankan tata aksaranya (kanji, hiragana, dan katakana) dan tingkat-tingkat bahasanya, bahasa Jepang dapat menjadi sarana penyalur pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bangsa itu untuk jadi bangsa yang modern. Berkat usaha penterjemahan secara besar-besaran, orang Jepang leluasa memperoleh informasi di bidang apa pun yang diinginya.

Ciri inilah yang antara lain dapat membuat bahasa Indonesia mampu bertahan terhadap saingan bahasa Inggris di kalangan orang yang ingin dianggap terpelajar dan modern. Karena proses pemikiran secara cendekia bukan monopoli sesuatu bangsa, pencendekiaan bahasa Indonesia tidak harus berarti pembaratan bahasa. Paradoksnya di sini ialah makin tidak cendekianya bahasa Indonesia seseorang, makin besar hasratnya membaratkan bahasa Indonesia.

Karena kita harus mengejar sejumlah pengalaman cendekia Eropa yang berabad-abad dalam beberapa dasawarsa, bahkan dalam beberapa tahun, usaha pembinaan bahasa di bidang ini amat mendesak. Suatu program nasional di bidang penterjemahan perlu dipertimbangkan. Anak dan remaja yang putus sekolah (*drop-outs*) harus diberi kesempatan menambahkan informasi teknis dan khusus lewat penerbitan yang menunjang keterampilannya di luar sekolah.

## 2. Fungsi Bahasa Baku

Ada empat fungsi yang dijalankan bahasa yang baku, masing-masing: fungsi pemersatu; fungsi penanda kepribadian; fungsi penambah wibawa; dan fungsi sebagai kerangka acuan.

Fungsi pemersatu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terbukti di dalam sejarah perkembangan bangsa kita. Bahasa Indonesia mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa yang ada dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Karena bahasa merupakan wahana dan pengungkap kebudayaan nasional utama, maka fungsi pemersatu dapat ditingkatkan lagi dengan mengintensifkan usaha berlakunya suatu bahasa baku yang adab yang menjadi salah satu ciri manusia Indonesia yang modern.

Fungsi penanda kepribadian yang dijalankan oleh bahasa yang baku dan yang adab akan terlihat bila, di dalam pergaulan dengan bangsa lain, orang Indonesia membedakan dirinya dengan penggunaan bahasa Indonesia. Kita ingin menyatakan identitas kita lewat bahasa Indonesia. Kalau fungsi ini sudah dipraktekkan secara luas, maka bahasa Indonesia dapat dianggap melaksanakan peranannya yang penting sebagai bahasa nasional yang baku.

Fungsi ketiga bahasa Indonesia yang baku ialah sebagai unsur yang menduduki tempat tinggi pada skala tata nilai dalam masyarakat bahasa.

Gengsi yang lekat pada bahasa Indonesia yang baku, karena dipakai oleh kalangan masyarakat yang berpengaruh, menambahkan wibawa pada setiap orang yang dapat menguasai bahasa itu dengan mahir. Fungsi yang menyangkut kewibawaan yang tinggi juga terlaksana kalau bahasa Indonesia dapat dipautkan dengan hasil teknologi yang modern dan unsur kebudayaan yang baru. Kalau nama Inggris yang asing yang diberikan kepada pranata (*institution*), lembaga, bangunan indah, jalan raya yang besar, dan sebagainya diganti dengan nama Indonesia, maka warga masyarakat secara psikologis akan mengindentikkan bahasa Indonesia dengan masyarakat dan kehidupan yang modern dan maju.

Fungsi keempat bahasa Indonesia yang baku sebagai kerangka acuan (*frame of reference*) tiada lain daripada adanya ukuran yang disepakati secara umum tentang tepat tidaknya pemakaian bahasa di dalam situasi tertentu. Fungsi itu akan terpenuhi jika pembinaan suatu tolok diusahakan di bermacam-macam bidang seperti surat-menyurat resmi, bentuk surat keputusan dan kata-kata, risalah dan laporan, undangan, iklan, dan pengumuman, serta sambutan, ceramah, dan pidato.

### 3. Sikap Penutur Bahasa terhadap Bahasa Indonesia yang Baku

Keempat fungsi bahasa yang baku, yang terurai di dalam pasal 2, menimbulkan tiga macam sikap yang perlu dikembangkan.

Fungsi pemersatu dan penanda kepribadian membangkitkan sikap kesetiaan terhadap bahasa Indonesia. Sikap ini dijelmakan oleh usaha melindungi dan mempertahankan sarana persatuan ini terhadap ancaman yang membahayakan keutuhan bahasa, seperti saingan bahasa lain di berbagai bidang kehidupan, atau melandanya unsur bahasa asing yang tidak mutlak diperlukan bagi kelanjutan hidup bahasa Indonesia. Kesetiaan yang ekstrem akan berbentuk purisme yang konservatif, sedangkan kesetiaan yang tipis akan menumbuhkan sikap bahwa tidak ada bahasa yang murni dan karena itu, mana pun dan bagaimana pun bahasa yang kita pakai, tujuan akhir orang berbahasa ialah "asal orang mengerti".

Kesetiaan berbahasa Indonesia dapat dikembangkan jika orang diberi motivasi supaya mau mempelajari bahasa itu. Ganjaran apakah yang dapat diharapkan bila orang fasih berbahasa Indonesia? Ganjaran itu tidak perlu bercorak materi saja. Kalau orang sadar bahwa penguasa bahasa Indonesia yang baik dapat membawanya ke macam-macam peranan nasional, tempat terkemuka di dunia ilmu dan usaha, — pendek kata, kalau masyarakat memang menunjukkan tuntutan, akan kemahiran itu — maka dorongan memahami dan menguasai bahasa Indonesia akan lebih besar.

Fungsi penambah wibawa berkaitan dengan sikap kebanggaan berbahasa Indonesia yang baku. Orang merasa bangga jika mampu berbahasa yang baik

karena ia akan dianggap termasuk kalangan yang terpelajar atau golongan yang terkemuka. Orang merasa bangga jika disapa orang asing dengan bahasa Indonesia, karena sadar bahwa ada bangsa lain yang beranggapan bahasa kita layak dipelajari. Orang akan merasa bangga jika melihat nama-nama Indonesia dilekatkan pada unsur kebudayaan yang modern. Dengan demikian orang disadarkan bahwa bahasa nasional tidak terbatas pada perikehidupan yang terikat pada adat resam lama.

*Menara Pertamina* yang bertingkat dua puluh lima; *pusat belanja* modern dengan *tangga-jalan*; *pekan raya Semarang* yang *upacara pembukaannya* oleh *panitia penyelenggaranya* diatur semeriah-meriahnya; Komisi IX, DPR yang mengadakan *dengaran umum*; *pacuan anjing* di Senayan; yang sekarang cukup sering diberi nama Inggris seakan-akan dianggap bukan alam budaya Indonesia. Dalam bawah-sadar orang, konsep keindonesiaan agaknya masih saja terbatas pada apa-apa yang terbelakang, apa-apa yang tidak modern.

Fungsi kerangka acuan bahasa Indonesia yang baku berhubungan dengan merekahnya kesadaran orang akan adanya suatu standar yang patut diteladani. Kepatuhan orang pada aturan yang baku itu akan menghindarkannya dari sanksi sosial, sebagaimana orang berusaha berbahasa Inggris dengan baik karena takut ditertawakan.

Fungsi tersebut juga akan menyadarkan orang bahwa setiap situasi sosial memerlukan pemakaian bahasa yang tepat dan serasi dengan situasi itu. Perikehidupan kita tidak selalu memerlukan penggunaan bahasa yang bergaya pidato.

Penyebaran informasi kepada masyarakat luas tentang berbagai program pemerintah selayaknya dilakukan dengan bahasa yang tidak bertolak dari bahasa penyampai informasi, tetapi yang berpangkal pada daya terima pihak yang harus memahami informasi itu.

#### 4. Hubungan Bahasa Indonesia dengan Bahasa Nusantara

Di Indonesia terdapat sejumlah bahasa Nusantara penting yang masing-masing dituturkan oleh satu juta orang lebih. Bahasa tersebut mempunyai daya hidup dan masih tetap berfungsi sebagai alat perhubungan antarwarga masyarakat bahasa itu. Bahasa itu pun masih dapat memperkaya bahasa Indonesia, terutama dalam hal perluasan kosa kata dan bentuk kata. Di pihak lain bahasa-bahasa Nusantara akan menerima banyak istilah Indonesia sehingga terjadi pertukaran dua arah. Sampai kini orang masih terlalu banyak menekankan peranan bahasa Nusantara hanya sebagai sumber dan bukan sebagai penerima. Proses asimilasi bahasa itu, sebenarnya, di satu pihak dapat membantu asimilasi bangsa, dan di lain pihak dapat menjamin kelangsungan hidup bahasa Nusantara yang bersangkutan yang harus menyesuaikan dirinya dengan perkembangan sosial di sekitarnya.

Pengakuan atas adanya bahasa Nusantara yang lain berarti pengakuan atas kepribadian kita yang bineka. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia dalam hubungan ini harus ditafsirkan sebagai pengarahannya bagi-tugas dan bagi-fungsi kedua macam bahasa itu yang lengkap-melengkapi.

### **Hubungan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing**

Bangsa Indonesia mengalami kontak dengan beberapa bangsa asing yang membawa bahasa dan kebudayaannya masing-masing. Kontak dengan dunia luar itu telah menambah keperluan untuk mempelajari bahasa asing yang dirasakan berguna bagi bermacam bidang kehidupan seperti agama, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan geopolitik.

Selama bahasa-bahasa itu menjadi sarana yang dapat meningkatkan martabat insani, mencerdaskan rakyat, dan membawa kemajuan material dan spiritual, pengajaran bahasa itu untuk sementara harus dianjurkan. Pembinaan bahasa Indonesia di dalam hubungan ini berarti bahwa bahasa nasional kita dapat pula menimba kekayaan dari sumber tersebut. Di sini pun perlu direncanakan pengarahannya bagi-tugas dan bagi-fungsi sehingga posisi bahasa Indonesia tidak terdesak.

3

# TATA CARA STANDARDISASI DAN PENGEMBANGAN BAHASA NASIONAL

HARIMURTI KRIDALAKSANA

Mohammad Arif:

*Uda, bahasa Indonesia begini miskin akan istilah. Bagaimana kalau kita pakai saja bahasa Belanda untuk mengajarkan ilmu pengetahuan?*

Haji Agus Salim:

*Pada waktu kita mengusir Belanda dari Indonesia, kita juga membuang semua yang bersifat Belanda, termasuk bahasanya. Jadi kalau kita sekarang memakai lagi bahasa Belanda, itu namanya menjilat ludah sendiri.*

(dituturkan oleh Mohammad Arif, bekas ketua seksi kimia-farma Komisi-Istilah).

## I

Prasaran ini akan kami awali dengan mengajak para hadirin untuk memperingati jasa-jasa para pelopor bahasa nasional kita yang dengan pandangannya jauh ke depan telah meletakkan dasar-dasar persatuan bangsa, pertama dengan mengangkat sebuah bahasa persatuan, bahasa Indonesia, dan kedua dengan menempatkan bahasa daerah pada kedudukannya yang tepat.

*Sumpah Pemuda yang berbunyi:*

*Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.*

*Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertanah tumpah darah satu, tanah Indonesia.*

*Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia.*

telah menjadi dokumen dan warisan sejarah yang paling berharga dari semua kekayaan jasmani dan rohani yang dimiliki bangsa Indonesia.

Dokumen yuridis yang juga tak ternilai harganya ialah Undang-undang Dasar 1945 yang dalam Pasal 36 telah merumuskan: Bahasa negara adalah Bahasa Indonesia.

Baik dokumen historis maupun dokumen yuridis tersebut di atas telah sama-sama kita ketahui. Yang jarang dikenal orang ialah dokumen yuridis yang menjadi dasar pengembangan bahasa daerah, yaitu Undang-undang no. 4 tahun 1950 *jo* Undang-undang no. 12 tahun 1954 yang dalam bab IV tentang Bahasa, pasal 5 memberikan rumusan sebagai berikut:

1. *Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar sekolah-sekolah di seluruh Republik Indonesia.*
2. *Ditaman kanak-kanak dan tiga kelas yang terendah di sekolah rendah bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar.*

Dalam penjelasan umumnya dinyatakan:

*... Dan hal yang lebih penting lagi, yang menyatakan betul sifat nasional pendidikan di negara kita ialah menjadikannya bahasa Indonesia bahasa pengantar di semua sekolah-sekolah. Bahasa ialah alat berfikir dan alat menyatakan buah fikiran itu, tetapi selain dari semua itu ialah alat yang terpenting untuk menebalkan rasa nasional suatu bangsa. Walaupun prinsip bahwa bahasa pengantar di sekolah-sekolah ialah bahasa Indonesia, diberi kompromi pada dasar psychologie, dengan demikian, bahwa di tiga kelas yang terendah dari sekolah-sekolah rendah bahasa pengantar ialah bahasa daerah.*

Dalam penjelasan sepasal demi sepasal dinyatakan:

*ayat 2: di dalam kelas-kelas itu bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar, supaya pendidikan bagi anak-anak yang masih kecil itu mendapat hasil yang sebaik-baiknya. Di dalam daerah-daerah yang bahasanya tidak berapa jauh bedanya daripada bahasa Indonesia, seperti umpamanya di daerah Minangkabau dan Jakarta, bahasa ini dipergunakan sebagai bahasa pengantar mulai dari kelas terendah. Di mana bahasa daerah dipergunakan sebagai bahasa pengantar di kelas I-III sekolah rendah di kelas-kelas itu bahasa Indonesia diajarkan sebagai 'verplicht leervak', dan pelajaran-pelajaran diberikan sehingga pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai kelas IV tidak menemui kesulitan lagi.*

Lepas dari soal apakah undang-undang itu secara keseluruhannya masih cocok bagi perkembangan pendidikan kita sekarang ini, bagi kami isi maupun rumusan tentang bahasa daerah itu sekali lagi memperlihatkan betapa jauh pandangan para negarawan dan pelopor pendidikan pada waktu-waktu yang lampau dalam menjabarkan tekad Kongres Pemuda 1928 dan menempatkan fungsi bahasa daerah sebagai alat komunikasi sosial dan sarana pendidikan serta sebagai sarana dan pendukung kebudayaan daerah. Rumusan yang lain daripada apa yang telah dikutip di atas pastilah tidak mencerminkan fungsi dan efisiensi bahasa daerah yang kita idam-idamkan bersama.

Kita yakin bahwa para peserta seminar ini sependapat dengan kami bahwa warisan yang begitu berharga seperti bahasa nasional dan bahasa-bahasa daerah tidak seyogiannya kita sia-siakan, tetapi sebaliknya harus kita bina dan kita kembangkan, bukan hanya demi menghargai warisan budaya para pendahulu kita, tetapi lebih-lebih karena kelanggengan bangsa kita tergantung sekali dari hidupnya bahasa nasional kita.

Dalam rangka membina bahasa nasional itulah usaha standardisasi bahasa Indonesia kita lancarkan. Dan itulah pokok kertas kerja yang ditugaskan kepada kami.

## II

Adalah sesuatu yang sangat mengherankan bahwa ide tentang standardisasi bahasa Indonesia lambat sekali munculnya. Kalau kita baca karangan-karangan yang dimuat dalam majalah *Pembina Bahasa Indonesia*, *Medan Bahasa*, dan *Bahasa dan Budaya* tidak tampak sekalipun hal ini disinggung. Begitu pula bahwa dalam bahasa Indonesia akan timbul variasi-variasi bahasa, baik ragam bahasa maupun dialek-dialek, tidak pernah terpikirkan oleh para ahli bahasa kita pada waktu-waktu yang telah lalu. Bahkan St. Takdir Alisjahbana — orang yang sangat kami segani karena kepeloporannya dalam pengembangan bahasa nasional sejak 1928 hingga kini — dalam ceramah umum di IKIP Jakarta pada peringatatan Sumpah Pemuda tahun 1928 mencemoohkan ide variasi-variasi dalam bahasa Indonesia yang pernah disinggung oleh seorang ahli bahasa. Demikian pula Amin Singgih — orang yang tetap akan kami kenang dengan penuh khidmat — dalam bukunya maupun dalam ceramah-

ceramahny selalu menganjurkan harus dipakainya satu bahasa Indonesia. Tampaknya apa yang tergambar pada para ahli dahulu ialah bahwa di Indonesia ada demikian banyak bahasa dan hanya perlu satu bahasa sebagai alat komunikasi antarsuku. Tidak pernah terbayang dalam pikiran para pelopor bahasa nasional itu bahwa bahasa yang hidup itu tidak pernah statis, melainkan selalu berubah, bukan hanya karena waktu yang menentukan, tetapi juga karena pemakaiannya selalu berubah. Timbulnya variasi-variasi bahasa dalam bentuk ragam bahasa, dialek sosial, dialek regional, dan dialek temporal merupakan refleksi adanya kekuatan sentrifugal yang menandai sebuah bahasa yang hidup. (W.J.S. Poerwadarminta harus dicatat sebagai orang yang pertama yang menyinggung adanya pelbagai variasi bahasa dalam bahasa Indonesia. Sayang benar, bukunya yang memuat hal-hal tersebut, yakni *Bahasa Indonesia untuk Karang-Mengarang*, Yogyakarta 1967 jarang dibaca orang).

Standardisasi bahasa yang menjadi pokok pembicaraan pertemuan ini, entah yang berupa proses, entah yang berupa tindakan, tidak lain daripada refleksi kekuatan sentripetal yang juga menandai sebuah bahasa yang hidup. Dalam bahasa yang hidup akan terus terjadi diversifikasi dalam fungsi, makna dan bentuk; namun bahasa harus tetap berfungsi sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memakainya. Proses sentripetal itu dapat dipercepat dengan apa yang sekarang lazim disebut perencanaan bahasa. Standardisasi bahasa sebagai tindakan merupakan salah satu kegiatan perencanaan bahasa. Bagi negara muda dengan bahasa yang muda seperti bahasa nasional kita ini perencanaan bahasa yang dirumuskan dalam kebijaksanaan bahasa yang menjadi pokok perbincangan kita dalam seminar ini adalah satu keharusan, karena kita tidak dapat membuang tenaga, dana dan waktu dengan menunggu-nunggu sampai standardisasi itu tercapai dengan sendirinya.

Tugas generasi sekarang ini ialah mendewasakan bahasa nasional yang telah diwariskan oleh para pelopor kemerdekaan, agar bahasa nasional itu dapat berfungsi secara efisien sebagai alat komunikasi bagi masyarakat Indonesia yang makin dewasa. Kedewasaan masyarakat tercermin dengan makin banyaknya fungsi komunikasi; dan bahasa sebagai alat komunikasi harus dapat mendukung semua fungsi yang timbul dan ditimbulkan dalam masyarakat. Perencanaan bahasa, khususnya standardisasi bahasa, dilancarkan agar diversifikasi fungsi bahasa tidak mengakibatkan disintegrasi komunikasi. Perencanaan bahasa bukan dimaksudkan untuk membekukan bahasa, melainkan untuk menstabilkannya dengan memberi keluwesan secukupnya agar bahasa dapat dipakai sebagai alat komunikasi yang lincah.

Dalam kertas kerja ini akan dikemukakan tesis bahwa masalah standardisasi bahasa bukan hanya masalah bahasanya saja, atau, dengan meninjau

istilah teori komunikasi, masalah kodenya saja. Standardisasi bahasa berkaitan erat dengan fungsi bahasa dan sikap bahasa.

### III

Dalam Simposium Bahasa dan Kesusastraan tahun 1966 telah dilancarkan saran untuk mulai standardisasi bahasa Indonesia dengan memberi tekanan pada tiga bidang bahasa, yakni bidang ejaan, bidang peristilahan, dan bidang tata bahasa.

Bagaimana pelaksanaan standardisasi bahasa dalam ketiga bidang itu telah sama-sama kita ketahui: dasar-dasar ejaan standar telah dirumuskan dalam Ejaan Yang Disempurnakan. Dengan selesainya Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan nanti, bahasa Indonesia akan mempunyai sistem ejaan yang paling sistematis dan paling lengkap. Masih banyak yang harus dikerjakan dalam kedua bidang yang lain. Seperti halnya dalam bidang ejaan, dalam bidang peristilahan pun kita agak beruntung karena pada waktu-waktu yang lampau para ahli bahasa telah meletakkan dasar-dasar umum bagi pembentukan istilah. Pekerjaan generasi sekarang sudah lebih ringan, yakni menyesuaikan saja ketentuan-ketentuan umum pembentukan istilah itu dengan perkembangan bahasa dan kemajuan ilmu. Meneruskan pekerjaan yang telah dirintis generasi yang telah lampau itulah sebenarnya tugas kita sekarang. Standardisasi bahasa dilakukan bukannya dengan membuang tradisi, dan membuat ketentuan-ketentuan yang baru sama sekali. Standardisasi bahasa merupakan pekerjaan kumulatif dengan menyempurnakan apa yang telah lampau dan meluaskan dasar-dasarnya untuk tahap standardisasi selanjutnya. Harus diakui bahwa dengan kemajuan ilmu dan teknologi masih banyak bidang peristilahan ilmu lain yang belum tergarap. Sebab-musababnya telah banyak diketahui orang, dan tak perlu diulang di sini. Beberapa tindakan yang dapat mengisi kekurangan dalam bidang peristilahan perlu diusulkan di sini:

1. Kegiatan peristilahan hendaknya diintegrasikan dengan kegiatan penyusunan buku dalam tiap bidang ilmu. Hal ini menurut suatu jenis kegiatan kecil yang selama ini diabaikan orang dalam menyusun seperangkat istilah dengan deskripsinya untuk sesuatu bidang sebelum atau selama buku itu disusun. Kegiatan yang terbatas ini akan menolong tercapainya standardisasi istilah dalam suatu bidang ilmu.
2. Kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh Komisi Istilah tahun 1967 perlu diefektifkan kembali. Kegiatan yang semacam itu akan membantu tercapainya koordinasi dalam kegiatan peristilahan secara nasional.

Peristilahan standar dapat tumbuh dengan sendirinya hanya bila jaringan di Indonesia sudah lancar, khususnya bila perbukuan hidup subur. Dalam keadaan seperti sekarang peristilahan dalam taraf nasional harus direncanakan secara lebih sistematis.

Standardisasi tata bahasa sebagai proses, lewat sekolah dan surat kabar, telah memperlihatkan semacam kristalisasi. Dalam sebuah studi perintis yang pernah kami lakukan beberapa tahun yang lalu tampak bahwa para informan sadar mana bentuk-bentuk bahasa yang cocok dan mana yang tidak cocok untuk fungsi-fungsi tertentu.

Suatu kebijaksanaan umum dalam standardisasi tata bahasa dewasa ini tampaknya harus didahului oleh penelitian yang luas di seluruh Indonesia. Untuk masa kini kita masih harus menggantungkan diri pada tradisi sekolah. Buku-buku yang dapat mengisi kekurangan sekarang seperti *Bahasa Indonesia untuk Karang-Mengarang* karangan W.J.S. Poerwadarminta dan *Tjukupkah Kita Membina Bahasa Persatuan Kita?* karangan Soetomo Tjokronegoro, sayang tidak banyak beredar dalam masyarakat kita. Buku-buku yang banyak dipakai orang sekarang, yang pada umumnya memakai judul "tata bahasa" dalam batas-batas tertentu, hanya dapat menambah wawasan kita *tentang* struktur Bahasa Indonesia, tetapi buku-buku itu bukanlah pegangan yang memberi petunjuk bagaimana kita memakai bahasa Indonesia.

Standardisasi lafal selama ini belum pernah dibicarakan orang secara sungguh-sungguh. Selama ini orang memperlakukannya sebagai aspek yang kurang penting, dibandingkan dengan aspek-aspek lain. Kami tidak menganggapnya sebagai perlakuan yang salah. Namun adalah kenyataan bahwa lafal bahasa Indonesia yang tidak memperlihatkan ciri lafal sesuatu daerah biasa dianggap lafal yang "baik". Hal serupa juga kami temukan dalam mencari ciri-ciri bahasa Indonesia standar: sebagian besar responden setuju bahwa bahasa Indonesia standar itu adalah bahasa Indonesia yang tidak mengandung ciri-ciri leksikal dan gramatikal sesuatu bahasa daerah. Lepas dari soal apa saja yang menandai lafal standar itu masalah lafal bahasa Indonesia standar seperti halnya masalah bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan adalah masalah kultural dan masalah kebanggaan: bahasa dengan ciri-ciri yang dimiliki bahasa yang dewasa adalah milik budaya yang memberi ciri khas kepada bangsa kita.

#### IV

Standardisasi dalam bidang lafal, ejaan, peristilahan, dan tata bahasa adalah standardisasi bentuk bahasa atau standardisasi kode semata-mata. Bentuk bahasa itu bergandengan erat dengan fungsi bahasa dan dengan sikap bahasa yang melatarbelakangi bentuk dan fungsi bahasa.

Sama sekali tak ada yang baru dalam pembicaraan tentang bentuk bahasa. Soal ini sudah terlalu sering dan terlalu biasa dibicarakan orang. Bahkan kalau orang berbicara tentang standardisasi bahasa selaiu yang dimaksudkan ialah standardisasi lafal, ejaan, tata bahasa, dan peristilahan saja; jadi standardisasi bentuk bahasa. Tak disadari orang bahwa bahasa itu tidak

mempunyai eksistensi sendiri; bahasa itu ada karena diperlukan untuk berkomunikasi.

Bila kita telah dapat merumuskan bagaimana lafal, ejaan, peristilahan, dan tata bahasa yang standar, kita harus bertanya bentuk-bentuk bahasa standar itu untuk apa saja. Pendek kata, kita pun harus merumuskan fungsi-fungsi bahasa yang standar. Dengan demikian kita pun dapat secara eksplisit menentukan fungsi-fungsi yang standar, yang hanya cocok untuk bentuk-bentuk bahasa yang standar.

Seperti halnya dalam hal mencari ciri bentuk-bentuk bahasa standar, dalam hal mencari fungsi-fungsi standar masalah yang utama adalah menentukan mana yang norma dan mana yang bukan norma. Namun usaha mencari fungsi-fungsi bahasa yang dijadikan norma tampaknya lebih mudah daripada mencari ciri-ciri bentuk bahasa yang dijadikan norma. Hanya orang yang pernah belajar bahasa saja yang dapat mengatakan apakah kalimat "Kita akan tulis kita punya prasaran secepat mungkin" standar atau tidak standar. Tetapi orang yang tak berpendidikan sekalipun dapat mengatakan bahwa kalau berbicara dengan pembesar (lurah, mantri, dsb.), kita harus memakai kata-kata yang terpilih yang mungkin tak lazim dipergunakan kalau berbicara dengan istrinya atau sanak keluarganya; tegasnya, orang harus berbahasa dengan "sopan". Walaupun harus lekas-lekas kami tambahkan di sini bahwa apa yang dimaksudkan "sopan" — entah dalam tingkah laku, entah dalam bahasa, tidak ada kesamaan ukuran dalam segala masyarakat yang pernah kami pelajari, kalau tidak hendak kami katakan tidak universal.

Dari segala fungsi bahasa yang ada tentulah hanya dalam fungsi-fungsi berikut ini kita dapat memakai bentuk-bentuk bahasa (lafal, ejaan, kata atau kalimat, dsb.) yang standar:

1. Komunikasi resmi, yakni dalam surat-menyurat resmi, surat-menyurat dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi-instansi resmi, penamaan dan peristilahan resmi, perundang-undangan, dsb.;
2. Wacana teknis, yakni dalam laporan resmi dan karangan ilmiah;
3. Pembicaraan di depan umum, yakni dalam ceramah, kuliah, khotbah, dsb.;
4. Pembicaraan dengan orang yang dihormati;

Dalam fungsi-fungsi lain tentu saja tak perlu dipergunakan bentuk-bentuk bahasa yang standar.

Kaitan antara bentuk bahasa dan fungsi bahasa perlu sekali ditentukan, karena soal standardisasi ini dikira orang hanya soal memakai kalimat, kata-kata, lafal, dan ejaan semata-mata. Namun lebih penting pula ialah kaitannya dengan sikap-sikap bahasa. Mengapa kita memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan bukan bahasa Jawa atau bahasa Inggris.

tidak lain karena terdorong oleh sikap-sikap yang menginginkan tegaknya bangsa Indonesia yang sejajar dengan bangsa lain tetapi yang mempunyai ciri-ciri khasnya sendiri. Sikap bahasa yang kita inginkan bukan hanya berupa penghargaan kepada bahasa nasional sebagai warisan budaya, karena sikap demikian hanyalah sikap yang pasif. Sikap yang dilandasi kesadaran bahwa bahasa nasional kita masih harus dikembangkan dan ditanamkan baru sangat mendorong usaha-usaha standardisasi bentuk bahasa dan fungsi bahasa.

## V

Standardisasi bahasa hanyalah sebagian saja dari usaha pengembangan bahasa. Namun seperti halnya pengembangan kebudayaan, banyak sarana yang menentukan jadi tidaknya atau sukses tidaknya usaha-usaha standardisasi bahasa. Bila kita melihat bahasa sebagai penerima, sarana-sarana berikut menentukan jadi tidaknya standardisasi bahasa:

### 1. PENDIDIKAN

Bukan hanya pendidikan memerlukan bahasa yang standar tetapi juga sebaliknya bahasa standar memerlukan pendidikan. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang kita anut merupakan satu-satunya sarana yang menyebabkan tercapainya bahasa standar.

### 2. INDUSTRI BUKU

Ti adanya industri buku di Indonesia bukan hanya akan mengakibatkan merosotnya kecerdasan bangsa kita, tetapi juga akan menyebabkan disintegrasi komunikasi di negara kita. Sebaliknya bila industri buku berkembang, proses standardisasi bahasa akan lebih cepat tercapainya.

### 3. PERPUSTAKAAN

Adanya dan mudah diperolehnya buku-buku dalam bahasa Indonesia akan mempercepat proses standardisasi bahasa. Sekarang ini betapa terasanya kekurangan kita karena ti adanya buku-buku referensi seperti kamus dan ensiklopedi yang dapat diandalkan.

### 4. ADMINISTRASI NEGARA

Administrasi negara yang tertib akan menjamin tercapainya bahasa Indonesia standar.

### 5. TENAGA

Pengembangan bahasa juga memerlukan tenaga-tenaga yang terlatih dan terdidik. Alangkah baiknya bila tiap propinsi ada ahli bahasa yang dapat secara penuh ikut mengembangkan bahasa nasional di tiap-tiap tempat. Sekarang ini makin terasa betapa kurangnya ahli bahasa yang dapat ikut dalam penelitian dan pengembangan bahasa seperti perkamusan, pengajaran bahasa, penelitian dasar bahasa, dsb. Masalah tenaga bahasa perlu dipikirkan dan diberi penyelesaian secara sistematis.

## 6. PENELITIAN

Penelitian dasar maupun penelitian terapan dalam bidang bahasa merupakan tiang pancang standarisasi bahasa. Hanya hasil penelitian yang intensif dapat dipakai untuk merumuskan kebijaksanaan bahasa yang tepat.

## 7. MEDIA MASSA

Surat kabar dan majalah telah membuktikan diri sebagai satu-satunya faktor pemelihara bahasa Indonesia dewasa ini. Penggunaan bahasa yang intensif akan menjamin tercapainya bahasa Indonesia standar yang lebih meluas.

## VI

### Beberapa Kesimpulan

1. Usaha standarisasi bahasa adalah bagian yang paling penting dari usaha pemeliharaan dan pengembangan bahasa Indonesia.
2. Standardisasi dalam bidang lafal, ejaan, tata bahasa, dan peristilahan harus disertai pula oleh standarisasi fungsi bahasa dan pengembangan sikap bahasa yang tepat.
3. Sebagai penerima, sarana-sarana berikut akan mempercepat proses standarisasi bahasa Indonesia:
  - a. Sistem pendidikan nasional;
  - b. Industri buku yang berkembang;
  - c. Perpustakaan dan kegemaran membaca;
  - d. Administrasi negara yang tertib;
  - e. Tenaga trampil yang cukup jumlahnya;
  - f. Penelitian dasar dan penelitian terapan;
  - g. Media massa yang hidup.

**4**

**PEMBINAAN PENGAJARAN  
BAHASA INDONESIA**

**I GUSTI NGURAH OKA**

## I. Pendahuluan

Kehadiran pengajaran bahasa Indonesia (PBI) di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada dasarnya berwajah ganda, yaitu sebagai bagian atau alat pendidikan nasional di satu pihak dan sebagai salah satu media pembina bahasa Indonesia (BI) di pihak lain. Sebagai bagian atau alat pendidikan nasional, PBI bertugas membimbing siswa atau pelajar BI agar mereka: (1) memiliki pengetahuan yang sah (*valid*) tentang BI; (2) trampil menggunakan BI, baik untuk bertutur maupun untuk memahami atau mengapresiasi tutur yang berwadahkan BI; dan (3) memiliki sikap mental positif (bangga, hormat, setia, dan prihatin) terhadap BI. Adapun sebagai salah satu media pembina BI, PBI bersama-sama dengan media pembina yang lain berkewajiban (1) mempertahankan keutuhan kepribadian BI sebagai satu bahasa; (2) menyebarluaskan pemakaian BI ke dalam berbagai bidang kegiatan hidup; dan (3) ikut serta mematangkan dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan BI.

Ruang lingkup jangkauan tugas PBI seperti yang digambarkan di atas ternyata mencakup masalah yang sangat luas. PBI bukan hanya berurusan dengan masalah-masalah siswa dalam mempelajari BI, melainkan juga ikut menangani kerumitan masalah BI sendiri dan pemakaiannya dalam berbagai bidang kegiatan hidup. Dalam penggarapan masalah-masalah ini, PBI harus pula mempertimbangkan ketentuan politik pembangunan nasional, tujuan pendidikan nasional dan politik bahasa nasional. Singkatnya, masalah-masalah yang dihadapi PBI beraneka ragam dan rumit pula keadaannya.

Melihat beratnya keadaan tugas yang dihadapi PBI ditambah lagi dengan harapan masyarakat akan hasil-hasil baiknya, maka sudah pada tempatnya kalau dilaksanakan pembinaan terhadap PBI ini. Pembinaan yang dimaksudkan adalah pembinaan yang lebih baik lagi daripada yang sudah dikerjakan selama ini. Perlu ada semacam program sistematis dan terarah yang mampu membina PBI secara lebih baik. Hanya program yang demikian ini akan memungkinkan PBI mampu menampilkan hasil-hasil seperti yang diharapkan masyarakat.

Untuk menyusun program pembinaan PBI yang lebih maju, tentu saja diperlukan pokok-pokok pikiran yang relevan. Dengan pokok-pokok pikiran yang demikian ini akan lebih mudah direncanakan bentuk, isi, pengarahannya, dan sarana penunjang lain yang diperlukan oleh program tersebut. Dalam rangka usaha mewujudkan program ini, lewat kertas kerja ini ditampilkan sejumlah pokok pikiran yang berkisar di sekitar:

1. landasan PBI,
2. tujuan PBI,
3. metode dan teknik PBI,

4. guru BI, dan
5. perlindungan terhadap PBI.

Diharapkan Seminar Politik Bahasa Nasional ini dapat mempertimbangkan pokok pikiran ini.

Sekedar untuk diketahui, perangkat pokok pikiran dalam kertas kerja ini adalah endapan pengalaman dan penghayatan terhadap masalah PBI dan hasil pembacaan sejumlah pustaka yang mampu dijangkau, yang tercantum pada daftar bacaan sumber di akhir kertas kerja ini.

## II. Pokok-pokok Pikiran untuk Pembinaan PBI

### II.1 Landasan PBI

PBI sebagai pengajaran bahasa nasional pada dasarnya bertolak dari dua macam landasan, yaitu (1) landasan institusional dan (2) landasan akademis. Setiap landasan ini berupa ketentuan-ketentuan yang kait-berkait yang mewarnai keseluruhan proses PBI itu.

Ke dalam landasan institusional termasuk:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, terutama pasal 36, yang menyatakan: "Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia." Istilah "bahasa negara" dalam hubungan ini dapat diartikan bahasa nasional dan bahasa resmi.

Sebagai bahasa nasional, BI berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan bangsa, sedangkan sebagai bahasa resmi, BI berfungsi memwadahi seluruh kegiatan pemerintah (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat resmi.

2. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), terutama yang tersurat pada 9ab IIA, IIB dan IIE, yang menggariskan bentuk, isi, dan tujuan pendidikan nasional dalam era pembangunan. Ke dalam pendidikan nasional ini termasuk pengajaran bahasa nasional, sebagai bagian dan alat pendidikan tersebut.
3. Politik bahasa nasional, yang berupa kebijaksanaan nasional di bidang kebahasaan bagi kepentingan keseluruhan pembangunan nasional (*Politik Bahasa Nasional, Laporan Praseminar 29-31 Oktober 1974*). Termasuk ke dalam jangkauan politik bahasa nasional ini adalah kebijaksanaan di bidang PBI.

Landasan institusional PBI seperti tersebut di atas ini tidak perlu dipersoalkan lagi, karena landasan ini telah memberikan dasar-dasar dan pengarahan yang kokoh kepada PBI.

Tidak demikian halnya dengan landasan akademis PBI itu. PBI belum bertolak dari ketentuan-ketentuan ilmiah yang kokoh. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa kehadiran PBI sebagai pengajaran bahasa nasional boleh dikatakan relatif masih sangat muda. Studi melandasi PBI dengan

penemuan-penemuan ilmiah belum sempat dikerjakan secara meluas. Lebih-lebih lagi kalau dihubungkan dengan terbatasnya tenaga ahli PBI, fasilitas, dan sarana penunjang lain yang diperlukan untuk memperlancar studi tersebut. Walaupun demikian, ini bukan berarti bahwa PBI dibiarkan tanpa landasan akademis samasekali. Sudah waktunya dimulai usaha-usaha menemukan unsur-unsur landasan ilmiah bagi program PBI secara menyeluruh di kemudian hari. Minimal usaha-usaha tersebut dimulai dengan mendaftarkan pokok-pokok pikiran yang relevan.

Dalam rangka usaha menemukan unsur-unsur landasan ilmiah bagi PBI, ada baiknya dipertimbangkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh beberapa; (1) linguistik, (2) linguistik terapan, (3) studi kedwibahasaan, dan (4) ilmu jiwa belajar dan ilmu jiwa belajar bahasa.

Linguistik adalah disiplin yang dianggap paling berkewenangan menggambarkan bahasa dari dalam diri bahasa itu sendiri. Karena kewenangannya ini, maka gambaran atau deskripsi bahasa yang ditampilkannya dipandang oleh dunia ilmu pengetahuan sebagai deskripsi yang sah (*valid*). Deskripsi bahasa secara linguistik inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kegiatan akademis lainnya yang berurusan dengan bahasa, termasuk studi modern mengenai pengajaran bahasa. Dengan kata lain, studi modern mengenai pengajaran bahasa menerapkan linguistik ke dalam bidangnya.

Penerapan Linguistik ke dalam pengajaran bahasa dirintis di Amerika di sekitar tahun 1940-an (William G. Moulton dalam A.L. Kroeber, 1958). Oleh para ahlinya, linguistik dikatakan membantu pengajaran bahasa dalam: (1) menentukan deskripsi bahasa yang akan diajarkan; (2) memilih materi bahasa yang sebaiknya diajarkan; dan (3) memberi pedoman tentang cara penganalisaan materi bahasa yang diajarkan itu (Charleston T. Hodge dalam *Anthropological Linguistics*, 1963).

Tentu saja hasil-hasil linguistik tidak secara langsung diterapkan ke dalam pengajaran bahasa, lebih-lebih lagi kalau dilihat kenyataan bahwa deskripsi bahasa secara linguistik ini seringkali sangat teknis sifatnya. Tidak mungkin deskripsi yang demikian ini langsung disajikan sebagai bahan pelajaran. Oleh karena itu, sebuah deskripsi linguistik perlu diolah kembali untuk kemudian ditata berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pendidikan, sehingga menjadi bahan pelajaran yang satuan-satuannya dibatasi sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, yang berkesinambungan dan berjenjang dalam kesulitan dari satuan yang satu ke satuan yang berikutnya. Bahan pelajaran yang demikian inilah yang disebut *tata bahasa pendidikan* sebagai bentuk terapan dari tata bahasa ilmiah hasil linguistik.

Di samping linguistik (linguistik murni), studi modern mengenai pengajaran bahasa telah memanfaatkan pula hasil-hasil linguistik terapan, yaitu

linguistik yang mempelajari bahasa dengan pendekatan dari luar diri bahasa itu sendiri. Termasuk ke dalam linguistik terapan ini, antara lain: (1) sosiolinguistik, yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat; (2) psikolinguistik, yang meneliti hubungan bahasa dengan kehidupan kejiwaan; dan (3) etnolinguistik atau linguistik antropologi yang mempelajari hubungan bahasa dengan kebudayaan. Dari sosiolinguistik, pengajaran bahasa memperoleh bimbingan dalam pemilihan ragam bahasa yang tepat untuk diajarkan, dan pemilihan materi bahasa (kata, ungkapan, kalimat) yang diterima oleh masyarakat (Oller, Jr., 1971). Dari psikolinguistik, pengajaran bahasa dapat dimanfaatkan teori-teori yang menerangkan proses kejiwaan siswa dalam belajar bahasa (Slobin, 1971). Sedangkan dari etnolinguistik, pengajaran bahasa memperoleh tuntunan dalam menempatkan diri secara tepat di tengah-tengah kehidupan kebudayaan tempat pengajaran bahasa itu dilaksanakan (A.L. Kroeber, 1958).

Belakangan ini di negara-negara yang sudah maju pembinaan ilmu pengetahuannya berkembang studi kebahasaan yang disebut studi kedwibahasaan (*bilingualism*). Studi ini memilih masalah-masalah kebahasaan di tengah-tengah masyarakat yang memakai lebih dari satu bahasa sebagai sasaran. Termasuk sasaran studinya adalah implikasi-implikasi kejiwaan yang berjalan pada masyarakat tersebut, baik pada keseluruhan masyarakat itu sebagai satu kesatuan sosial; maupun pada kelompok-kelompoknya dan juga individu-individu warga masyarakat tersebut. Penemuan-penemuan studi kedwibahasaan ini banyak sekali dimanfaatkan oleh studi mengenai pengajaran bahasa, terutama yang dikenal dengan nama pengajaran bahasa kedua (*second language teaching*) dan pengajaran bahasa asing (*foreign language teaching*). Agaknya, kedua jenis pengajaran bahasa ini banyak sekali diuntungkan.

Studi kedwibahasaan memandu pengajaran bahasa dalam memilih dan menata bahan pelajaran, menemukan penalaran (rasional) gejala-gejala pemakaian bahasa; dan dalam menemukan metode dan teknik penyajian bahan yang baik. Dalam bimbingannya itu, studi kedwibahasaan memberikan keterangan tentang: (1) pemindahan (*transferensi*) unsur-unsur bahasa (struktural dan material) dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain, (2) faktor-faktor yang mendorong pemindahan tersebut, dan (3) alternasi-alternasi penyikapan terhadap gejala pemindahan itu (Joshua Fishman, 1966). Pemanfaatan hasil dan bimbingan studi kedwibahasaan oleh studi modern mengenai pengajaran bahasa tampak bernilai positif. Hal ini terbukti misalnya dari makin mantapnya teori-teori yang dikembangkan oleh pengajaran bahasa kedua dan pengajaran bahasa asing.

Hasil-hasil linguistik, linguistik terapan dan studi kedwibahasaan seperti yang telah dibicarakan di muka tidak akan berarti banyak bagi pengajaran

bahasa tanpa dikawinkan dengan teori-teori ilmu jiwa belajar dan ilmu jiwa belajar bahasa. Kedua ilmu yang terakhir ini telah mengembangkan perangkat teori yang menggambarkan proses kejiwaan manusia ketika mereka belajar pada umumnya dan belajar bahasa pada khususnya.

Dalam perkembangan ilmu belajar bahasa tampak menonjol dua jenis aliran yang tidak sejalan, yaitu (1) behaviorisme dan (2) mentalisme. Aliran yang pertama beranggapan bahwa proses belajar bahasa itu berlangsung dalam 5 tahapan, berturut-turut: (1) *trial and error*, (2) mengingat-ingat, (3) meniru, (4) mengasosiasikan, dan (5) menganalogi. Proses ini bisa dikondisikan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh behaviorisme inilah yang dimanfaatkan oleh ahli pengajaran bahasa yang antara lain tampak berupa: latihan pola kalimat, sistem *drill*, dan pengajaran yang diprogramkan (*programmed instruction*).

Tidak demikian halnya pendirian para mentalis. Aliran mentalisme berpendapat bahwa anak manusia dilahirkan *built indengan* daya jiwa bahasa. McNeil menamakan daya ini *Language Acquisition Device* (LAD). Daya jiwa bahasa (LAD) ini bertindak sebagai "mesin" mengolah *input* bahasa yang berupa fragmen-fragmen bahasa yang dihayatinya untuk kemudian diabstraksikannya menjadi pemahaman kaidah-kaidah bahasa tersebut. Meman\_ da tahap-tahap permulaan, pemahaman kaidah itu banyak yang keliru, namun dengan berulang-ulangnya *input* fragmen bahasa yang relatif berpola sama, akhirnya dipahaminya juga kaidah yang besar. Teori belajar bahasa menurut mentalisme ini dipopulerkan antara lain oleh Wallace K. Ewing dengan karangannya yang berjudul "The Mentalist Theory of Language Learning" (Bahan Kulian Penataran Dosen Indonesia Seluruh Indonesia di IKIP Malang, 1972).

Kedua teori belajar bahasa tersebut di atas masing-masing memiliki kekuatannya yang memang bukan untuk dipertentangkan yang satu dengan yang lain. Yang jelas adalah bahwa pengajaran bahasa modern telah mengambil manfaat daripadanya.

Dengan penerapan dan pemanfaatan linguistik terapan, studi kedwi-bahasaan dan ilmu jiwa belajar bahasa seperti yang sudah dibeberkan tampak kemajuan luar biasa dalam studi modern mengenai pengajaran bahasa. Kemajuan tersebut berupa perubahan besar-besaran yang oleh Peter Strevens (1966) dikatakan revolusi dalam pengajaran bahasa sesudah Perang Dunia II. Dengan kata lain, studi modern mengenai pengajaran bahasa telah memiliki landasan akademis yang cukup kuat.

Melihat perkembangan studi modern mengenai pengajaran bahasa, dan mengingat perlunya landasan akademis bagi PBI, maka ditampilkan pokok-pokok pikiran berikut untuk dipertimbangkan:

1. Memakai deskripsi linguistik BI sebagai dasar bahan pelajaran BI.
2. Mempertimbangkan teori-teori sosiolinguistik, psikolinguistik, etnolinguistik dan Kedwibahasaan dalam pemilihan bahan yang cocok untuk program-program PBI yang akan dilaksanakan.
3. Mengembangkan teori-teori PBI dengan menerapkan dan memanfaatkan penemuan-penemuan linguistik, linguistik terapan, studi kedwibahasaan dan ilmu jiwa belajar serta ilmu jiwa belajar bahasa.

Jika ketiga pokok pikiran ini bisa diwujudkan, dapat dipastikan bahwa PBI akan memiliki landasan akademis yang kokoh.

## II.2 Tujuan PBI

Dalam rangka penyusunan program pembinaan PBI yang lebih maju, aspek tujuan perlu mendapat perhatian yang khusus, karena tujuan ini (1) menggambarkan arah gerak keseluruhan proses PBI, (2) target yang akan dicapai, dan (3) kegunaan PBI bagi kehidupan bermasyarakat dan berbudaya dan bagi BI. Sehubungan dengan gagasan ini, tampaknya tujuan PBI yang ada sekarang ini masih banyak mengandung kelemahan. Pada tingkat tujuan institusional, tujuan kurikular dan tujuan instruksional umum, rumusan tujuan PBI yang ada sekarang memang sudah cukup baik, karena dalam rumusan ini dikemukakan target yang bersifat umum.

Tidak demikian halnya rumusan pada tingkat tujuan instruksional khusus. Rumusan tujuan yang terakhir ini sering kabur, dalam arti kata indikator-indikator penanda tercapainya tujuan tersebut tidak dinyatakan dengan tegas. Di samping itu, seringkali tujuan tersebut tidak bisa diukur sehingga sulit untuk membuktikan apakah sebuah topik yang diajarkan dalam satu satuan kegiatan mengajar-belajar sampai kepada tujuannya atau tidak. Akibat buruk dari keadaan yang demikian ini adalah seringkali masyarakat menyatakan kekecewaannya atas hasil-hasil yang dicapai oleh PBI. Dengan kata lain, sering dikatakan PBI tidak atau belum menunjukkan hasil-hasil yang baik.

Tujuan PBI seperti yang digambarkan di atas tidak pada tempatnya dibiarkan dalam keadaan seperti itu. Perlu segera diadakan tindakan pembinaan. Dalam rangka menyiapkan pembinaannya, agaknya pokok-pokok pikiran berikut dapat dipertimbangkan, yaitu (1) tataan tingkatan (hierarki) tujuan, (2) klasifikasi tujuan, dan (3) perincian tujuan.

Tujuan PBI hendaknya ditata dalam tingkatan, (a) tujuan umum PBI yang sejalan dengan tujuan umum pendidikan nasional, (b) tujuan institusional PBI yang sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan (institusi) tempat PBI itu dilaksanakan, (c) tujuan kurikular PBI yang sejalan dengan kurikulum lembaga pendidikan tempat PBI itu dilaksanakan, (d) tujuan instruksional

umum PBI yang merupakan penjabaran aspek tujuan kurikular PBI, dan (e) tujuan instruksional khusus PBI yang merupakan tujuan operasional yang bisa diukur dalam penyajian sebuah topik tertentu (Soedijarto 1974).

Perlu dibedakan 2 macam tujuan PBI itu, yaitu (1) tujuan pendidikan dan (2) tujuan kebahasaan. Dalam tujuan yang pertama PBI berurusan dengan BI dan pemakaiannya. Di dalam tujuan pendidikan PBI, hendaknya tergambar aspek inti tujuan pendidikan, yaitu (1) aspek kognitif yang mencakup pengetahuan dan perkembangan kemampuan inteleks, (2) aspek afektif yang mencakup perubahan dan perkembangan perhatian, sikap mental dan nilai, dan (3) aspek psiko-motor yang mencakup wujud perilaku dan tindak perbuatan (Benyamin S. Bloom (ed.), 1956). Dan tujuan kebahasaan PBI hendaknya menggambarkan perwujudan dari politik bahasa nasional.

Tujuan program PBI adalah membimbing siswa sehingga mereka (1) memiliki pengetahuan yang sah tentang BI, (2) trampil menggunakan BI, baik untuk bertukar pikiran maupun untuk memahami tutur yang berwadhakan BI, dan (3) memiliki sikap mental positif (normat, bangga, setia dan prihatin) terhadap BI.

Sebuah program PBI harus merupakan salah satu media yang (1) mempertahankan keutuhan kepribadian BI, (2) menyebarluaskan pemakaian BI, (3) ikut mengarahkan perubahan dan perkembangan BI, dan (4) ikut membakukan ragam-ragam pemakaian BI.

Dalam pembinaan tujuan PBI, sangat perlu dipertimbangkan kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja yang berhubungan dengan BI. Masyarakat modern Indonesia di masa-masa yang akan datang tampaknya akan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan khusus dalam menggunakan BI, seperti untuk surat-menyurat, promosi, pengantar acara resmi (pidato), dan karang-mengarang. Sehubungan dengan kebutuhan ini, agaknya perlu dimulai menyiapkan program khusus PBI dengan tujuan yang khusus pula. Tentunya program khusus semacam ini hanya tepat dimulai di tingkat pendidikan menengah dan tinggi. PBI yang diselenggarakan di tingkat pendidikan dasar belum dapat memulai program khusus ini karena persyaratan penguasaan BI yang dituntut oleh program khusus ini belum terpenuhi pada lembaga pendidikan tersebut.

### II. 3 Metode dan Teknik PBI

Besar kemungkinan kurang baiknya hasil PBI selama ini disebabkan oleh lemahnya metode dan teknik yang dipakai. Walaupun metode bukan mutlak merupakan *causa prima* suatu proses pengajaran, sebuah metode yang baik pasti akan merupakan sarana penunjang untuk mencapai hasil yang lebih baik. Misalnya C.C. Fries, Robert Lado, dan para pengikutnya berhasil baik dalam

proyek pengajaran bahasanya karena kuatnya metode yang dikembangkan, yaitu metode linguistik (Lado, 1964). Dan Prancis tampak berhasil dalam pengajaran bahasanya karena *Le Français Fondamental* menyarankan pemakaian metode yang berlandaskan perbendaharaan kata terpilih (Strevens, 1966).

Apapun alasan (argumentasi) yang mungkin ditengahkan tentang metode dan teknik pengajaran bahasa ini, dalam rangka pembinaan PBI masalah metode dan teknik masih perlu mendapat perhatian tersendiri. PBI perlu menemukan satu atau lebih metode yang tepat untuk diterapkan bagi siswa Indonesia. Untuk menemukan metode yang demikian ini hal-hal yang patut dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Masalah-masalah yang relevan dengan tujuan PBI, seperti yang telah dipeberkan di muka.
2. Kehadiran BI sebagai satu bahasa tersendiri yang tentunya memiliki perangkat ciri penanda dan pembeda tersendiri pula. Ciri-cirinya ini ada yang bersifat struktural (fonetis, morfologis dan sintaktis) dan ada pula yang non-struktural yang tampak berupa masalah nuansa makna, pemilihan perbendaharaan kata, gaya tutur, tingkah tutur (*speech act*), dan lain sebagainya.
3. Kondisi objektif BI sebagai satu bahasa yang masih muda dan sedang tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Dalam proses pematangan dan pertumbuhan serta perkembangannya, wajarlah apabila terjadi kegoncangan-kegoncangan pada permukaannya, yang antara lain disebabkan oleh pemindahan unsur-unsur bahasa dari bahasa-bahasa lain (bahasa daerah dan bahasa asing) sebagai akibat kontraknya dengan bahasa-bahasa tersebut (Uriel Wienriech, 1961).
4. Situasi kebahasaan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat dwibahasa, dalam arti kata sebagian besar warga masyarakat menguasai dua bahasa, yaitu bahasa daerahnya sebagai bahasa pertama (bahasa ibu) dan BI sebagai bahasa kedua. Dilihat dari segi situasi ini, pengajaran bahasa di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini pada dasarnya berkewajiban menghasilkan dwibahasawan yang baik, yaitu dwibahasawan yang tidak membaurkan batas-batas antara bahasa pertama dan kedua (Leon Jakobovitz dalam Bahasa Kuliah Penataran Pengajaran Bahasa Dosen-dosen IKIP/FK seluruh Indonesia di Malang, 1974).
5. Ragam BI yang fungsional dalam kehidupan siswa. Ragam BI yang dibutuhkan siswa pada tiap jenjang pendidikan pada hakekatnya tidaklah sama betul. Ada perbedaan antara kebutuhan BI siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah, dan mahasiswa. Karena itu keadaan ini patut

dipertimbangkan dalam penemuan metode dan teknik yang tepat untuk PBI.

Sehubungan dengan kelima faktor tersebut di atas, kami pernah mencoba mengembangkan semacam metode PBI untuk sekolah dasar yang kami namai Metode Struktural Fungsional Kedwibahasaan (MSFK) (I Gusti Ngurah Oka, 1974). Sayang sekali metode ini tidak sempat dikembangkan lebih lanjut karena masalah intern di Sekolah Dasar Laboratorium IKIP Malang, tempat percobaannya, tidak memungkinkannya.

Metode dan teknik yang tepat untuk PBI tidak mungkin didapatkan begitu saja tanpa percobaan (eksperimentasi). Pembinaan PBI seharusnya membuka kemungkinan yang agak luas untuk percobaan-percobaan. Agaknya, kesempatan yang demikian itu sudah mulai terbuka dalam beberapa tahun terakhir ini. Hanya sayangnya, percobaan-percobaan yang dikerjakan oleh perseorangan atau yang bersifat lokal belum mendapatkan sambutan yang baik. Pemerintah lebih banyak memberikan kesempatan kepada percobaan yang bersifat nasional. Sehubungan dengan ini, patut disambut baik usaha Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan Kebudayaan yang menyertakan pula PBI dalam (1) percobaan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional, dan (2) percobaan penyajian pelajaran dengan modul pada 8 Proyek Perintis Sekolah Pembangunan di seluruh Indonesia (Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Rapat Koordinasi Proyek Perintis Sekolah Pembangunan di Lembang, Bandung, 19-21 Desember 1974).

Bentuk visual sebuah metode pengajaran bahasa akan berupa perangkat bahan pelajaran yang (1) satuan-satuannya memiliki batas-batas yang tegas dan (2) berkesinambungan secara berjenjang dalam kesulitannya antara satuan yang satu dengan yang lainnya (Halliday dkk., 1964). Agar perangkat bahan ini disajikan dengan tepat oleh guru bahasa, metode tersebut dilengkapi dengan buku pintar (manual) yang memuat petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaannya. Di samping itu, disiapkan pula bahan test bahasa untuk mengukur keberhasilan metode itu. Juga alat-alat pelajaran yang diperlukan oleh metode tersebut ditetapkan sebelumnya. Dalam hubungan ini tampak bahwa test bahasa dan alat pelajaran merupakan komponen fungsional dalam suatu metode khususnya dan pengajaran bahasa umumnya. Tentunya juga kedua komponen ini merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dalam pembinaan PBI. Sudah waktunya pembinaan PBI menyiapkan test BI yang baku untuk berbagai kebutuhan tujuan pengukuran penguasaan BI. Sehubungan dengan test ini, agaknya perlu dipertimbangkan pengembangan test obyektif, peningkatan mutu test subyektif yang selama ini telah terbiasa, atau menemukan pola pengukuran yang lebih baik daripada yang ada

sekarang. Apa pun test itu nantinya, yang paling penting dalam masalah ini adalah keajegan antara materi test dengan tujuan yang hendak dicapai.

Khusus mengenai alat pelajaran yang akan menunjang metoda dan teknik PBI yang terpilih, hendaknya dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan berikut:

1. Pengajaran buku pelajaran dan buku bacaan BI.
2. Pemanfaatan perpustakaan.
3. Pendayagunaan ruangan-ruangan latihan ber-BI, seperti: laboratorium BI, bengkel BI, ruang pesta keunggulan pemakaian bahasa, dan ruang sastra Indonesia.
4. Penggunaan alat-alat teknologi modern, seperti: tape, radio, dan televisi.

#### II.4 Guru BI

Di dalam setiap proses pengajaran, guru memainkan peranan yang sangat penting. Sehubungan dengan ini, sering dikatakan orang bahwa tidak ada metode yang baik atau metode yang jelek. Yang ada ialah guru yang baik dan guru yang tidak baik (Mary F. Finocchiaro, 1969).

Jika pernyataan di atas ini disepakati, tentunya dalam PBI guru juga memegang peranan penting. Kenyataannya memang demikian. Belum pernah dikembangkan PBI di bumi Indonesia ini tanpa guru. Dan dalam proses PBI yang berlangsung selama ini, guru BI bukan saja bertugas sebagai tenaga pengajar, melainkan juga sebagai model penutur BI yang baik, sebagai orang tempat bertanya tentang masalah-masalah BI dan juga sebagai sasaran "makian" kalau ketrampilan ber-BI siswa kurang baik. Banyak sekali harapan yang digantungkan masyarakat kepada para guru BI. Agar sebagian dari harapan-harapan ini bisa terwujud, para guru BI dalam hubungan dengan pembinaan PBI perlu dijadikan sasaran pembinaan.

Pembinaan terhadap guru BI dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) pembinaan terhadap calon guru BI dan (2) pembinaan terhadap guru BI yang sedang bertugas di lapangan. Pembinaan yang pertama merupakan tugas lembaga-lembaga pendidikan guru BI umumnya dan secara khusus merupakan tugas Jurusan atau Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP. Dalam hubungan ini, lembaga-lembaga pendidikan guru BI tersebut hendaknya terus-menerus mengevaluasi kurikulumnya, sarana penunjang pendidikannya, dan terutama sekali staf pengajarnya. Tidak mungkin dihasilkan guru BI yang baik tanpa staf pengajar berprestasi dan kreatif, walaupun kurikulum dan sarana penunjang pendidikannya berkelayakan. Juga tidak sebaliknya.

Guru-guru BI yang dibutuhkan dalam rangka pembinaan PBI adalah guru-guru yang:

- (1) memiliki pengetahuan akademis tentang (1) BI (strukturnya, per-

tumbuhan dan perkembangannya, ragam pemakaiannya, dan fungsinya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia), (b) siswa ketika mereka belajar BI (proses kejiwaan, kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, dan alternasi-alternasi pemecahan masalahnya), dan (c) PBI sendiri (landasannya, tujuannya, metodenya, dan pengamanannya).

(2) memiliki ketrampilan (a) menggunakan BI dengan kemahiran yang tinggi, baik untuk bertutur maupun untuk memahami dan mengapresiasi keunggulan pemakaian BI, seperti yang tersurat dalam karya sastra, karya ilmiah atau tutur resmi, dan (b) melaksanakan PBI serta menangani masalah-masalahnya.

(3) memiliki sikap mental positif terhadap BI, siswa dan PBI. Banyak lagi yang dapat ditambahkan dalam rangka peninjauan kurikulum lembaga-lembaga pendidikan guru BI, sepanjang penambahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan mutu PBI.

Terhadap guru BI yang sedang bertugas, pembinaan dapat dilaksanakan melalui berbagai media. Hal ini, di negara-negara yang telah maju pembinaan pengajaran bahasanya, dilaksanakan di lembaga-lembaga atau badan-badan yang secara khusus membina para guru. Di Amerika, misalnya, sejak tahun 1952 guru-guru bahasa dalam kerja samanya dengan Ikatan Bahasa Modern (*The Modern Language Association*) mendapat pembinaan dari universitas-universitas terkenal seperti Cornell, Georgetown, Michigan, dan UGIA (W.M. Rivers, 1964). Sejalan dengan usaha ini, agaknya Ikatan Guru Bahasa Indonesia (IBGI)\* yang muncul baru-baru ini dapat dimanfaatkan. Selain itu, penataran-penataran guru BI yang belakangan ini telah banyak dikerjakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau oleh badan-badan lain, patut disambut dengan gembira.

Satu hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pembinaan guru BI ini ialah mencari media yang memungkinkan mereka tampil sebagai subyek.

Sudah terlalu lama dan terlalu sering mereka dijadikan obyek belaka. Media yang dimaksudkan adalah media yang memberikan mereka kesempatan untuk menampilkan gagasan-gagasannya, kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, penilaiannya terhadap karya yang berhubungan dengan BI, dan lain sebagainya. Untuk maksud ini, agaknya terbitan berkala seperti majalah *Medan Bahasa, Pembina Bahasa Indonesia*, atau lembaran khusus BI dalam harian perlu dibina.

## II.5 Perlindungan terhadap PBI

Secara konsepsional dan institusional, PBI telah mendapat perlindungan yang cukup baik dari Pemerintah dan masyarakat. Dengan predikat penga-

jaran bahasa nasional, PBI sudah menduduki tempat terhormat pada hampir setiap tataan kurikulum lembaga pendidikan di bumi Indonesia ini. Tetapi dalam praktek perlindungan yang demikian itu belum begitu tinggi pengamanannya. Bahwa demikian adanya terbukti misalnya dari terbatasnya kesempatan, fasilitas, dan sarana penunjang yang memungkinkan penyelenggaraan pembinaan yang lebih baik terhadap PBI. Kebanyakan lembaga pendidikan sekarang belum mampu menyediakan perpustakaan tempat para siswa memperoleh buku-buku yang disyaratkan oleh PBI. Jangan dikatakan lagi alat-alat modern, seperti laboratorium bahasa, ruang pesta, dan lain sebagainya.

Selain daripada kesempatan, fasilitas, dan sarana penunjang seperti yang dinyatakan di atas, perlindungan praktis terhadap hasil-hasil PBI belum banyak terbina. Siswa yang berprestasi baik dalam BI kurang mendapatkan penghargaan yang patut. Malahan prestasinya ini tidak begitu banyak membantu mereka dalam melanjutkan studi atau mendapatkan lapangan kerja di tengah-tengah masyarakat. Sampai sekarang ini masih belum ada lapangan kerja yang mensyaratkan ketrampilan ber-BI yang baik bagi (calon) karyawannya, seperti halnya persyaratan penguasaan bahasa asing tertentu (bahasa Inggris) yang dituntutnya. Oleh karena itu, dapat dipahami kalau siswa tidak bergairah untuk mengikuti PBI dengan baik. Sejalan dengan keadaan ini, tampak pula kelesuan peminat dalam studi BI dan PBI. "Studi Bahasa Indonesia kurang populer", demikian Dr. Boen S. Oemaryati mengungkapkan pendapatnya dalam sebuah kertas kerja pada Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi awal bulan November 1974 yang lalu. Salah satu faktor penyebab kelesuan ini adalah belum tampaknya kecerahan masa depan keahlian BI dan PBI ini, dalam arti kata belum tampak perlindungan sosial-ekonomi yang segera bisa dinikmati oleh kebanyakan ahli BI dan PBI.

Gejala-gejala seperti yang dibebankan di atas sebenarnya tak perlu terjadi, seandainya Pemerintah khususnya dan masyarakat umumnya memberikan perlindungan yang patut kepada PBI dan studi BI. Cukup banyak alasan untuk memberikan perlindungan yang demikian. Salah satu di antaranya ialah pentingnya kedudukan, fungsi, dan nilai PBI dan BI bagi keseluruhan hidup bangsa Indonesia.

Dalam rangka menggariskan kebijaksanaan perlindungan terhadap PBI, diperkirakan pokok-pokok pikiran berikut dapat dipertimbangkan:

1. Memberikan bobot yang menentukan terhadap prestasi (nilai) yang dicapai siswa dalam mata pelajaran BI. Kenaikan kelas atau penyelesaian

---

\* Sekarang berubah menjadi Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI). (Editor)

suatu tingkat pendidikan hendaknya banyak ditentukan oleh nilai BI yang dicapai.

2. Mensyaratkan ketrampilan ber-BI untuk mendapatkan sebuah jabatan, baik pada lembaga pemerintah maupun pada lembaga swasta.
3. Membuka kesempatan kerja yang lebih luas kepada mereka yang memiliki ketrampilan atau keahlian dalam BI dan PBI.
4. Memberikan penghargaan yang lebih baik kepada mereka yang berprestasi tinggi di bidang BI dan PBI.

### III. Penutup

Demikianlah lima perangkat pokok pikiran yang dapat disumbangkan untuk pembinaan PBI. Jumlah dan jenis pokok-pokok pikiran yang semacam tentunya bisa diperluas lagi oleh para peserta seminar ini. Demikian pula sistematikanya mungkin perlu diperbaiki sebagai akibat perbedaan pendekatan. Tetapi, betapa pun besarnya perbedaan materi pendapat, yang pasti sama di dalamnya ialah kesepakatan akan perlunya pembinaan PBI. Mudah-mudahan demikian adanya.

### DAFTAR PUSTAKA

1. Bloom, Benjamin S. 1956. *Taxonomy of Educational Objectives*. New York: McKay, David and Co.
2. Ewing, Wallace K. 1972. "The Mentalist Theory of Language Learning" dalam "Bahan Kuliah Penataran Dosen Bahasa Indonesia Seluruh Indonesia". Malang: IKIP Malang.
3. Finocchiaro, Mary. 1969. *Teaching English as a Second Language*. New York: Harper and Row.
4. Halliday et al. 1964. *The Linguistic Sciences and Language Teaching*. London: Longmans, Green and Co.
5. Hodge, Charleston. T. 1963. The Influence of linguistics on Language Teaching (dalam *Anthropological Linguistics*. 5,1, 1963).
6. Jakobovits, Leon. 1974. "Dimensionality of Compound-Coordinate Bilingualism" dalam "Bahan Kuliah Penataran Pengajaran Bahasa Dosen-dosen IKIP/FK Seluruh Indonesia di Malang, 1974." Malang: IKIP Malang.
7. Kroeber, A.L. 1958. *Anthropology Today*. Chicago: University of Chicago Press.
8. Lado, Robert. 1964. *Language Teaching: A Scientific Approach*. New York: Mc Graw-Hill.
9. Lembaga Bahasa Nasional. 1974. "Politik Bahasa Nasional Laporan Praseminar 29--31 Oktober 1974". Jakarta.
10. Oka, I Gusti Ngurah. 1974. "Kapita Selekta Problematik Bahasa dan Pengajaran Bahasa Indonesia". Malang: IKIP Malang.
11. ---. 1975. "Struktur Program dan Kurikulum Jurusan dan Sastra Indonesia FKSS IKIP". Kertas kerja pada Seminar Kurikulum IKIP 9--11 Januari 1975, Bandung.
12. Oller, Jr., John W. 1971. "Transformational Grammar, Pragmatics, and Language Teaching" dalam *English Teaching Forum*, IX.2. 1971.
13. Rivers, Wilga M. 1964. *The Psychologist and the Foreign Language Teacher*. Chicago: University of Chicago Press.

14. Soedijarto. 1974. "Pola Pendekatan dan Pedoman Penyusunan Tujuan-Tujuan Instruksional". Jakarta: BP3K.
15. Strevens, Peter. 1966. *Papers in Language and Language Teaching*. London: Oxford University Press.
16. Oemarjati, Boen S. 1974. "Studi Bahasa Indonesia Kurang Populer". Kertas Kerja untuk Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi 8-14 Nopember 1974, Tugu, Bogor.
17. Weinreich, Uriel. 1953. *Languages in Contact*. New York, Humanities Press.

**5**

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN  
BAHASA DAERAH**

**S.WOJOWASITO**

## Umum

Dalam wilayah Republik Indonesia sudah umum diketahui bahwa terdapat beratus-ratus bahasa daerah yang merupakan bahasa ibu bagi penduduk yang bersangkutan; misalnya, bahasa Aceh, Bugis, Batak (Angkola, Mandailing dsb.), Jawa, Sunda, Mongondow, Madura, dan Bali. Peta bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang dibuat oleh J. Gonda memberikan gambaran visual yang amat jelas. Bagi sebagian besar penduduk tidaklah sulit bertukar pikiran berkat adanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, sekalipun bahasa-bahasa daerah itu sangat berlainan sehingga mereka tidak akan dapat saling memahami andaikata masing-masing menggunakan bahasa daerahnya.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan bahasa resmi, memiliki daerah penggunaan yang jauh lebih luas daripada bahasa daerah, dan meliputi seluruh wilayah negara kita. Akibatnya ialah bahwa tiap daerah di samping menggunakan bahasa Indonesia bagi situasi-situasi tertentu, tetap menggunakan bahasa daerah, bahasa ibunya dalam situasi-situasi yang lain. Keadaan semacam itu kita temukan pula di tempat-tempat lain di dunia ini, yang di samping bahasa yang resmi ditetapkan oleh pemerintah sebagai bahasa negara masih memakai bahasa-bahasa setempat sebagai bahasa ibu, bahasa pergaulan sehari-hari bagi penduduk setempat dalam hubungan yang tidak formal. Sebagai contoh dapat saya berikan yang berikut:

Pada akhir tahun 1970 saya berada di negeri Belanda. Dengan menggunakan bahasa pergaulan umum Belanda Den Haag saya sedikit pun tidak menemukan kesulitan berkomunikasi. Ketika saya melancong ke Zuid Limburg, ke kota Heerlen, di stasiun Heerlen, di tempat menanti, saya duduk dekat sekelompok keluarga. Bila para anggota keluarga itu mengadakan percakapan, saya tidak dapat mengerti apa yang mereka bicarakan. Teman saya, orang Belanda, guru sekolah lanjutan atas di kota itu menjelaskan kepada saya bahwa yang mereka gunakan adalah bahasa setempat, bahasa lokal, bahasa daerah. Kesan saya ialah yang mereka pakai bahasa Belanda bukan, bahasa Jerman pun bukan. Saya perhatikan bahwa jika mereka itu berbicara dengan kondektur dalam gerbong, mereka beralih kepada bahasa yang dapat saya fahami, yaitu bahasa Belanda Den Haag. Menurut teman saya, juga dalam lingkungan sekolah yang digunakan ialah bahasa pergaulan umum (*de algemene omgangstaal*), oleh karena di situ terdapat anak-anak dari pelbagai tempat, di antaranya anak-anak Maluku.

Di Brussel (Belgia), juga pada akhir tahun 1970, pada kolokium AIMAV (*Association Internationale por la recherche et la diffusion des methodes audio-visuelles et structuro-globales*) yang menitikberatkan pembicaraan "*Aspects sociologiques du plurilinguisme*", saya diundang sebagai peserta — H. Baetens Beardsmore memberikan uraian menarik tentang penggunaan

pelbagai bahasa dalam satu *speech-community*, yaitu suatu situasi kebahasaan yang amat kompleks di kota Brussel.

Seperti kita ketahui, di Belgia ada dua bahasa resmi atau bahasa nasional, yaitu bahasa Vlaam (= Belanda) dan bahasa Waal (= Perancis). Yang pertama meliputi daerah utara dan yang kedua meliputi daerah selatan. Brussel (= Bruxelles) sebagai ibu kota negara Belgia menjadi tempat berpadu kedua bahasa nasional itu, dan kedua bahasa itu dipakai berdampingan secara resmi dengan nilai *prestige* yang sama. Di samping itu, terdapat bahasa setempat (= bahasa daerah), bukan Vlaam dan bukan Waal, melainkan campuran dari kedua-duanya, yang memiliki ciri khas sendiri, yang disebut bahasa Marolliens atau Bruxellois. Kelompok pengguna atau pemakai bahasa itu ialah penduduk daerah pusat kota, terutama kaum pekerja. Dalam kelompok itu, boleh dikatakan yang pandai berbahasa Perancis dengan baik hanya sedikit sekali. Jauh lebih besar ialah jumlah orang-orang yang menggunakan bahasa Perancis campuran, yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Vlaam. Bahasa Perancis campuran ini banyak menunjukkan interferensi dalam kalimat, kata-kata, aksen, intonasi dan fonologi dengan bahasa Vlaam (Belanda). Hal ini disebabkan oleh banyaknya pergaulan pemakainya dengan orang-orang yang berbahasa Vlaam, berkat koneksi kekeluargaan, bapak ibu yang berdwibahasa, ayah berbahasa Vlaam sedangkan ibu berbahasa Perancis atau sebaliknya, dan disebabkan oleh kontak dengan orang-orang yang menggunakan kedua bahasa itu

Kelompok orang yang berdwibahasa ini memperlihatkan variasi perbedaan-perbedaan halus yang banyak sekali, oleh karena taraf serta sifat kedwibahasaan yang menyangkut (atau ditemukan pada) individu, tergantung dari pelbagai faktor, sesuai dengan keadaan di rumah, pekerjaan atau tugas, profesi, taraf intelek, dan sikap emosional terhadap kedua bahasa itu secara terpisah dan dengan baik menurut ukuran standar, mereka itu sebagian besar dapat dimasukkan ke dalam dua kategori berikut:

1. Orang-orang yang merasa mampu dan yang mencoba memisahkan kedua bahasa itu kali ini menggunakan bahasa Vlaam dengan segala gejala interferensi, lain kali memakai bahasa Waal juga dengan segala gejala interferensi, sesuai dengan kondisi dan situasi.
2. Orang-orang yang mencampuradukkan kedua bahasa itu agaknya tanpa membeda-bedakannya; memulai percakapan atau pernyataan dengan sebuah kalimat dalam bahasa yang pertama dan mengakhirinya dengan kalimat dalam bahasa yang kedua; jadi, mereka itu beroperasi dengan apa yang oleh Einar Haugen disebut *switching*.

Dalam *switching* itu yang terpenting ialah mencatat bahwa dwibahasawan yang berbicara itu tidak asal saja beralih dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain, tetapi berbuat demikian dengan cara seperti kalau seorang ekabahasawan

berubah gaya dari kolokial ke formal atau ke teknis, seperti orang Jawa berubah dari krama ke ngoko atau sebaliknya.

Selanjutnya, dalam perpaduan antara bahasa Vlaam dan Waal di Brussel itu perlu diperhatikan fungsi dan kedudukan masing-masing bahasa sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Dan yang merupakan kenyataan ialah bahwa di daerah itu bahasa Perancis (= Waal) lebih umum serta lebih resmi dipakai daripada bahasa Belanda (= Vlaam). Orang-orang yang mencoba menggunakan kedua bahasa itu secara terpisah memakai bahasa Vlaam di rumah, sedang bahasa Waal untuk kontak-kontak dengan orang-orang yang tak dikenal dan dengan para penguasa. Jadi seperti bahasa Jawa yang menggunakan *aku, kowe* dalam keluarga, *kula, panjenengan, sampeyan* dengan orang yang tak dikenal.

John J. Gumperz menunjukkan bahwa pada peristiwa-peristiwa atau dalam situasi-situasi tertentu dwibahasawan lebih mudah berubah bahasa atau beralih kepada bahasa lain daripada berubah gaya dalam bahasa yang sama. Juga bagi orang-orang Jawa tertentu lebih mudah beralih kepada bahasa Indonesia daripada kepada ngoko atau krama. Para dwibahasawan Brussel lebih suka dan lebih mudah menggunakan bahasa Perancis jika berbicara dengan para pejabat daripada menggunakan bahasa Belanda (= Vlaam) yang baik mendekati standar, walaupun mereka menggunakan bahasa Belanda sehari-hari dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan penyelidikan H. Baerdsmore lebih lanjut, ternyata bahwa kebanyakan orang Vlaam di Brussel lebih suka menggunakan bahasa Perancis dalam percakapan dengan orang-orang yang mereka segani dan hormati daripada menggunakan bahasa Vlaam mereka yang standar. Rupa-rupanya hal tersebut menyangkut soal *prestige* yang lambat laun menyebabkan terdesaknya bahasa Vlaam oleh bahasa Perancis di Brussel itu. Pengalaman saya sendiri di Brussel ialah bahwa saya hanya dapat menggunakan bahasa Belanda dengan para sarjana atau orang-orang terpelajar, sedangkan di jalan-jalan terpaksa menggunakan bahasa Perancis. Dan pada waktu rombongan saya sebagai peserta Kongres Neerlandistik Internasional dari Gent meninjau gedung kota praja Brussel dengan lukisan-lukisannya yang historis itu penjelasan diberikan dalam bahasa Perancis.

Jadi jelas bahwa di ibu kota Belgia itu bahasa pergaulan lambat laun berpindah dari bahasa Vlaam ke bahasa Waal. Proses ini disebabkan oleh kenyataan bahwa:

- a. kelompok sosial pada tingkat rendah itu hanya dapat menggunakan dialek Belanda lokal, bukan standar, terpisah dari kelompok atasan yang menggunakan bahasa Belanda standar, sekalipun kelompok ini memiliki kesempatan untuk belajar bahasa Belanda standar melalui literatur, sedangkan bagi bahasa Perancis ada kelompok sosial atasan yang menggunakan bahasa Perancis standar.

- b. kecenderungan mengutamakan bahasa ini daripada bahasa itu lebih ditentukan oleh faktor-faktor sosial-kultural-politis-psikologis daripada oleh faktor-faktor kebahasaan.
- c. separatisme yang disebabkan oleh bahasa Vlaam dan Waal di waktu yang lampau, makin lama makin mengecil, karena konvergensi dan *overlapping* dalam kalimat, kata-kata dan bunyi di daerah perpaduan itu, sekalipun bahasa Belanda standar dan bahasa Perancis standar jauh berbeda.
- d. dalam situasi diglosia orang berbahasa Vlaam lokal lebih mudah beralih ke bahasa Perancis daripada ke bahasa Vlaam atau Belanda standar. Situasi semacam itu kita jumpai bila orang berdialek rakyat jelata Jawa-Tegal berbicara dalam situasi yang demikian. Ia lebih suka beralih ke bahasa Indonesia, walaupun mungkin bahasa pasaran, daripada ke krama Solo atau Jogya, atau arek Surabaya lebih suka beralih dari dialek Surabaya ke bahasa Indonesia daripada ke krama Solo atau Jogya.

Sebelum saya melanjutkan uraian ini lebih dahulu hendak saya bicarakan imbangan antara dua istilah yang saya gunakan di sini, yaitu *bilingualisme* dan *diglosia*.

Istilah "bilinguisme" (kedwibahasaan) kita jumpai lebih dahulu daripada istilah "diglosia". Dua kamus istilah linguistik yang saya miliki memberikan uraian sebagai berikut:

- a. "*Qualite d'un sujet ou d'une population qui se sert couramment de deux langues, sans aptitude marquee pour l'une plutot que pour l'autre*" (J. Marouzeau, 1951).  
(Kualitas seseorang atau penduduk yang menggunakan dua bahasa dengan lancar tanpa kemampuan lebih yang menonjol mengenai bahasa yang satu daripada bahasa yang lain).
- b. "*bilingualism, bilinguality*": *The quality or property of being bilingual.*  
"*bilingual*": (1) *With reference to a text, written in two languages.*  
2. *With reference to persons, speaking two languages customarily and with equal ease.* (Mario A. Pei and Frank Gaynor, 1954).

Dari dua contoh definisi tersebut di atas tampak terbatasnya pengertian yang terkandung di dalam istilah itu, yaitu hanya *menggambarkan adanya kemampuan menggunakan dua bahasa sama lancar* tanpa menyentuh peranannya masing-masing di dalam masyarakat, tanpa menguraikan bilamana, pada kesempatan-kesempatan apakah masing-masing bahasa itu dipakai. John Wolff memberikan ilustrasi yang jelas mengenai *bilingualisme* di Montreal (Kanada), yaitu apabila ada seseorang terpaksa menggunakan salah satu

bahasa dari dua bahasa yang dikuasai, bahasa Inggris atau bahasa Perancis, oleh karena yang diajak berbicara hanya menguasai salah satu dari dua bahasa tersebut, seperti halnya kalau saya terpaksa memakai bahasa Belanda oleh karena lawan saya berbicara adalah Belanda totok yang hanya dapat menggunakan bahasa Belanda, tidak faham bahasa Indonesia. Tetapi bilingualisme yang sungguh murni seperti dua contoh di atas itu jarang sekali bisa didapatkan; dengan kata lain, sedikit sekali frekuensinya bila dibandingkan dengan diglosia.

Dalam deskripsi bahasa bagi ahli bahasa deskriptif yang terpenting ialah menyelidiki dan melukiskan kedua bahasa yang bersangkutan itu ke dalam, artinya bagaimana pengaruh kedua bahasa itu timbal balik dalam kalimat, kata-kata dan bunyi, dan secara demikian dengan sendirinya mempersoalkan bagaimana wujud bahasa X, bagaimana wujud bahasa Y, bagaimana wujud bahasa XY, hasil perpaduan antara kedua bahasa. Deskripsi semacam ini sudah amat mengasyikkan serta menelan waktu hingga tidak sempat mempersoalkan kapan atau bilamana, dalam situasi apa, di mana, oleh siapa, dengan siapa bahasa-bahasa itu digunakan; dengan singkat, boleh dikatakan: peranan apa yang dijalankan oleh kedua bahasa itu masing-masing di dalam masyarakat yang bersangkutan (= *speech-community*). Untuk yang terakhir ini Charles A. Ferguson memperkenalkan istilah "*diglossia*". Ia menggunakan istilah itu (-mencontoh model Perancis "*diglossie*"-) untuk menunjuk suatu kenyataan mengenai penggunaan dua variasi atau lebih dari satu bahasa oleh satu orang, penggunaan suatu bahasa dengan tingkat atau prestise paling atas dan bahasa daerah atau dialek setempat atau jenis bahasa yang lain yang ditentukan oleh lingkungan sosial. Bagi pelbagai jenis bahasa yang digunakan oleh satu orang sesuai dengan konteks yang dialaminya itu kita dapat menggunakan istilah *kode* dengan pengertian yang agak lurus, tidak saja dimaksudkan bahasa atau logat, tetapi juga tingkat-tingkat bahasa seperti krama, ngoko, atau gaya bahasa seperti gaya telegram, gaya ceritera, dan gaya percakapan. Jadi tiap orang dapat menggunakan pelbagai kode jika situasi atau konteks memberikan kesempatan itu kepadanya.

Orang seperti saya dalam berbicara dengan ayah mertua yang sudah berumur 78 tahun, pensiunan PTT, tergolong orang terpelajar, pandai berbahasa Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kadang-kadang menggunakan 4 kode dalam konteks tertentu dengan cara "beralih" tanpa kesadaran, penuh keasyikan, misalnya kalau hal yang dibicarakan itu menyangkut hal sehari-hari dengan latar belakang sosiologis yang agak luas, seperti contoh berikut:

*S(aya): Kula nuwun!*

*A(yah mertua): E, Woyo! Ayo, mlebu, pinarak, lenggah ngendi, sing kepenak!  
Hla endi Enmie (isteri saya).*

- S : *Piyambakan kemawon, Ibumipun lare-lare taksih arisan, Kaliyan ngentos i bibari pun, kulo perlokaken sowan mriki! Nyuwun duka, radi sibuk, sampun dangu mboten sowan. Menawi mboten dipun perlokaken mampir, ngiras ngentos badhe methuk kanca estri arisan, kuwatos kedangon mboten kelampahan sowan mriki. Ibu kadospundi pak?*
- A : *O, iya ta, Ibumu ya wis lumayan, ana kemajuane. Saiki lagi sare. Pancen sarene akeh. Muga-muga enggal pinaringan waluya babar pisan. Hla kepriye sirane lan putu-putuku? Rak ya padha ora kurang sawiji apa, ta?*
- S : *Pangestunipun Bapak, sami sehat sadaya.*
- A : *Wah, ora suwe maneh siramu bakal menyang Jakarta, ya?*
- S : *Bapak kok priksa!*
- A : *Aku mentas iki maca nang Kompas, Senen tanggal pitulur (= 27) Januari. Siramu masuk daftar para calon kang bakal memberikan ceramah ing Seminar Politik Bahasa Nasional. Menurut koran iku sesorahmu bakal mengenai "Fungsi dan kedudukan bahasa daerah". Apa wae sing bakal kok rembug?"*
- S : *Wosipun ngaten, Pak. Het constateren van het feit dat de bahasa daerah bijvoorbeeld het Javaans nog altijd gebruikt wordt in het leven sehari-hari naast de bahasa Indonesia, lajeng bij welke gelehed worden de twee talen gebruikt door dezelfde persoon, en dan kesimpulan-kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari kenyataan itu, sasampunipun menika lajeng dipun olah inggih punika andamel pitakenan-pitakenan ingkang dipun cob i untuk menjawabnya, umpaminipun:*  
*manfaat apa yang dapat kita ambil dari kenyataan-kenyataan itu, kadosta:*  
*voor de persoonlijke ontwikkeling, pendidikan perseorangan; voor beide talen zelf, baik untuk bahasa Indonesia, maupun untuk bahasa daerah; bagaimana menyalurkan kemanfaatan itu dalam bidang pengajaran dan kesusastraan. Bab punika mboten namung ngengingi basa Jawi kemawon, nanging ugi bahasa daerah sanesipun, kadosdene basa Sundha, Madura, Bali, Minang, Bugis tuwin sanes-sanesipun, sebab het gebruik van Bahasa Indonesia naast die talen geeft dezelfde verschijnselen en problemen. Dalam bahasa Jawi wonten malih probleempun: Yen diajarake nang sekolahan sing endi, ngoko apra krama, yen ngoko apa terus ngoko tanpa krama, semanten ugi sawalikipun. Kula kinten umpaminipun ingkang dipun ajaraken ngoko menika benaderi de werkelijkheid, mendekati kenyataan, amargi ngoko kadamel kontak wiwit alit di dalam keluarga.*
- Iya, pancen ya ngono. Putu-putuku iku ora ana sing gelem basa (= krama) karo mbahe. Yen arep tak ajari, jawabe: nggo apa, mbah! Karo Bu Guru ya ora basa, nganggo bahasa Indonesia wae!*

Demikianlah cuplikan dari percakapan akrab dalam keluarga. Pada kesempatan lain ujaran ayah mertua itu menunjukkan gejala diglosia yang sama dengan ujaran saya di atas, ketika saya mendengarkan rekamannya.

Dalam suasana akrab yang demikian itu orang-ngin merasa "sreg" (= *comfortable?*) dalam menyatakan isi hatinya. Walaupun pembicara mampu menggunakan keempat bahasa itu secara dikotomis, yaitu secara terpisah sepenuhnya, dan memang dia akan berbuat demikian jika ada kesempatan, dalam konteks seperti di atas ia lebih "sreg" menggunakan bahasa gado-gado dengan jalan "beralih" dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Spontanitas, emosi dan kesiapan, yaitu kesiapan perbendaharaan kata dan kesiapan pola kalimat, merupakan faktor-faktor yang menguasai pembicara. Emosi, spontanitas dan kesiapan itu erat hubungannya dengan situasi wacana dan keinginan pembicara, misalnya oleh karena:

1. ingin pasang aksi;
2. ingin lucu, ingin ditertawakan;
3. ingin 'zakeljik' (*business like*)
4. ingin mengutip sesuatu;
5. tak dapat menguasai diri (marah, impulsif, tak sabar lagi dan sebagainya);
6. tak ada-kata-kata yang tepat atau yang dirasakan cocok dalam salah satu bahasa yang dikenal;
7. ingin akrab;
8. ingin tak begitu formal; dan
- 9 (ingin) berbicara dengan diri pribadi.

Gejala bahasa yang kita alami bersama sekarang merupakan sesuatu yang lazim terjadi di permukaan bumi ini. Ferguson menguraikan empat daerah terjadinya gejala bahasa semacam yang kita kemukakan sekarang di Indonesia, yaitu bahasa Arab di daerah Timur-Tengah, bahasa Jerman di Swiss yang dalam pertumbuhannya lepas dari pusat standarisasi di Jerman, bahasa Perancis di Haiti tempat terdapatnya Kreole Haiti, hasil kreolisasi atau degenerasi bahasa Perancis Pidgin, yaitu bahasa Perancis Pasar, campuran antara bahasa Perancis dan bahasa budak-budak belian yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Haiti yang keturunannya sekarang memerintah di daerah tersebut.

Dalam empat daerah itu, yaitu Timur-Tengah, Swiss, Haiti dan Yunani, yang memegang peranan sebagai bahasa *high*, *superposed*, *defining*, yang diprioritaskan, ditempatkan paling atas, yang menentukan, ialah bahasa Arab yang dalam beberapa kasus, erat berhubungan dengan bahasa Kitab Suci Quran di Timur Tengah, bahasa Jerman Standar (*Schriftsprache*) di Swiss, bahasa Perancis Kitab Injil di Haiti, dan bahasa Yunani yang dalam beberapa hal erat pula hubungannya dengan bahasa Kitab Injil di Yunani sendiri.

Bahasa-bahasa *High* tersebut adalah bahasa-bahasa yang digunakan dalam lingkungan, kontak dan suasana tertentu berdampingan dengan bahasa daerah, yang disebut bahasa *Low*, yang dipengaruhi oleh bahasa *High*, dan yang memiliki kesempatan pemakaiannya pula. Istilah *Low* juga istilah Ferguson. Kesempatan pemakaiannya masing-masing mengenai daerah yang diselidiki oleh Ferguson diperincinya sebagai berikut:

*High Language*, bahasa H, digunakan dalam:

- khotbah di mesjid atau di gereja;
- pidato di Dewan Perwakilan Rakyat, pidato politik;
- ceramah universitas, perguruan tinggi, akademi;
- surat perseorangan;
- siaran berita radio;
- editorial surat kabar;

- berita yang berwujud ceritera, judul gambar; dan
- puisi.

*Low Language*, bahasa L, digunakan dalam:

- perintah kepada pelayan, penjaga, pekerja, dan juru tulis;
- Sandiwara dengan tema hidup kekeluargaan (biasanya disponsori oleh suatu usaha dagang);
- judul karikatur politik; dan
- sastra rakyat.

Distribusi Ferguson yang tidak begitu jelas itu jika dipraktekkan kepada penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa H (*superposed, defining*), kiranya dapat berwujud sebagai berikut:

1. Bahasa Indonesia digunakan dalam khotbah di mesjid dan di gereja, terutama di kota; di desa mungkin digunakan bahasa daerah, oleh karena pendidikan dan pelajaran bahasa Indonesia belum intensif masuk ke situ.
2. Bahasa Indonesia digunakan dalam pidato resmi di Dewan Perwakilan Rakyat tempat-tempat lain, pidato politik umum mungkin di kota; di desa dan di tempat-tempat terpencil dari kota mungkin dalam bahasa daerah.
3. Bahasa Indonesia digunakan dalam ceramah dan kuliah di universitas, perguruan tinggi, dan akademi; bahasa pengantar di tingkat atas sekolah dasar, SMP dan SMA, dan di tingkat permulaan sekolah dasar kota; di desa dan di tempat terpencil dari kota masih digunakan bahasa daerah.
4. Surat perseorangan mungkin:
  - a. dalam bahasa Indonesia,
  - b. dalam bahasa daerah, atau
  - c. diglosia.

Bagi ketiga kemungkinan itu mudah dicarikan contoh-contohnya dan di antaranya ada yang sudah masuk daftar observasi yang saya uraikan dalam halaman berikut.

5. Siaran berita radio dan televisi dari Jakarta dalam siaran daerah, di samping bahasa Indonesia, masih digunakan pula bahasa daerah, walaupun terbatas.
6. Bahasa Indonesia digunakan dalam harian.
7. Bahasa Indonesia digunakan dalam karangan-karangan yang tergolong kesusastraan.
8. Bahasa Indonesia digunakan dalam hubungan resmi, baik tertulis maupun secara lisan.

Bahasa daerah digunakan dalam:

1. perintah kepada dan bercakap-cakap dengan pelayan, penjaga, pekerja

kasar (seperti tukang kebun dan tukang rumput), penjual sayur, daging, kentang, beras dan sebagainya;

2. percakapan rutin dan akrab antarpegawai (dalam apotik, di kantor, lebih-lebih kantor desa dan kecamatan);
3. percakapan serta surat-menyurat dalam keluarga, dengan handai taulan, dengan teman seprofesi, sekerja di luar urusan kantor dan usaha;
4. sandiwara dengan tema kehidupan di daerah, dengan tema klasik seperti ludruk, dagelan Mataram, lenong Jakarta, dan wayang;
5. majalah dan berkala daerah, misalnya *Djoko Lodang*, dan *Penyebar Semangat*.
6. Sastra rakyat dengan tema kehidupan daerah dan tema ceritera rakyat.

Perincian Ferguson yang didasarkan atas observasi daerah-daerah yang diselidikinya, dan apa yang saya simpulkan mengenai bahasa Indonesia serta bahasa-bahasa daerah itu hanya sekedar memberikan pandangan secara umum. Keadaan yang sesungguhnya adalah lebih kompleks, lebih ruwet. Misalnya, menurut Ferguson dalam dunia Arab: ceramah atau kuliah universitas diberikan dalam kode H, tetapi latihan-latihan, penjelasan, rapat-rapat seksi dapat dilakukan dalam bahasa L terutama mengenai ilmu pengetahuan alam sebagai imbalan terhadap pengetahuan *humanities*. Dan walaupun di sekolah menengah dalam beberapa negara Arab para guru dilarang menggunakan bahasa L, sebagian besar waktu mereka digunakan untuk memberikan penjelasan dengan bahasa L mengenai isi keadaan buku-buku pelajaran yang tertulis dalam bahasa H. Beberapa contoh lain yang diberikan oleh Ferguson dapat saya ulang di sini.

Di Bagdad orang-orang yang beragama Kristen berbicara dengan bahasa Arab Kristen, yaitu dialek setempat bila mereka berada dalam suasana kekeluargaan atau dengan teman-teman akrab, tetapi mereka menggunakan bahasa Arab Muslim, bila mereka berbicara dengan orang-orang atau dalam kelompok orang-orang yang tidak berasal dari satu dialek atau bahasa daerah. Mengenai bahasa Persia, keadaannya sama saja, yaitu bahwa kebanyakan pembicara menggunakan bahasa lokal atau daerah jika berbicara dengan anggota keluarga atau dengan teman, sedangkan dengan orang-orang yang berbahasa daerah lain atau pada kesempatan-kesempatan resmi mereka menggunakan bahasa standar.

Juga mengenai penggunaan H atau L dalam puisi dan sastra rakyat, keadaan yang sesungguhnya ialah bahwa sebagian ditulis dalam H dan sebagian ditulis dalam L. Penilaian masyarakat terhadap kedua-duanya berlainan; misalnya, di dalam daerah Arab yang disebut *real poetry* hanya tertulis dalam H, sedangkan dalam daerah Yunani, puisi dalam L merupakan produksi terbanyak sedangkan puisi dalam H dianggap kurang wajar.

Faktor yang amat berpengaruh dalam penggunaan kode H atau L itu adalah faktor prestise yang menurut Poerwadarminta, St. Moh. Zain dan Wojowasito mengandung pengertian: *pengaruh, reputasi, kemuliaan, kehormatan*.

Perasaan yang menyangkut prestise ini menyebabkan orang hanya menganggap kode H yang terbaik, sebagai ukuran tertinggi bagi kedudukan sosial seseorang, dan sebagai satu-satunya bahasa yang ada, dan sekalipun kode L dikuasainya serta dipakainya sehari-hari, dianggapnya seolah-olah tidak ada. Juga walaupun kenyataan dan realitas bahasa H itu tidak dirasakan begitu kuat, pada umumnya ada kepercayaan bahwa bagaimana pun juga bahasa H lebih indah, lebih mampu dan lebih logis guna menyatakan pikiran-pikiran penting.

Uraian Ferguson didasarkan atas daerah-daerah perkembangan yang sudah lama, bahkan ada yang sudah berabad-abad. Jika kita alihkan perhatian kita kepada Indonesia, kita ketahui bahwa gejala yang sama timbul dan tumbuh dengan pesat sejak Sumpah Pemuda 1928, dan lebih cepat lagi sejak 17 Agustus 1945, mulai dari saat bahasa Indonesia ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai bahasa nasional, bahasa resmi.

#### **Kenyataan dan Persoalan yang Kita Hadapi**

Sejak bahasa Indonesia ditetapkan di dalam UUD 1945, sebagai bahasa negara, bahasa resmi, bahasa nasional pada 17 Agustus 1945, ia menjadi *defining language* yang semula adalah bahasa Melayu, yang beberapa tahun kemudian di Malaysia menjadi bahasa nasional, dengan nama *bahasa Malaysia*.

Bahasa Melayu tidak begitu saja naik kedudukannya menjadi bahasa H. Latar belakang historisnya telah membawanya ke arah kedudukan dan fungsi tersebut.

Sudah menjadi kenyataan bahwa bahasa Melayu, yang dalam zaman kolonial berfungsi sebagai *lingua franca*, menjadi bahasa pengantar antarpulau dan antarsuku dalam kehidupan sehari-hari di toko dan di pasar. Sifat kentara kode ini ialah sedikitnya norma tata bahasa dan banyaknya kata-kata dari bahasa setempat. Sekarang pun Melayu Pasar tetap hidup di kalangan rakyat yang memerlukan bahasa yang praktis. Boleh dikata ini tergolong kepada bahasa yang termasuk golongan L. Ternyata juga dari buku karangan J. Den Hollander, *lingua franca* ini sudah dipakai pula untuk hubungan antar para kepala daerah, termasuk para bupati dan pengusaha Belanda, yaitu residen dan gubernur pada pertengahan abad ke-19, sekitar tahun 1850. Di samping itu, kita kenal bahasa hikayat, atau boleh kita sebut bahasa Melayu klasik, yang dalam zaman kolonial diajarkan sebagai bahasa Melayu Tinggi, *Hoog Maleis*, dengan tata bahasa yang dikarang oleh J. Kats, pada sekolah menengah mulai dari tingkat I secara fakultatif atau pilihan.

Perkenalan dengan bahasa hikayat amat dimajukan oleh Balai Pustaka yang juga menyebarkan ceritera-ceritera modern dalam bahasa Melayu Modern, yang merupakan norma bahasa yang baik. Di samping itu, sangat penting dan amat menentukan pula peranan Pujangga Baru bagi bahasa Indonesia.

Walaupun ruang lingkup bahasa Indonesia masih amat terbatas, yaitu hanya terutama meliputi bidang sastra dan bidang politik (saya masih ingat dan melihat sendiri Husni Thamrin berbicara dalam bahasa Indonesia di Volksraad), pengembangannya yang meliputi lapangan-lapangan lain hanya tergantung dari hilangnya kekangan dan pembatasan yang ada dalam suasana kolonial. Pendudukan Jepang adalah berkah terselubung bagi bahasa Indonesia, oleh karena sejak itu bahasa Indonesia menggantikan bahasa Belanda di sekolah-sekolah, dan Balai Pustaka bekerja giat untuk melengkapi sekolah-sekolah dengan buku-buku pelajaran dalam bahasa Indonesia, yang sebelum itu ditulis dalam bahasa Belanda. Dengan demikian meluaslah ruang lingkup bahasa Indonesia. Perluasan itu berjalan terus dan makin pesat sejak ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa negara, yang pemakaiannya meliputi segala bidang kemasyarakatan yang diperlukan bagi pembentukan manusia Indonesia baru untuk dapat menempati segala jabatan mulai dari tingkatan terendah hingga yang tertinggi. Tidak ada satu bahasa daerah pun yang akan dapat menyainginya sekalipun bahasa daerah itu sudah memiliki sejarah sastra yang berabad-abad seperti bahasa Jawa, oleh karena bahasa yang terakhir ini tidak memiliki posisi *defining*. Para cendekiawan kita harus menguasai bahasa Indonesia supaya sampai kepada taraf pengetahuan yang tertinggi, akademis atau universiter dalam semua bidang kemasyarakatan. Semua profesi yang memerlukan pengetahuan teknis, yang amat menentukan mata pencaharian seseorang, hampir seluruhnya harus dicapai dengan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia betul-betul mempunyai posisi H. Tetapi bahasa Jawa dengan posisi sebagai bahasa L dapat mengalihkan segala kekayaan sastranya yang diakui oleh seluruh dunia tinggi nilai-nilai kebudayaannya itu kepada bahasa Indonesia dengan konsekuensi kebahasaan bagi bahasa Indonesia, misalnya disebabkan oleh adanya istilah-istilah yang khas Jawa. Hal yang sama dapat berlaku pula bagi bahasa-bahasa daerah yang lain.

Judul kertas kerja ini tidak memaksa saya untuk menguraikan perubahan-perubahan dalam bahasa Melayu sendiri (struktur, sintaksis, leksikon, dan fonologi) sebagai akibat pertumbuhannya dari bahasa daerah ke bahasa resmi tetapi lebih membuat saya cenderung kepada pembicaraan aspek-aspek sosiologinya, terutama fungsi atau kedudukannya yang dalamimbangan dengan bahasa Indonesia sekarang ini menempatkannya pada posisi kode L.

Dalam menguraikan fungsi dan kedudukan bahasa daerah lebih lanjut terpaksa saya membatasi diri kepada bahasa Jawa. Tidak cukup waktunya dan

terlalu kecil ruangnya untuk membicarakannya secara terperinci dari bahasa Jawa ke bahasa daerah yang lain. Dan andaikata kesempatan itu diberikan pula, tugas itu masih terlampau berat bagi seseorang, ibarat seekor semut yang harus mengangkat segumpal gula batu. Namun saya beranggapan bahwa apa yang terjadi dalam bahasa Jawa itu tidak jauh berbeda dari apa yang terjadi di tempat lain, dalam bahasa daerah yang lain, terutama yang menyangkut dorongan sosial dalam masyarakat yang menyebabkan penggunaan diglosia.

✓ Dalam membicarakan fungsi dan kedudukan bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, kita tidak dapat meninjaunya sebagai bahasa yang berdaulat, berdiri sendiri atau berfungsi sendiri dalam masyarakat, tetapi harus memperhatikan imbangannya dengan bahasa Indonesia, bahasa negara yang memiliki posisi H, yang sehari-hari berdampingan dengan bahasa daerah tersebut. Frekuensi pemakaian kedua-duanya sama kuat dan stabil, dan akan berlangsung sepanjang abad, selama Republik Indonesia tetap ada di permukaan bumi. Bahasa Indonesia akan tetap berkuasa dalam bidang-bidang yang resmi, dan bahasa daerah akan menguasai sepanjang zaman lapangan kehidupan sehari-hari baik di tempat umum (pasar, toko) maupun dalam kehidupan keluarga dan di antara teman-teman. Pertumbuhan dan perubahan yang ada pada bahasa Indonesia lebih mudah direncanakan, diatur dalam perencanaan bahasa oleh karena di situ kita dapat menentukan norma-norma kebahasaan mana yang kita anggap baik.

Penyebarluasannya amat dipermudah oleh karena:

- a. bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dari sekolah dasar hingga universitas, tidak saja dalam bentuk mata pelajaran khas bahasa Indonesia, tetapi juga ditampilkan dalam mata pelajaran atau mata kuliah yang lain, seperti sejarah, civics, kimia, ilmu alam dan biologi.
- b. bahasa Indonesia digunakan sebagai alat berkomunikasi secara umum dan resmi antarpegawai pemerintah, antarusahawan, antarsuku, untuk hubungan internasional dan sebagainya.

Bahasa daerah yang menguasai kehidupan sehari-hari itu baik dalam lingkungan keluarga dan teman-teman akrab, maupun di tempat-tempat umum, coraknya beraneka: di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, bahasanya tidak akan banyak dipengaruhi oleh bahasa Indonesia, tetapi di kota-kota tempat pergaulan intensif antarkelompok sosial yang beraneka, bahasanya tentu menunjukkan banyak interferensi dengan bahasa Indonesia dan bahasa lain-lain yang kebetulan dikenal, misalnya bahasa Cina, terutama di kalangan Tionghoa-Jawa, bahasa Belanda di kalangan intelektual tua, bahasa Inggris di kalangan intelektual muda.

Dipandang dari segi kebahasaan, khususnya dari segi kalimat, kata-kata dan bunyi, mungkin bahasa setempat atau kode L itu merupakan bahasa

"gado-gado", bahasa murni daerah (misalnya bahasa Jawa) bukan, bahasa Indonesia pun bukan, penuh dengan beraneka pinjaman dari bahasa lain, tetapi harus kita perhatikan kenyataan bahwa diglosia itu sendiri adalah stabil dan dapat berlangsung berabad-abad bahkan bisa lebih dari seribu tahun, menurut Ferguson, selama *defining languages* itu tetap ada dan berwibawa. Ketegangan-ketegangan yang timbul dalam situasi komunikasi (atau konversasi dan korespondensi) yang menyebabkan timbulnya diglosia mungkin diselesaikan dengan menggunakan bentuk bahasa yang relatif sulit dikodifikasi, yang tidak permanen, tidak stabil, dan bentuk-bentuk bahasa yang lain, yang menurut ukuran bahasa yang murni, bukan bahasa. Jenis bahasa yang berpengaruh bisa dua, bisa lebih. Di Malang, misalnya, bahasa yang berpengaruh dalam diglosia ialah bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Cina. Frekuensi pemakaiannya sulit ditentukan dan tergantung dari situasi bicara yang amat beraneka.

Mengenai bahasa Jawa, yang terutama menempati posisi L ialah bahasa Ngoko dan Krama madya, bukan Krama halus dengan perpindahan ke bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Jumlah jenis bahasa yang dipakai perpindahan bahasa tergantung dari jumlah bahasa yang dikenal oleh pembicara. Kadang-kadang kesan saya ialah bahwa bahasa Indonesia penuh dengan pengaruh bahasa Jawa, Belanda, Inggris, atau sebaliknya bahasa Jawa Ngoko bercampur dengan krama, Indonesia, Belanda dan Inggris. Beberapa catatan observasi dapat saya berikan sebagai berikut:

1. Di bedak (= kedai) pinggir pasar besar Malang, tempat alat-alat radio:
  - a. pelayannya masih muda; jika pembelinya muda yang digunakan Jawa Ngoko atau bahasa Indonesia, kedua-duanya penuh perpindahan ditambah dengan nama-nama teknis;
  - b. jika pembeli sudah tua, pelayan menggunakan Krama madya sedangkan pembeli menggunakan Jawa Ngoko, kedua bahasa penuh dengan kata-kata Indonesia atau kata-kata asing (= alat-alat teknis) yang diindonesiakan.
2. Di kantor pos cabang utara Malang:
  - a. antara saya dan pelayan terdapat penggunaan krama-madya dengan perpindahan ke bahasa Indonesia;
  - b. pengunjung tua saya lihat menggunakan Jawa Ngoko sedang pelayan menggunakan Jawa Krama madya. Contoh:
 

Pelayan : *Punika perangkonipun, Pak?*  
 Pengunjung : *Duwite kurang pira?*
3. Di Apotik Andhika, Malang, percakapan antara atasan dan bawahan mengenai soal-soal rutin yang saya dengarkan berlangsung dalam bahasa Jawa-Ngoko (:atasan) dan Krama madya (:bawahan).

4. Percakapan antara tamu istri saya (: ibu Syafiuddin), isteri saya dan saya menggunakan bahasa Krama halus, diselingi bahasa Belanda dan bahasa Indonesia.
5. Percakapan saya dengan ayah mertua menggunakan bahasa krama halus bercampur dengan bahasa Indonesia dan Belanda. Dalam percakapan itu bahasa saya sudah saya uraikan di muka. Di samping itu, saya masih menyimpan rekaman suara ayah mertua itu pada kesempatan lain, dan bahasa yang digunakan ialah Jawa Ngoko (kepada saya) penuh dengan perpindahan ke bahasa Indonesia dan bahasa Belanda.
6. Pada kesempatan upacara perkawinan, ada dua orang yang diminta menyambut. Yang satu, orang Jawa, berumur kira-kira 45 tahun, pejabat pada pemerintahan dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia tanpa teks, dengan perpindahan ke bahasa Jawa Ngoko yang ditujukan kepada kedua mempelai, yang masih anak kemenakannya sendiri. Penyambut kedua ialah seorang pria berumur 67 tahun dan menggunakan bahasa Jawa krama halus karena ia berterus terang tidak menguasai bahasa Indonesia.
7. Saya perhatikan bahwa semua orang Cina pemegang toko yang saya ajak berbicara selalu menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu Pasar atau Jawa Ngoko disela dengan kata-kata hormat (= *deference*) seperti: *sanget nuwun* (= terima kasih), *Penjenengan*, *sampean*. Jika mereka tahu bahasa Belanda, perpindahan ke kata-kata atau kalimat Belanda sudah menjadi kebiasaan.
8. Seorang letnan II Angkatan Laut, anak kemenakan menantu saya, berbahasa krama halus dengan saya, walaupun saya menggunakan Jawa Ngoko. Bicaranya beralih ke bahasa Indonesia jika ia hendak menerangkan sesuatu tentang Angkatan Laut.
9. Saya berkunjung dan bercakap-cakap dengan seorang teman suami isteri pada pagi hari. Maka datang seorang pengantar surat pos menyampaikan surat kepada nyonya rumah sambil bertanya dengan krama halus:
  - *Bu, ndherek pitaken Bu! Dalemipun Pak Baskoro menika ingkang pundi? Jl. Semarang No. 7.*
  - *O, menika, kalih griya saking ngriki, ingkang wonten garase ngajengipun.*
 Di sini pengantar surat pos amat sopan (Jawa: *andhap asor*) yang dijawab oleh nyonya rumah dengan amat hormat pula. Tampak di situ soal prestise amat berpengaruh.
10. Saya sendiri dalam surat-menyurat dengan seorang kolonel dari suku Jawa di Jakarta, menulis dalam bahasa krama halus, karena membicara-

kan hal yang menyangkut keakraban, kekeluargaan tetapi tetap penuh hormat.

11. Di Balai Bahasa IKIP Malang saya memperhatikan dengan teliti percakapan antara seorang ahli bahasa, seorang pegawai administrasi, seorang pegawai bagian peralatan, dan seorang asisten laboratorium bahasa. Bahasa yang digunakan orang berempat itu merupakan campuran antara bahasa Inggris, Belanda, Indonesia, Jawa Ngoko, Jawa krama dengan penuh keasyikan, tanpa kesadaran. Kata-kata atau kelompok kata seperti berikut muncul dalam percakapan mereka:

<i>kedah membeli satu set</i>	'harus membeli satu pasang'
<i>nilainipun pinten</i>	'berapa nilainya'
<i>di sekrep</i>	'dihilangkan, dihapus'
<i>sampun teken</i>	'sudah menandatangani'
<i>di leb</i>	'di laboratorium'
<i>dipun etang riyin kaceknyo</i>	'dihitung dahulu selisihnya'

12. Seorang brigadir jenderal (kemenakan saya sendiri) dalam kekeluargaan tetap menggunakan bahasa Jawa krama madya kepada saya, walaupun saya menggunakan ngoko kepadanya, tetapi disertai dengan kata *deference* seperti: *slirane*, *dhahar*, dan *sarean*. Kami beralih ke bahasa Indonesia yang dicampur dengan kata-kata atau kalimat Belanda, Inggris, jika obyek percakapan menyangkut soal-soal umum, nasional, dan internasional.
13. Dalam keluarga saya sendiri, percakapan antara ibu, ayah dan anak dilakukan dalam bahasa ngoko yang dicampur dengan bahasa Indonesia, terutama kalau yang dibicarakan itu soal-soal sekolah, dan tidak pernah dilakukan dalam krama. Dengan teman-temannya, anak-anak saya menggunakan bahasa ngoko, juga kepada tukang berjualan, dan kepada orang atau tamu asing mereka menggunakan bahasa Indonesia.
14. Ceramah ilmu ketuhanan (= kebatinan) tentang tinjauan hidup terutama menggunakan bahasa krama, tetapi kata-kata ngoko dan bahasa Indonesia banyak disisipkan. Yang memberikan ceramah seorang yang sudah pensiun, berumur kira-kira antara 65 dan 70 tahun. Ternyata dari para pendengar banyak pertanyaan tentang kata-kata Jawa yang tidak difahami, walaupun orang yang bertanya itu orang Jawa juga. Setelah diberi penjelasan dengan ngoko dan bahasa Indonesia, barulah soalnya menjadi jelas. Ngoko terutama digunakan kalau mengutip bagian buku yang dibicarakan, dan di samping dengan bahasa Indonesia bagi penegasan, dan kadang-kadang pula digunakan kata Belanda *dus* sebagai penegasan.

Demikianlah sekedar fakta-fakta yang saya kumpulkan mengenai bahasa

campuran yang hidup setempat, yaitu bahasa L. Apakah pada suatu kasus kita berhadapan dengan diglosia atau pada kasus lain dengan bilingualisme, hal itu tergantung dari dorongan-dorongan sosial yang mengelilingi pembicara. Tetapi yang jelas ialah dalam pergaulan umum sehari-hari tak formal itu pun, yang memberikan kesempatan pemakaian bahasa daerah, pengaruh bahasa H, bahasa Indonesia, kentara sekali. Hal ini dapat kita lihat pula misalnya dalam *Djaka Lodang*, mingguan berbahasa Jawa Ngoko di Jogja, yang seluruhnya penuh dengan kata-kata dari bahasa Indonesia. Dalam dua rubrik, *Djaka Lodang* menggunakan bahasa krama (*Retuning bawana* = Pergolakan Dunia dan *Kebatosan*, *Asal-usuling manungsa* = Kebatinan, Asal-mulanya manusia), dan selebihnya digunakan ngoko. Jadi kalau dibandingkan dengan yang diuraikan dalam ngoko, imbangannya kira-kira antara 5% dan 95%. Hal ini menyangkut penggunaannya. Mengenai bahasa Jawa sendiri, menurut penyelidikan Elinor Clark Horne, memang untuk ngoko ada puluhan ribu kata; ada kata-kata untuk tiap sesuatu, tetapi seluruhnya (yang dipakai dalam kontak sehari-hari) hanya ada 850 kata krama termasuk:

<i>dipun</i>	untuk	<i>di</i>
<i>ipun</i>	untuk	<i>e</i>
<i>aken</i>	untuk	<i>ake,</i>

sedangkan untuk madya hanya ada 35 kata yang khas dan biasanya merupakan kombinasi antara krama dan ngoko, yaitu kata-kata krama (jika ada) disambung dengan afiks ngoko.

Perlu kita perhatikan bahwa dalam bahasa L(ow) itu pun orang mencoba sedapat-dapatnya pula menggunakan bahasa yang murni dan baik, misalnya bahasa krama, kalau yang bersangkutan ingin menunjukkan prestise, bahwa ia tahu sopan-santun, walaupun akrab (lihat observasi No. 9 dan 10).

Biasanya bahasa tulis lebih teratur daripada bahasa lisan. Begitu pula bahasa mingguan *Djaka Lodang*, walaupun secara keseluruhan tidak dapat mengingkari pengaruh bahasa Indonesia seperti telah diuraikan di atas, sekalipun rubrik demi rubrik pengaruh itu agak berbeda.

Beberapa faktor yang menyebabkan mengapa bahasa Indonesia mudah sekali menyusup ke dalam bahasa Jawa ialah sebagai berikut:

- a. Bagi kebanyakan orang Jawa tidaklah sulit untuk belajar bahasa Indonesia berkat adanya persamaan yang begitu besar dalam bentuk, kalimat dan bunyinya. Bagi kebanyakan orang di kalangan rakyat jelata belajar bahasa merupakan usaha yang lebih sulit oleh karena kata-kata krama itu biasanya berbeda sekali bentuknya, misalnya:

<i>туру</i>	—	<i>sare, tilem</i>
<i>mangan</i>	—	<i>dahar, neda</i>
<i>mlaku</i>	—	<i>lumampah, mlampah, tindak</i>

Mereka lebih suka dan lebih mudah belajar bahasa Indonesianya yaitu *tidur*, *makan*, dan *(ber)jalan*, yaitu kata-kata yang netral tanpa memikirkan tinggi-rendah pangkat atau kedudukan pribadi yang bersangkutan. Dan kita ketahui bahwa dalam kehidupan bahasa kata-kata yang berfrekuensi tinggi itulah yang akan menang. Dalam hal ini orang lebih sering mendengar kata-kata Indonesianya daripada kramanya.

Fakta itu telah dilihat dan diuraikan pula oleh Supomo dalam kertas kerjanya pada *First International Conference on Comparative Austro-nesia Linguistics*, 27 Januari 1974. Oleh karena Supomo sendiri tak dapat hadir, kertas kerja itu disajikan oleh John Wolff sebab apa yang dibicarakan dalam kertas kerja itu merupakan hasil penyelidikan mereka berdua di Yogya. Saya sendiri berdasarkan pengalaman pribadi merasa tidak ada habisnya jumlah kata bahasa Jawa untuk dipelajari, dan jika saya membaca Djaka Lodang selalu banyak kata-kata Jawa yang tidak saya fahami, mungkin oleh karena dialek, walaupun saya telah lama belajar bahasa ibu saya sendiri itu dengan menggunakan kamus.

- b. Makin intensif penyebaran bahasa Indonesia, makin meningkat arti dan prestise bahasa Indonesia dalam kehidupan nasional, dalam hubungan internasional (= seolah karena hubungannya dengan Malaysia dan amat populernya di Australia), dan dalam kontak formal, makin menarik pula belajar bahasa Indonesia. Tambahan lagi belajar bahasa Indonesia amat dipermudah oleh siaran radio, televisi, sekolah dan sebagainya.
- c. Sifat bahasa Indonesia yang amat demokratis, yang tidak mengenal derajat rendah, derajat tinggi pembicara seperti ngoko, krama madya, krama halus, krama inggil yang mencerminkan suasana feodal dalam bahasa Jawa.

Berhubung dengan ketiga faktor tersebut di atas maka bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam daerah sosial bahasa Jawa, yaitu:

1. penggunaannya dalam hubungan-hubungan yang resmi sebagai bahasa H (superposed) di sekolah-sekolah (dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi) dalam pertemuan-pertemuan, rapat-rapat resmi, surat-menyurat resmi, dalam media massa seperti harian-harian, radio pemerintah dan amatir, televisi, dan dalam hubungan antarsuku.
2. penggunaannya dalam hubungan-hubungan yang tidak resmi di antara teman-teman, di antara anggota-anggota keluarga di samping Jawa ngoko. Golongan muda suka beralih dari ngoko ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, oleh karena bahasa Indonesia dianggap netral, tetapi tidak mengurangi perasaan akrab.

Betapa terbatasnya ruang lingkup bahasa daerah, di sini bahasa Jawa terutama ngoko, yang hanya meliputi kehidupan sehari-hari dalam pergaulan umum tak-formal-lisan di tempat-tempat umum seperti di toko, di pasar, dalam hubungan akrab antarteman, antaranggota keluarga, secara tulis terbatas dalam majalah, berkala dan buku-buku ceritera, namun frekuensi pemakaiannya amat tinggi, tak kalah dengan bahasa Indonesia dalam ruang lingkup yang satu itu. Dan pula mengingat kenyataan bahwa bahasa ngoko adalah bahasa pertama yang mula-mula dikenal dan dipakai oleh kebanyakan anak di daerah (bahasa Jawa), maka ada baiknya bila bahasa ini di sekolah diperhatikan sebagai mata pelajaran, sebagai bahasa yang diolah secara teratur, supaya anak-anak tahu imbangannya dengan bahasa Indonesia, yang amat membantu pengajaran bahasa Indonesia pada tingkat permulaan di sekolah dasar. Saya katakan "diolah secara teratur", oleh karena bahasa itu biasanya sudah dikuasai dan digunakan oleh para murid. Di samping itu, perlu pula anak didik diberi kesempatan menikmati sastra yang terdiri dari ceritera-ceritera hidup di kalangan masyarakat, yang menarik sesuai dengan perkembangan jiwa anak, agar supaya kekayaan bahasa ibunya yang masih hidup dan digunakan sehari-hari tersalur, teratur baik, di samping bahasa Indonesia. dan Biasanya apa yang dibaca oleh anak pada waktu masih di sekolah dasar itu kesannya amat mendalam dan tidak mudah dilupakannya. Misalnya hingga sekarang saya masih tetap ingat buku-buku yang saya baca waktu masih di HIS. Buku-buku itu saya pinjam dari perpustakaan sekolah dasar R.A. Kartini dan dari Sekolah Angka II, dengan membayar sewa 1 sen selama satu minggu. Di antaranya ialah: *Saking pada Dumugi Mulyia, Liman Seta Tata Jalma, Lelampahanipun Sida, dan Si Djarot*. Bagaimana cara pelaksanaannya itu nanti dalam kurikulum sekolah dasar agaknya akan melampaui batas untuk dibicarakan dalam kertas kerja ini. Tetapi beberapa buah pikiran dapat saya kemukakan di sini:

- a. Pada tingkat-tingkat atau kelas-kelas pertama semua penjelasan mata pelajaran diberikan dalam bahasa daerah (kalau daerah Jawa, bahasa ngoko) walaupun buku pelajaran tertulis dalam bahasa H, bahasa Indonesia, jadi seperti halnya di dunia Arab menurut uraian Ferguson. Bahasa Indonesia diperkenalkan sebagai salah satu mata pelajaran. Saya tidak mempersoalkan apakah dua kelas yang pertama ataukah tiga kelas yang pertama. Baru sesudah itu semua mata pelajaran diberikan dalam bahasa Indonesia.
- b. Sesudah apa yang diuraikan di dalam a, maka bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar untuk seluruh mata pelajaran, sedangkan bahasa daerah, yang dalam kehidupan sehari-hari berdampingan dengan bahasa Indonesia itu, dialihkan menjadi salah satu mata pelajaran, sekedar untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan mereka membaca, memahami dan menikmati ceritera-ceritera yang tertulis dalam bahasa daerah

dan secara lebih sadar membedakannya dari bahasa Indonesia, dan dengan demikian bisa menghambat proses interferensi.

- c. Konsekuensi *a* dan *b* ialah bahwa harus dapat dipikirkan suatu usaha yang menggiatkan penulisan buku-buku bacaan baik dalam bahasa daerah maupun dalam bahasa Indonesia, dan yang sesuai dengan isi serta bahasanya dapat digunakan sebagai buku pengisi perpustakaan di sekolah dasar. Tentu syukur alhamdulillah kalau hal itu dapat ditingkatkan sehingga dapat pula dipergunakan untuk sekolah menengah. Dirasakan sekarang ini adanya kekosongan atau kekurangan yang amat besar mengenai penulisan ini.

Dalam hubungan dengan uraian ini saya masih ingin menambahkan suatu contoh bahwa bahasa ibu atau bahasa daerah murid sekolah dasar amat diperlukan justru untuk pembinaan bahasa Indonesia sendiri. Contoh ini berupa kesimpulan seorang mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia, FKSS IKIP Malang, Dendy Sugono, dalam skripsinya yang berjudul:

*"Problematik Pengajaran Bahasa Indonesia di SD Masyarakat Bahasa Jawa Dialek Osing di Banyuwangi."*

Kesimpulan-kesimpulan itu adalah sebagai berikut:

1. Bahasa Jawa dialek Osing di Banyuwangi adalah bahasa yang dipakai oleh sebagian penduduk Banyuwangi. Bahasa Jawa dialek Osing Banyuwangi ini mempunyai kedudukan yang sangat kuat di dalam masyarakat pemakainya.
2. Hasil pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar masyarakat bahasa Jawa dialek Osing Banyuwangi belum baik, bahkan dapat dikatakan sangat kurang. Pada bahasa Indonesia anak didik tampak adanya kesalahan-kesalahan tata bahasa, semantik, dan ejaan. Presentase kesalahan yang terbesar terletak pada kesalahan tata bahasa, sebagian kesalahan sintaksis. Pada bahasa Indonesia mereka tampak adanya transferensi unsur-unsur bahasa pertama.
3. Mengingat kedudukan dan fungsi pengajaran bahasa Indonesia keadaan yang demikian itu tak sepatasnya dibiarkan. Oleh karena itu perlu diusahakan pemecahannya agar pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar masyarakat bahasa Jawa dialek Osing Banyuwangi dapat membawa hasil yang baik.
4. Belum berhasilnya pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar masyarakat bahasa Jawa dialek Osing Banyuwangi disebabkan oleh faktor-faktor anak didik, bahasa, lingkungan belajar, dan guru.
  - a. Faktor anak didik:
    1. Anak didik tidak dapat memanfaatkan pengalaman belajar bahasa pertama dalam belajar bahasa Indonesia.

2. Fasilitas untuk anak didik sangat terbatas.
  3. Tidak ada motivasi belajar pada anak didik.
- b. Faktor bahasa:
1. Kedudukan bahasa Jawa dialek Osing Banyuwangi sangat kuat, dan karena itu berpengaruh pada anak didik dalam belajar bahasa Indonesia.
  2. Bahasa Indonesia tidak begitu dikenal oleh masyarakat bahasa Jawa dialek Osing Banyuwangi.
- c. Faktor lingkungan belajar:
1. Lingkungan di sekolah:
    - Para guru umumnya masih menggunakan bahasa daerah ketika mengajar.
    - Imbangan guru dan murid kurang dapat dilaksanakan secara maksimal, karena jumlah murid yang terlalu besar pada tiap-tiap kelas.
    - Perpustakaan di sekolah dasar dalam masyarakat bahasa Jawa dialek Osing Banyuwangi masih belum ada.
    - Buku teks belum dimiliki setiap murid.
  2. Lingkungan di luar sekolah:
    - Pada umumnya orang tua murid kurang menguasai bahasa Indonesia.
    - Bahasa yang hidup di lingkungan anak-anak adalah bahasa Jawa dialek Osing Banyuwangi.
    - Berbagai media massa yang menggunakan bahasa Indonesia jarang dijumpai di lingkungan kehidupan anak.
- d. Faktor guru:
1. Pada umumnya para guru kurang menguasai bahasa Indonesia.
  2. Pada umumnya para guru kurang menguasai metode pengajaran bahasa sebagai akibat kurang baiknya pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia.

Akhirnya saya sampaikan kepada kesimpulan-kesimpulan berikut:

1. Bahasa daerah dalam posisinya sebagai bahasa L, dalam satu ruang lingkup, yaitu dalam kehidupan serta kontak sehari-hari yang tidak resmi, memiliki fungsi dan kedudukan yang amat penting di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa H.
2. Mengingat kesimpulan 1, bahasa daerah bila tidak dibina, akan lebih menghalang-halangi pertumbuhan sehat bahasa Indonesia sendiri, dan oleh karena itu dalam ruang lingkup yang hanya tinggal satu itu, bahasa daerah seyogyanya dapat dipelihara dan dibina.

3. Mengenai bahasa daerah yang mengenal apa yang oleh Soepomo disebut *speech levels*, seperti Ngoko dan Krama dalam bahasa Jawa, seyogyanya titik berat perhatian dicurahkan kepada *speech level* yang digunakan oleh mayoritas dengan frekuensi yang paling tinggi.
4. Bahasa daerah yang memiliki kesusastraan dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi, seyogyanya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan bahasa Indonesia sendiri. Cara-caranya dapat diselidiki pada tingkat akademi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ferguson, Charles A. 1964. "Diglossia" dalam *Language in Culture and Society*, New York, Evanston, and London.
- Gonda, J. 1952 *Sanskrit in Indonesia*. Nagpur: The International Academy of Indian Culture.
- de Hoiiander, J.J. 1882. *Maleische Taal en Letterkunde*. Breda.
- Marouzeau, J. 1951. "Lexique de la Terminologie Linguistique", Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris.
- Pei, Mario A. dan Drank Gaynor. 1954. *Dictionary of Linguistics*. New York: Philosophical Library.
- Poedjosoedarmo, Soepomo. 1974. "Indonesian and the Javanese speech levels". Kertas kerja pada First International Conference on Comparative Austronesian Linguistics, Honolulu, January 2-7, 1974.
- Wolff, John. 1974. "Diglossia dan Bilinguisme". Ceramah di IKIP Malang.
- de Coster, Sylvain *et al.* 1971. "Aspects sociologiques du Plurilinguisme", Bruxelles.

**6**

**INVENTARISASI  
BAHASA DAERAH**

**S.EFFENDI**

## 1. Pendahuluan

Ada tiga pertanyaan pokok yang timbul bertalian dengan judul kertas kerja ini:

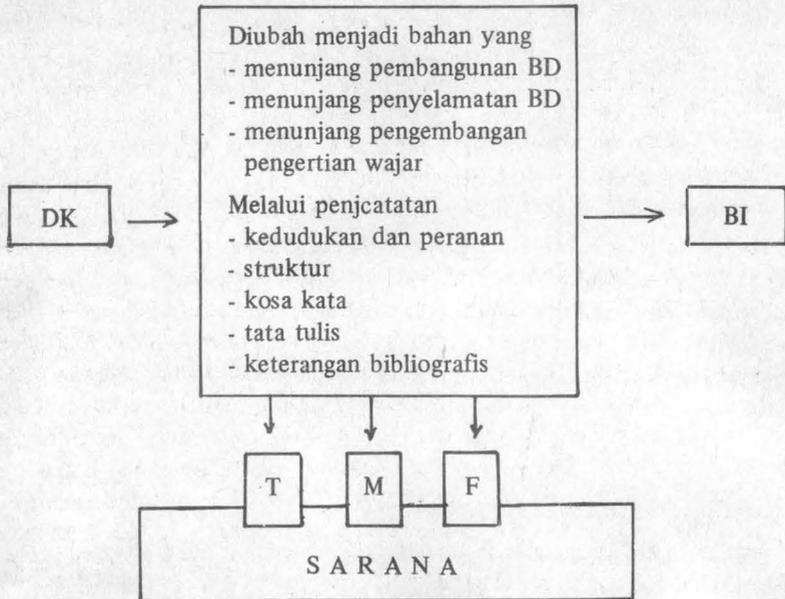
1. Apakah yang dimaksud dengan inventarisasi bahasa daerah?
2. Bagaimana inventarisasi bahasa daerah selama ini?
3. Bagaimana pula inventarisasi bahasa daerah yang kita harapkan?

Kertas kerja ini akan berusaha sedapatnya menjawab ketiga pertanyaan itu berdasarkan bahan-bahan yang tersedia. Kemudian, jawaban itu diharapkan akan menimbulkan beberapa pertanyaan dan jawaban lain yang lebih teliti dan terarah sehingga dapat dirumuskan seperangkat kebijaksanaan dan tindakan inventarisasi bahasa daerah dalam rangka politik bahasa nasional.

### Konsep Dasar Inventarisasi

Inventarisasi bahasa daerah adalah suatu sistem. Dalam sistem itu kita dapat melihat adanya empat komponen utama, yakni (1) data dan keterangan tentang bahasa daerah yang hendak dikumpulkan, (2) proses pengolahan data dan keterangan, (3) hasil proses pengolahan data dan keterangan, dan (4) sarana yang memungkinkan terjadinya proses pengolahan itu. Komponen pertama meliputi data lapangan dan data kepustakaan (DK) tentang berbagai aspek bahasa daerah. Komponen kedua menyangkut pengarahan, yakni data dan keterangan itu hendaknya diubah menjadi bahan informasi kebahasa-daerahan yang dapat menunjang pengembangan dan penyelamatan bahasa daerah serta pembinaan sikap dan pengertian wajar terhadap bahasa daerah melalui pencatatan atau perekaman kedudukan dan peranan, struktur, kosa kata, tata tulis, dan keterangan kepustakaannya. Komponen ketiga adalah bahaninformasi kebahasadaerahan (BD) sebagai hasil inventarisasi, baik berupa deskripsi, transkripsi, daftar pustaka maupun koleksi yang terlatih, pengelolaan (M) yang efisien dan efektif, dan fasilitas (F), dana dan peralatan yang memadai.

Berdasarkan konsep di atas, sistem inventarisasi bahasa daerah dapat dibayangkan sebagai berikut:



Dari bagan ini dapat kita pahami bahwa hasil inventarisasi (BI) dapat merupakan *input* yang sangat berharga bagi perencanaan penelitian lebih lanjut dan perencanaan pengembangan bahasa daerah. Tanpa melalui inventarisasi dan memperhitungkan hasil inventarisasi, perencanaan penelitian dan pengembangan bahasa daerah akan mendorong pelaksanaan yang tidak efisien dan efektif.

### **Inventarisasi Bahasa Daerah Selama ini.**

Dengan keterbatasan informasi yang tersedia, kertas kerja ini tentulah tidak akan dapat menunjukkan selengkapnyanya kenyataan-kenyataan yang menguntungkan ataupun yang menghambat kegiatan inventarisasi yang telah dan sedang dilakukan dewasa ini. Namun, dari keterbatasan informasi itu, terlihat adanya tiga masalah pokok yang dihadapi oleh kegiatan inventarisasi bahasa daerah:

1. Hasil inventarisasi bahasa daerah selama ini kurang serasi dengan kebutuhan para peminat dan masyarakat umumnya masa kini.
2. Pengelolaan inventarisasi bahasa daerah banyak mengandung kelemahan. Sumber-sumber yang bertalian dengan keuangan, peralatan, dan tenaga ahli serta terlatih sangat tidak memadai.

Cukup banyak hasil inventarisasi bahasa daerah sebelum Perang Dunia Kedua, baik berupa pencatatan latar belakang kemasyarakatan dan kebudayaan ataupun daftar kata, kamus, tata bahasa, sketsa tata bahasa, dan teks, seperti dapat kita baca dari seri bibliografi yang diterbitkan oleh Koninklijk Instituut voor Taal-; Land- en Volkenkunde. Apa artinya bagi kita, peminat dan masyarakat masa kini? Bahan itu dapat bermanfaat bagi mereka yang memperolehnya dan mampu membacanya- sebagian besar bahan itu ditulis dalam bahasa asing. Namun, agaknya tidak akan berlebihan apabila dinyatakan bahwa sebagian besar peminat dan masyarakat masa kini tidak dapat memanfaatkannya, baik karena bahan itu tidak diperoleh atau tidak dipahami ataupun karena bahan itu sedikit banyak dilandasi kepentingan penguasa pada masa itu. Tidak sedikit pula pencatatan atau telaah terhadap bahasa daerah dilakukan pada masa Kemerdekaan, tetapi belum dikumpulkan dan didokumentasikan sebagaimana mestinya sehingga sukar dimanfaatkan oleh para peminat. Singkatnya, para peminat dan masyarakat masa kini membutuhkan hasil inventarisasi yang dapat memudahkan untuk membina dan mengembangkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia, untuk memahami dan menghadapi serta menghayati masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional.

Ketidakterasian hasil inventarisasi dengan kebutuhan kita dewasa ini disebabkan oleh pengelolaan yang cukup lemah. Kita belum melihat adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kegiatan-kegiatan inventarisasi yang meluas, sungguh-sungguh, terus-menerus, dan terarah. Yang kita lihat adalah beberapa keputusan inventarisasi yang dilakukan secara insidental dan terlepas-lepas. Kita belum melihat adanya perencanaan inventarisasi yang baik. Yang kita ketahui adalah perencanaan inventarisasi yang umumnya tidak menyeluruh, lebih intuitif atau berdasarkan selera pribadi, sehingga sasaran, pendekatan, dan pemberian prioritas tidak merupakan pengarahan inventarisasi yang baik. Kita belum melihat adanya kerja sama yang baik di bidang inventarisasi bahasa daerah antara berbagai badan atau lembaga atau perorangan. Yang kita lihat adalah tiap lembaga atau badan atau perorangan bekerja sendiri-sendiri, amat kurang saling memberikan informasi- suatu pemborosan tenaga dan biaya yang sama-sama tidak kita kehendaki. Dan kita pun belum melihat adanya rangsangan yang mampu menggairahkan kegiatan inventarisasi bahasa daerah. Yang saya ketahui adalah tidak sedikit peneliti, peminat, atau masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kegiatan inventarisasi bahasa daerah karena mereka tidak yakin bahwa kegiatan itu bermanfaat. Akhirnya, kita pun belum melihat sejauh mana evaluasi hasil inventarisasi selama ini telah dilakukan. Daftar pustaka dan daftar pustaka beranotasi amat sedikit.

Tidak adanya keserasian hasil inventarisasi itu disebabkan pula oleh terbatasnya biaya, ketrampilan, dan peralatan. Kita melihat bahwa kegiatan

inventarisasi dilakukan dengan biaya murah, tenaga ahli dan terlatih dalam bidang inventarisasi dan dokumentasi amat sedikit, peralatan inventarisasi dan dokumentasi tidak memenuhi syarat baik dalam jumlah maupun mutu.

Di samping kenyataan-kenyataan yang kurang menguntungkan kegiatan inventarisasi bahasa daerah itu, perlu kita catat mulai tumbuhnya kembali kegairahan membina dan mengembangkan bahasa selama dua tahun terakhir ini, setelah Pemerintah lebih menyadari perlunya pembinaan baik bahasa nasional maupun bahasa daerah dan menyisihkan sebagian anggaran pembangunan untuk maksud tersebut pada tahun 1973/1974 dan 1974/1975. Dengan anggaran yang disediakan itu, Lembaga Bahasa Nasional, misalnya, telah dan sedang melakukan inventarisasi karangan berharga tentang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang terdapat dalam majalah, dan skripsi yang tersebar di berbagai fakultas sastra dan IKIP, disertai dan bahan-bahan lain tentang bahasa dan sastra yang terdapat di dalam dan luar negeri.

### **Inventarisasi Bahasa Daerah yang Kita Harapkan**

Apabila konsep dasar inventarisasi yang telah dikemukakan tadi dapat diterima, dan kenyataan-kenyataan yang kurang menguntungkan dan menguntungkan itu dianggap benar, maka kebijaksanaan dan program kegiatan inventarisasi bahasa daerah dapatlah dijabarkan sebagai berikut:

#### **Aspek Kebahasaan yang Diinventarisasi**

Aspek yang pertama menyangkut data lapangan, yakni tentang (1) kedudukan dan peranan kemasyarakatan dan kebudayaan berbagai bahasa daerah, jumlah pemakai, dan wilayah pemakaian, (2) struktur fonologi, morfologi, sintaksis, fonetik, dan semantiknya, (3) kosā kata yang menjadi warga kosa kata bahasa Indonesia, dan (4) huruf daerah dan tata tulis yang pernah atau masih digunakan. Yang kedua bertalian dengan data kepustakaan, yakni karangan-karangan berharga tentang bahasa daerah, baik berupa (1) artikel dalam berbagai majalah dan surat kabar, (2) kertas kerja untuk berbagai diskusi, seminar, simposium, loka karya, atau penataran, (3) skripsi sarjana muda dan sarjana di berbagai fakultas sastra, IKIP, IAIN, dan lembaga lain yang bersangkutan, ataupun (4) disertai, yang ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahasa asing.

#### **Kriteria Pengarahan Inventarisasi**

Pertanyaan-pertanyaan (1) apakah hasil inventarisasi dapat menunjang pembinaan dan pengembangan bahasa daerah yang dijadikan bahasa pengantar di sekolah dasar, (2) apakah hasil inventarisasi dapat menunjang pembinaan dan pengembangan bahasa daerah yang memberikan sumbangan besar

terhadap perkembangan bahasa Indonesia, (3) apakah hasil inventarisasi dapat merupakan penyelamatan bahasa daerah yang hampir musnah, dan 4) apakah hasil inventarisasi dapat menunjang pembinaan sikap dan pengertian yang baik terhadap kedudukan dan fungsi bahasa daerah serta latar belakang kemasyarakatan dan kebudayaan para pendukungnya, dapat dikembangkan sebagai kriteria umum pengarah inventarisasi.

### Program kegiatan inventarisasi.

Ada dua kegiatan utama yang mendesak untuk dilaksanakan selama lima tahun Pelita II, yakni (1) inventarisasi struktur, leksikon, latar belakang kemasyarakatan serta kebudayaan, dengan sasaran bahasa-bahasa daerah yang dijadikan bahasa pengantar di sekolah dasar dan dialek-dialek Melayu, dan (2) penataran penelitian dan dokumentasi, dengan sasaran tersedianya paling sedikit 30 tenaga yang cukup terlatih dalam bidang penelitian dan 10 tenaga dalam bidang inventarisasi dan dokumentasi kebahasaan. Dalam pelaksanaannya program itu seyogyanya sejalan dengan program penelitian dan pengembangan bahasa secara keseluruhan dan memanfaatkan tenaga di pusat maupun di daerah, di dalam maupun di luar lembaga pendidikan tinggi, yang dianggap dapat melaksanakan kegiatan tersebut.

### Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1974. "Program Pengembangan Bahasa dan Sastra". Jakarta.
- Departemen Penerangan R.I. t.t. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keaja*. Jilid II Jakarta.
- Danandjaja, James. 1973. "Inventarisasi dan Dokumentasi Folklore Indonesia". kertas kerja. Jakarta: Panitia Penyelenggara Seminar Inventarisasi dan Dokumentasi Folklore Indonesia.
- Effendi, S. 1973. "Lembaga Bahasa Nasional dan Pembinaan Bahasa Indonesia". Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional.
- 1976. "Lembaga Bahasa Nasional dan Pengembangan Bahasa Indonesia". Amran Halim, ed. *Politik Bahasa Nasional*. I: 27-36. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Halim, Amran. 1976. "Fungsi Politik Bahasa Nasional". Amran Halim, ed. *Politik Bahasa Nasional*. I: 13-25. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- en Vokenkunde. 1975. *Critical Survey of Studies on the Languages of Sumatra*, Bibliographical Series 1. 'S-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- 1958. *Critical Survey of Studies on the Languages of Borneo*. Bibliographical Series 2. 'S-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- 1961. *A Critical Survey of Studies on Malay and Bahasa Indonesia*. Bibliographical Series 5. 'S-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- *A Critical Survey of Studies on the language of Java and Madura*. Bibliographical Series 7. 'S Gravenhage Martinus Nijhoff.
- Lembaga Bahasa Nasional. 1975. "Kegiatan Utama dan Sasaran Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 1974/1975 dan 1975/1976". Jakarta.

**7**

**PENGAJARAN BAHASA DAERAH**

**TARWOTJO**

## Pengantar

Dalam praseminar yang lalu, politik bahasa Indonesia telah dibahas dari macam-macam segi yang dianggap perlu, bahkan mengenai pengajaran bahasa daerah. Masalah yang ditugaskan kepada saya pun telah disinggung di sana-sini dalam gradasi tertentu. Karena itu, saya tak akan mengulanginya lagi, dan anggaplah ini sebagai sekedar tambahan bahan pertimbangan saja.

Sebelum kita membicarakan pengajaran bahasa daerah, barangkali perlu dicatat bahwa kita umumnya telah meninjau masalah kebijaksanaan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional serta pendidikan nasional dari dua segi dasar, yaitu:

- a. UUD 1945, GBHN, dan semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan; dan
- b. penghayatan kenyataan yang hidup dalam keluarga dan masyarakat.

Secara pedagogis, misalnya, pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Asas ini tentunya juga berlaku bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, apalagi dalam konteks pelaksanaan Sumpah Pemuda. Karena itu, partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah juga sangat perlu dalam bidang pengajaran bahasa daerah dalam rangka pembinaan pendidikan nasional dan kebudayaan nasional seperti yang tercakup dalam GBHN. Dengan demikian, masalah ini juga merupakan satu di antara masalah yang kompleks.

Menurut penghayatan pengalaman yang terbatas, kalau ada masalah yang kompleks, ada yang menghayatinya sebagai berikut:

Bicarakan masalah itu secara rasional dan terperinci, dan rumuskan pemecahannya bersama secara terperinci. Hikmah positifnya penjelasan ini tentunya antara lain secara pedagogis mantap karena partisipasi yang bersangkutan tertampung. Di samping itu, mungkin karena macam-macam faktor, kadang-kadang makin banyak dibicarakan makin hangat lebih dari seperlunya. Karena itu, barangkali perlu saling belajar tenggang rasa atas dasar maksud dan tujuan semula.

Bicarakan masalah itu secukupnya saja karena setiap kebudayaan yang tua umurnya biasanya telah mempunyai sistem nilai yang relatif lengkap. Ada yang membedakan, misalnya, bahasa yang tersurat dan yang tersirat. Ada yang memberikan petuah *wong kuwi kudu tanggap ing sasmita*. Barangkali ada yang mengatakan *the silent language*. Mungkin juga ada yang menggunakan *jangkar sosial budaya*. Hikmah positifnya penjelasan ini, antara lain dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional, ialah mungkin kita perlu menggali "kata-kata tersirat" dari macam-macam bahasa daerah kita itu, supaya kita dapat menghayati pelaksanaan asas tenggang rasa. Di samping itu, karena macam-macam faktor, mungkin kadang-kadang karena kurang

dibicarakan, kita seolah-olah menghindari masalah dan menundanya, padahal mungkin kita perlu membicarakan dan memecahkannya seperlunya.

Atas dasar pengantar singkat tadi, kertas kerja ini disusun sebagai berikut:

- a. perlu tidaknya pengajaran bahasa daerah;
- b. landasan;
- c. penghayatan tentang kenyataan penggunaan bahasa daerah;
- d. beberapa pendapat; dan
- e. kesimpulan.

### **Perlu Tidaknya Pengajaran Bahasa Daerah**

Sebelum kita membahas perlu tidaknya pengajaran bahasa daerah, kiranya baik kita tanyakan dahulu tentang beberapa hal yang menyangkut masalah pelaksanaan Sumpah Pemuda, yang telah kita ikrarkan sejak tahun 1928, terutama yang menyangkut masalah satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia di seluruh tanah air karena ini menentukan peranan bahasa daerah.

Ada beberapa persoalan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bilamana, dalam kenyataannya, pengajaran bahasa daerah diharapkan dan direncanakan? Lebih khusus lagi, dalam Pelita keberapa atau bahkan tahun berapa?
- b. Kriteria apa yang kita gunakan untuk menentukan tahun yang kita pilih itu. Apakah pengajaran bahasa Indonesia dilaksanakan:
  - a. sampai taraf menerti bahasa Indonesia sekedar untuk berkomunikasi;
  2. sampai taraf trampil menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari atau lebih dari itu; atau
  3. sampai mempribadikan nilai-nilai dasar sehingga mampu bersikap dan bertindak atas dasar jiwa Sumpah Pemuda kita.

Karena ini adalah masalah kualitatif pedagogis, mungkin sukar sekali mengukurnya secara kuantitatif, tapi setidaknya-tidaknya dari segi gradasi penguasaan bahasa, para ahli bahasa kita dapat memikirkannya secara lebih dalam dan bermakna secara fungsional bagi seluruh warga negara kita.

- c. Tentunya cara mencapai tujuan kita perlu diatur dalam sistem penyajian tertentu yang efektif, efisien, dan relatif murah serta merata. Perlu dipikirkan, misalnya, mekanisme mana yang kita pakai beserta personalianya dan fasilitas yang diperlukan.

Kalau persoalan itu relatif jelas, pertanyaan pokok berikutnya ialah perlu tidaknya pengajaran bahasa daerah dan bagaimanakah cara mengatur pelaksanaannya. Tentunya kita sepakat bahwa pengajaran bahasa daerah itu perlu selama ia menunjang pelaksanaan Sumpah Pemuda dan pembicaraan

kebudayaan nasional yang diperkaya antara lain dengan unsur kebudayaan daerah. Dalam konteks inilah pengajaran bahasa daerah secara esensial ditentukan keperluannya dan secara eksistensial perlu dipelihara perkembangannya.

### **Landasan**

Masalah pengajaran bahasa daerah perlu dilandasi dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang, seperti telah saya singgung dalam pengantar tadi, telah banyak dibicarakan dalam praseminar yang lalu. Oleh karena itu, tidak saya ulangi di sini. Dalam membicarakan perlu tidaknya pengajaran bahasa daerah, juga telah saya singgung posisinya sehubungan dengan landasan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tadi.

### **Penghayatan tentang Kenyataan Penggunaan Bahasa Daerah**

Hal ini juga sudah dikupas dalam praseminar yang lalu dari beberapa segi, dan saya hanya akan menambah beberapa catatan sebagai berikut:

1. Bahasa-bahasa daerah umumnya dipergunakan dalam keluarga dan masyarakat.
2. Ada perbedaan gradual antara bahasa-bahasa daerah dalam segi jauh-dekatnya dengan bahasa Indonesia.
3. Kita umumnya belum mengetahui jumlah dan kategorisasi bahasa-bahasa daerah seperti yang kita hayati pada No. 2 tadi.
4. Bahasa-bahasa daerah adalah salah satu unsur kebudayaan daerah, dan kebudayaan daerah adalah unsur kebudayaan nasional yang tengah kita bina dan kembangkan.
5. Mungkin semua bahasa daerah kita itu umurnya sudah tua sekali, tetapi ada perbedaan dalam kualitas pengembangannya; ada yang sudah berkembang secara relatif lengkap dan ada yang belum.
6. Atas dasar itu, perguruan tinggi kita yang bersangkutan barangkali perlu melakukan penelitian tentang ini sehingga masalah ini tergarap secara akademis untuk mempertinggi sistem penyampaian pelaksanaan Sumpah Pemuda dan pembinaan serta pengembangan kebudayaan nasional. Saya kira penelitian bahasa dalam konteks disiplin antropologi sosial budaya dapat banyak menolong kita dalam hal ini.

### **Beberapa Pendapat**

Dengan menggunakan materi yang dibahas dalam praseminar dan sekedar tambahan pertimbangan di atas, barangkali dapat kita susun garis besar pemikiran tentang pengajaran bahasa daerah di bidang pendidikan formal sebagai berikut:

1. Ada yang berpendapat bahwa di Sekolah Dasar tak usah diajarkan bahasa daerah dengan alasan, antara lain, supaya di Sekolah Dasar hanya ada satu bahasa pengantar dan pengajaran bahasa, yaitu bahasa Indonesia, untuk seluruh warga negara kita, dalam rangka pelaksanaan Sumpah Pemuda. Bahasa daerah mulai diajarkan di sekolah lanjutan ke atas dan diperdalam serta diperluas di perguruan tinggi yang bersangkutan dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional.
2. Ada yang berpendapat bahwa sejak kelas I sekolah dasar bahasa daerah perlu diajarkan juga di samping pelajaran bahasa Indonesia yang dimulai sejak kelas III dengan alasan, antara lain, karena bahasa daerah umumnya adalah bahasa ibu dalam kenyataan yang dihayati anak didik. Di sekolah lanjutan dan perguruan tinggi seperti pendapat pertama di atas.
3. Pendapat ketiga adalah jalan tengah sebagai berikut:
  - a. Garis besar pendapat pertama perlu kita sukseskan sesuai dengan landasan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Garis besar pendapat kedua perlu kita pertimbangkan sebagai salah satu kenyataan yang mungkin ada.
  - c. Kurikulum sekolah kita diolah kembali dalam dua tahap, yaitu:
    1. pengembangan kurikulum yang mantap melalui eksperimentasi;
    2. penyusunan kurikulum peralihan.

Dengan kata lain, garis besar pendapat ketiga ini mungkin berbunyi sebagai berikut:

- a. Kurikulum transisi perlu mencakup:
  1. pengajaran bahasa Indonesia sejak kelas I sekolah dasar ke atas dengan jumlah jam yang sama di seluruh Indonesia, misalnya 8 jam seminggu di sekolah dasar;
  2. pengajaran bahasa daerah, kalau itu diberikan, sebagai bagian pengajaran bahasa Indonesia tanpa mengurangi jumlah jam pengajaran bahasa Indonesia;
  3. pengajaran bahasa daerah sejak kelas I sekolah dasar ke atas di daerah-daerah yang menganggapnya perlu, misalnya dengan menambah 2 jam pelajaran seminggu;
  4. pengajaran membaca, menulis permulaan (MMP) di kelas I dan II sekolah dasar yang dilakukan langsung dengan bahasa Indonesia dengan bantuan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar kalau diperlukan;
  5. pengajaran di sekolah lanjutan dan perguruan tinggi seperti dalam garis besar pendapat pertama.
- b. Kurikulum yang lebih mantap tentunya perlu menunggu hasil evaluasi berdasarkan penelitian melalui eksperimentasi.

## Kesimpulan

1. Masalah pengajaran bahasa daerah adalah masalah yang cukup kompleks karena menyangkut beberapa segi, yaitu kebijaksanaan GBHN sebagai pola dasar pembangunan nasional, termasuk kebijaksanaan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa dan kebudayaan nasional serta kebijaksanaan tentang pendidikan nasional.
2. Kalau analisis sementara tentang adanya garis besar tiga pendapat di atas benar, kiranya pendapat ketiga dapat kita pertimbangkan karena pendapat itu:
  - a. cukup terarah dalam rangka pelaksanaan Sumpah Pemuda;
  - b. cukup disesuaikan dengan kenyataan yang mungkin ada dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional;
  - c. cukup tidak menambah masalah yang mungkin tidak perlu; dan
  - d. cukup mempertimbangkan segi yang menyeluruh, berhasil guna (efektif), berdaya guna (efisien), kaitan maknanya (relevansinya) dan prioritas kita sebagai bangsa.
3. Sebagai penutup, selaku salah seorang yang diminta menjadi pemrasaran yang mengajukan kertas kerja yang singkat, sederhana dan populer penyajiannya ini, izinkanlah saya belajar dari para peserta Seminar dalam hal ini.

## Kesimpulan

1. Masalah pengajaran bahasa daerah adalah masalah yang cukup kompleks karena menyangkut beberapa segi, yaitu kebijaksanaan GBHN sebagai pola dasar pembangunan nasional, termasuk kebijaksanaan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa dan kebudayaan nasional serta kebijaksanaan tentang pendidikan nasional.
2. Kalau analisis sementara tentang adanya garis besar tiga pendapat di atas benar, kiranya pendapat ketiga dapat kita pertimbangkan karena pendapat itu:
  - a. cukup terarah dalam rangka pelaksanaan Sumpah Pemuda;
  - b. cukup disesuaikan dengan kenyataan yang mungkin ada dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional;
  - c. cukup tidak menambah masalah yang mungkin tidak perlu; dan
  - d. cukup mempertimbangkan segi yang menyeluruh, berhasil guna (efektif), berdaya guna (efisien), kaitan maknanya (relevansinya) dan prioritas kita sebagai bangsa.
3. Sebagai penutup, selaku salah seorang yang diminta menjadi pemrasaran yang mengajukan kertas kerja yang singkat, sederhana dan populer penyajiannya ini, izinkanlah saya belajar dari para peserta Seminar dalam hal ini.

**8**

**PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH**

**AJIP ROSIDI**

## Pengantar

Dalam Praseminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan bulan Oktober 1974 yang lalu, masalah bahasa daerah tidak masuk dalam acara. Tetapi para peserta Praseminar itu nisoaya masih ingat bahwa ternyata sebagian (yang cukup besar) praseminar itu dipergunakan untuk permasalahan bahasa daerah. Kertas kerja Saudara Jazir Burhan yang berjudul "Politik Bahasa Nasional dan Pengajaran Bahasa" ternyata banyak memberikan kesempatan kepada para peserta Praseminar untuk membahas masalah bahasa daerah.

Rumusan hasil Sidang Pleno II yang membahas prasaran Saudara Jazir Burhan itu, mengemukakan beberapa hal berkenaan dengan bahasa daerah. Untuk menyegarkan ingatan, saya kutip:

1. Tafsiran yang resmi tentang "dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik" dan "dipelihara juga oleh negara" yang terdapat dalam penjelasan Bab XV pasal 36 UUD 1945 perlu diberikan untuk dijadikan pedoman pelaksanaannya dalam usaha pemeliharaan bahasa nasional dan bahasa-bahasa daerah.

2. Masih perlu dipikirkan lebih lanjut pada jenis dan tingkatan sekolah apa bahasa-bahasa daerah (. . .) diajarkan.

3. Masih perlu dipikirkan lebih lanjut kapan dan berapa lama bahasa daerah (. . .) diajarkan pada sekolah-sekolah itu.

4. Masih perlu diteliti lebih lanjut manakah yang lebih baik bagi perkembangan si anak didik penggunaan bahasa Indonesia ataukah bahasa ibu (daerah) sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar.

Hanya rumusan kelima yang tidak menyinggung masalah bahasa daerah, padahal seluruh rumusan Sidang Pleno II itu terdiri dari lima nomor saja! Hal itu menunjukkan bahwa meskipun dalam acara resmi tak tercantum acara mengenai bahasa daerah, tetapi para peserta Praseminar menganggap bahasa daerah cukup penting. Itu sebabnya barangkali maka dalam Seminar sekarang masalah bahasa daerah dikemukakan oleh empat orang pemrasaran.

Sulitnya ialah karena dalam waktu yang singkat antara Praseminar waktu hak itu dirumuskan dengan Seminar sekarang belum ada kemajuan dalam soal-soal "masih dipikirkan" dan "masih harus diteliti", sepanjang pengetahuan saya. Juga tafsiran resmi terhadap kalimat-kalimat pasal 36 UUD 1945 belum sempat dibuat.

Maka melalui kertas kerja ini, saya mengharapkan akan dapat menyodorkan masalah-masalah pengembangan bahasa daerah yang dapat menjadi bahan pembahasan dalam Seminar ini yang nantinya akan berguna bagi mereka yang berwewenang dalam memberikan tafsiran bahasa daerah setelah

cukup memikirkan dan menelitinya. Namun demikian, kiranya patut saya jelaskan sekarang bahwa apabila dalam kertas kerja ini dalam memberikan contoh saya banyak berpaling kepada bahasa daerah Sunda, semata-mata karena itulah bahan-bahan yang sekadarnya saya tahu, dan sama sekali bukan berarti bahwa contoh-contoh dari bahasa daerah yang lain tidak penting. Dengan hadirnya para peserta dari daerah lain yang niscaya mengetahui situasi bahasa daerah yang lain, saya harap Seminar ini akan menjadi sebuah tempat untuk saling beri informasi –kecuali untuk saling tukar pendapat– mengenai keadaan sebenarnya bahasa-bahasa daerah di Indonesia.

Karena masalah pokok dalam usaha pengembangan bahasa daerah adalah dasar hukum yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu tafsiran mengenai masalah "yang dipelihara rakyatnya baik-baik" dan "dipelihara juga oleh negara", maka saya akan memulai kertas kerja ini dengan mengemukakan masalah pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah- yang secara mendalam akan dibahas oleh Saudara Tarwotjo. Karena itu, dalam membaca hal itu saya hanya membicarakan pokok masalahnya saja dan tidak menyinggung-nyinggung masalah teknis.

Soal itu akan diikuti oleh pembahasan mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa daerah di luar sekolah, yang sekarang hampir sepenuhnya menjadi usaha rakyat pemakai bahasa daerah yang bersangkutan berupa penerbitan, penulisan, dan lain-lain yang merupakan bukti usaha rakyat dalam memelihara bahasa daerahnya. Sesudah itu, saya akan menyinggung kenyataan bahwa bahasa-bahasa daerah di Indonesia ini mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Hal itu akan diikuti dengan kesimpulan-kesimpulan.

### **1. Pembinaan dan Pengembangan di Sekolah**

Dalam Praseminar Politik Bahasa Nasional yang lalu, ada peserta yang mengemukakan pendapat bahwa bahasa daerah sebaiknya dijadikan mata pelajaran di tingkat sekolah lanjutan atas atau universitas saja, jadi sebagai suatu obyek ilmu belaka. Terhadap pendapat ini timbul beberapa sanggahan, yang dibantah oleh pihak yang pertama dengan mengatakan bahwa dalam UUD 1945 hanya disebutkan bahwa bahasa yang "dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik harus "dipelihara juga oleh negara"; dan- demikian katanya lebih lanjut- "dipelihara juga" itu tak usah berarti dijadikan bahasa pengantar atau harus dipelajari di sekolah dasar!

Dan sebagai konsekuensi pendapat tersebut ialah saran tentang penghapusan bahasa daerah tertentu yang di daerah tertentu sekarang ini dipergunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar untuk dua atau tiga tahun pertama. Dengan penghapusan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di daerah tertentu – demikian pendapatnya lebih lanjut – hilanglah dualisme

dalam penggunaan bahasa pengantar di Indonesia, sehingga ada murid yang berbahasa pengantar bahasa Indonesia sejak kelas satu dan ada yang baru mulai kelas empat, di sekolah dasar. Dilihat sepintas lalu ada juga logikanya pendapat itu: "dipelihara juga" tak usah berarti dijadikan bahasa pengantar atau harus dipelajari di sekolah dasar.

Tetapi apabila durenungkan lebih lanjut, maka logika itu — kalau diikuti — akan menyebabkan bahasa daerah (yang dipelihara oleh rakyatnya sekalipun, sama kedudukannya dengan bahasa Kawi (yang sudah mati) dan bahasa kedua (bahasa Jerman, Perancis, dan lain-lain). Dan kalau demikian halnya, maka barulah kelihatan bahwa logika itu tidak logis. Masakan bahasa daerah (yang dipelihara baik-baik oleh rakyatnya) disamakan dengan bahasa yang sudah mati atau bahasa asing padahal UUD dengan jelas menyebutkan keharusan negara memelihara bahasa daerah seperti itu? Memang bahasa Kawi juga dipelihara oleh rakyatnya baik-baik — tapi dulu, beberapa abad yang lalu. Memang bahasa Jerman atau Perancis pun dipelihara rakyatnya baik-baik — tapi tidak di Indonesia..

Karena itu logis, apabila bahasa daerah (yang dipelihara rakyatnya dengan baik) mendapat tempat lebih utama dalam kurikulum taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sebagai bukti bahwa negara pun memeliharanya juga. Anggapan bahwa anak-anak pemakai bahasa daerah tertentu tidak mempelajarinya adalah keliru. Membiarkan anak-anak mempergunakan bahasa tanpa bimbingan yang baik di sekolah hanya akan menimbulkan kekacauan bahasanya saja, yang juga tidak baik pengaruhnya kepada perkembangan bahasa Indonesia si anak.

Dalam pada itu, apabila negara tidak mengatur pengajaran bahasa daerah (yang dipelihara rakyatnya dengan baik) dan menyediakan guru-guru yang baik untuk itu secukupnya, maka bagaimana lagi negara membuktikan dirinya telah "menghormati dan memelihara juga" itu? Sebab membiarkan bahasa daerah dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari saja, membiarkan masyarakat pemakai bahasa daerah yang bersangkutan menulis surat pribadi atau memupuk bakatnya sebagai pengarang kemudian menerbitkan surat kabar dan majalah serta buku-buku atas risiko dan tanggung jawab sendiri, tidaklah berarti "memelihara". Itu hanya tidak melarang, dan melarang memang tidak mungkin, bukan saja karena bertentangan dengan isi dan jiwa UUD 1945, melainkan mustahil dilakukan, kecuali apabila maksudnya memang ingin menimbulkan kerusuhan.

Mengenai penghapusan bahasa daerah atau bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dan menggantinya dengan bahasa Indonesia sejak kelas I sekolah dasar memang kita harus hati-hati. Karena itu suatu penelitian yang cermat dengan mengutamakan kepentingan pertumbuhan kecerdasan dan kejiwaan si

anak didik perlu dilakukan — yang bukan saja memerlukan banyak sampel di berbagai daerah, tetapi juga memerlukan banyak waktu karena harus mengikuti perkembangan si anak didik yang bersangkutan. Mungkin hasil penelitian itu akan berlainan di setiap daerah, tak mustahil berbeda hasilnya di kota dan di pedesaan di daerah yang sama, dan hal itu menyebabkan kita mungkin harus mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus. Ya, tak mustahil hasil penelitian itu akan menyebabkan kita harus mengambil kebijaksanaan yang berlainan di setiap daerah — sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Maksud saya, mungkin hasil penelitian itu akan menyebabkan perlunya diambil kebijaksanaan di daerah tertentu yang menggariskan bahwa bahasa pengantar harus bahasa daerah, sedangkan daerah lain harus memakai bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mungkin akan lebih menguntungkan perkembangan si anak didik di kota-kota besar, tetapi tidak untuk anak-anak didik di pedesaan, misalnya — walaupun di daerah yang sama.

Masalah adanya perbedaan lamanya seorang anak mengenal bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar (ada yang mulai kelas satu dan ada yang mulai kelas empat, dan tak mustahil berdasarkan penelitian nanti baru dimulai kelas lima atau enam sekolah dasar, bahkan baru mulai di sekolah lanjutan), tidak usah menjadi masalah benar. Buat apa mempergunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia sejak awal apabila hasilnya tidak juga baik karena bertentangan dengan kebutuhan dan kepentingan anak didik? Apabila kepentingan anak didik mengharuskan kita mempergunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar sampai kelas empat atau enam sekolah dasar, masalah yang harus kita pecahkan ialah bagaimana mengajar anak-anak itu agar dapat mempelajari bahasa Indonesia secara intensif mulai kelas lima atau mulai sekolah lanjutan, dan bukan mengorbankan kepentingan anak didik dengan melakukan paksaan-paksaan.

Sebenarnya penelitian-penelitian yang bersangkutan dengan masalah bahasa daerah (baik yang menyangkut masalah penggunaannya sebagai bahasa pengantar maupun pengaruh timbal-balik dalam penguasaan bahasa si anak didik, dan lain-lain) sudah banyak juga dilakukan, baik oleh para sarjana maupun oleh para mahasiswa (sebagai bahan penulisan skripsi) terutama di IKIP. Sayangnya banyak para ahli bahasa kita yang ingin mengemukakan pendapat mengenai pengajaran bahasa Indonesia tidak suka memperhatikan hasil-hasil penelitian itu, dan lebih suka mengutip pendapat para sarjana dari atas angin. Tentu saja ia dapat mengemukakan alasan bahwa hasil penelitian-penelitian para mahasiswa atau rekannya sesama sarjana Indonesia itu tak diketahuinya karena karya-karya itu belum dipublikasikan, dan alasan itu sepenuhnya dapat kita terima dengan hati terbuka karena kita pun tahu bahwa ada:

1. masalah publikasi karya ilmiah yang merupakan masalah tersendiri yang membutuhkan suatu pembahasan dan kebijaksanaan khusus;
2. masalah koordinasi dan kerja sama antara sesama sarjana yang juga membutuhkan suatu pembahasan dan kebijaksanaan khusus;
3. kesulitan-kesulitan teknis (seperti transpor dan harga diri) yang sukar diatasi agar sarjana-sarjana kita dapat menghargai hasil karya sesama rekannya; dan
4. masalah prestise (eh prestasi) keserjanaan yang hanya dapat dibuktikan dengan cara sebanyak mungkin mengutip pendapat para sarjana asing yang sudah pasti lebih tahu dari kita.

Untuk sekedar bahan informasi bagi mereka yang berminat untuk meneliti lebih cermat, barangkali di sini dapat saya beri tahu bahwa dalam bulan Agustus 1972, FKSS-IKIP Bandung pernah menyelenggarakan "Seminar Pengajaran Bahasa, Sastra dan Seni FKSS IKIP Bandung", yang banyak membahas masalah pengajaran bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Kertas-kertas kerjanya bukan saja tersimpan di FKSS, tapi sudah pula dipublikasikan (tapi hanya distensil) bersama-sama dengan prasaran-prasaran dalam "Seminar Penulisan Buku-buku Pengajaran Bahasa Sunda untuk Sekolah Dasar" yang diselenggarakan oleh Proyek Perbaikan Kurikulum dan Metoda Mengajar di Sekolah Dasar bulan Desember 1971. Dalam prasaran-prasaran itu pun banyak petunjuk mengenai hasil-hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh para mahasiswa IKIP buat penulisan skripsi mengenai masalah tersebut.

Juga di Yogyakarta dalam bulan Nopember 1973 pernah diselenggarakan sebuah seminar berkenaan dengan pengajaran bahasa daerah, yaitu "Seminar Pengajaran Bahasa Daerah Bali, Sunda, Jawa" yang dihadiri oleh para wakil dari berbagai perguruan tinggi yang mempunyai jurusan bahasa daerah, perseorangan-perseorangan dan lain-lain.

Kesemuanya itu menunjukkan adanya hasrat untuk memelihara bahasa daerah dan hasrat untuk mendudukkan persoalan bahasa daerah dalam lingkungan negara Republik Indonesia.

Saya mengemukakan hal itu bukan karena saya *a priori* setuju akan kesimpulan-kesimpulan atau pendapat-pendapat yang dikemukakan para pemrasaran dalam seminar-seminar itu, karena saya sendiri tidak berkesempatan mengikuti semua seminar dan meneliti semua hasil penelitian tersebut, melainkan semata-mata karena ingin mengatakan bahwa penelitian-penelitian lapangan dan pembahasan yang mendalam mengenai masalah yang penting ini sudah mulai dilakukan. Dan saya yakin bahwa penelitian semacam itu dilakukan oleh para sarjana lain di IKIP dan universitas yang lain mengenai bahasa daerah yang lain, misalnya mengenai bahasa Makasar dan Bugis di IKIP Ujungpandang dan Universitas Hasanuddin. Kalau hasil-hasil penelitian itu

dikumpulkan, dan diteliti, mungkin kita akan mendapat gambaran yang lebih (atau agak) jelas dan konkret mengenai masalah ini.

Maka melalui kesempatan ini saya ingin menganjurkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (dahulu Lembaga Bahasa Nasional), membentuk suatu panitia yang terdiri dari para ahli untuk mengumpulkan dan meneliti hasil-hasil penelitian yang sekarang tersebar di berbagai IKIP dan universitas seperti IKIP Bandung, Malang, Yogyakarta, Surabaya, Padang, dan Ujungpandang sebagai bahan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut lagi cermat mengenai masalah tersebut.

Tadi saya sudah mengemukakan bahwa konsekuensi logis dari bunyi UUD 1945 (Penjelasan Pasal 36) bahwa "bahasa daerah yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik" itu harus "dipelihara" juga oleh negara", adalah mencantumkannya dalam kurikulum di sekolah-sekolah dan tidak boleh mempersamakannya dengan bahasa Kawi atau bahasa asing kedua. Memper-samakan bahasa daerah dengan bahasa Kawi dan bahasa asing kedua itu tampak dalam kurikulum yang sekarang berlaku buat sekolah menengah atas, yaitu menempatkan bahasa daerah sebagai mata pelajaran pilihan untuk Jurusan Sastra-Budaya (saja) di kelas dua dan tiga saja, masing-masing untuk dua dan tiga jam pelajaran seminggu. Dalam prakteknya, bahasa daerah itu dengan demikian tidak diajarkan, karena:

1. tidak semua sekolah menengah atas mempunyai jurusan Sastra-Budaya (dan jumlah sekolah menengah atas yang mempunyai Jurusan Sastra-Budaya sedikit sekali); dan
2. tidak semua sekolah menengah atas yang mempunyai Jurusan Sastra-Budaya itu menyediakan guru bahasa daerah sehingga jelas bahwa meskipun tercantum dalam kurikulum, kebijaksanaan seperti itu sama dengan membiarkan saja bahasa daerah (mati sendiri atau hidup sendiri), yang tentu saja tidak sama dengan "dipelihara juga".

Keluhan yang umum terdengar sekarang ialah bahwa penguasaan bahasa daerah anak-anak didik kita buruk sekali. Mereka berbahasa daerah hanya sekedar sebagai *lingua franca* di lingkungannya sendiri, tanpa bimbingan dan contoh yang baik, padahal tak dapat kita mungkiri bahwa beberapa daerah kita telah membuktikan dirinya sebagai bahasa budaya, bahasa ilmu dan bahasa sastra yang tinggi. Adalah kewajiban negara untuk memelihara ketinggian nilai budaya bahasa daerah itu agar berkembang karena Penjelasan UUD 1945 pun mengakui bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional.

Memelihara bahasa daerah yang sudah menunjukkan nilai budaya dan sastra yang tinggi sebagai kekayaan kebudayaan nasional bagi negara berarti harus secara konkret dan positif menjaga agar nilai-nilai budaya dan sastranya tetap terpelihara, tetap terpelihara bukan dalam arti tersimpan rapi dalam

museum dan hanya menjadi obyek studi saja, melainkan memeliharanya sedemikian rupa sehingga bahasa daerah tersebut tetap hidup dan sehat dan berkembang. Kalau tadinya bahasa daerah itu sudah mempunyai kekayaan karya sastra dan budaya yang tinggi, maka negara harus mengusahakan agar lahir pula karya-karya budaya dan sastra yang baru yang lebih tinggi dan lebih besar. Tentu saja negara yang mana pun tak dapat menciptakan sastrawan atau budayawan, tetapi pemerintah dapat menciptakan suatu situasi yang dapat mendorong tumbuhnya sastrawan dan budayawan. Menciptakan situasi yang mendorong tumbuhnya sastrawan dan budayawan dalam bahasa daerah (yang dipelihara oleh rakyatnya), bagi negara ialah mengusahakan agar penguasaan bahasa itu oleh generasi baru tetap terjaga dengan baik. Artinya, tak boleh membiarkannya terjatuh hanya semata-mata menjadi bahasa pergaulan belaka.

Usaha agar penguasaan bahasa itu oleh generasi baru tetap terjaga dilakukan melalui sekolah-sekolah, bukan saja dengan jalan mencantumkannya dalam kurikulum, melainkan juga menyediakan guru-gurunya yang baik, menyediakan buku-bukunya dalam perpustakaan, mengadakan usaha-usaha perangsang seperti sayembara-sayembara.

Khusus untuk tingkat universitas, perlu kiranya dipikirkan suatu perangsang berupa lapangan kerja yang menarik bagi mereka yang mengambil jurusan bahasa daerah. Sekarang jurusan bahasa daerah yang terdapat di beberapa universitas ternyata kurang, bahkan tidak mendapat perhatian dari mahasiswa atau calon mahasiswa karena tidak jelas arahnya, dan tidak jelas efek sosialnya — hal ini sebenarnya berlaku juga bagi jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Apabila pengajaran dan penelitian bahasa daerah akan diintensifkan, mungkin minat para mahasiswa kepada jurusan bahasa daerah pun akan meningkat, dan dengan demikian mudah-mudahan yang masuk ke jurusan bahasa daerah bukanlah hanya para (calon) mahasiswa yang tak dapat masuk ke jurusan lain.

Sebenarnya lapangan kerja yang membutuhkan keahlian bahasa daerah tidak akan kurang, asal saja Pemerintah dalam merencanakan pembangunan sadar bahwa pembangunan-ebudayaan pun patut mendapat prioritas. Agaknya setelah eksekutif-eksekutif yang sekarang sudah terasah oleh karena dalam rencana-rencana dahulu masalah kebudayaan (dan pendidikan) tidak mendapat perhatian yang layak, maka dalam masa-masa yang akan datang, Pemerintah akan menaruh perhatian yang lebih besar kepada soal-soal kebudayaan (dan pendidikan). Maka masalahnya yang pokok ialah mengusahakan agar apabila nanti Pemerintah telah mampu melihat persoalan kebudayaan sebagai persoalan yang lebih pokok dan dengan demikian menyediakan dana untuk itu, para ahli dalam bidang ini (termasuk dalam bidang sastra) harus sudah siap dengan rencana konkret.



dan supaya kita tidak lupa bahwa sebagian besar penduduk Indonesia adalah orang-orang desa yang mempunyai kemampuan dan kebiasaan dan kebutuhan yang "aneh" yang tak pernah kita pikirkan, bahkan tak masuk akal kita. Memang kenyataan lebih mengejutkan daripada angan-angan!

Betapa pun kenyataan itu dapat menjadi bahan pertimbangan apabila kita hendak menyusun politik pengembangan bahasa daerah. Mengapa? Karena usaha seperti penataran dan penyusunan kurikulum sekolah tak dapatlah diusahakan oleh pihak lain kecuali pemerintah, apabila pemerintah cukup realistis untuk memanfaatkan sarana yang ada, dalam hal ini bahasa daerah (yang masih dipelihara rakyatnya baik-baik) sebagai sarana pembangunan.

Sementara itu pemerintah pun harus pula menunjang dengan mendorong usaha-usaha yang sekarang ini dilakukan secara spontan oleh pihak rakyat daerah yang bersangkutan sebagai manifestasi pemeliharaan bahasa daerahnya. Yang saya maksudkan ialah usaha penulisan dan penerbitan dalam bahasa daerah. Surat kabar dalam bahasa daerah ternyata sulit hidupnya, mungkin terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa berita-beritanya semua harus diterjemahkan dari bahasa Indonesia sehingga umumnya kalah cepat oleh surat kabar dalam bahasa Indonesia, tetapi mungkin juga karena penggunaan bahasa daerah dalam surat-surat kabar itu buruk sekali sebagai akibat kurangnya tenaga wartawan yang dapat menyusun berita atau menterjemahkan berita yang cukup baik dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah. Umumnya wartawan-wartawan itu melakukan terjemahan kata demi kata, kurang mengenal idiom bahasa daerah yang bersangkutan sehingga membingungkan. Di luar dua kemungkinan itu, yang pasti persaingan dengan surat kabar dari Jakarta juga menjadi faktor yang mengawatkan kehidupan surat kabar berbahasa daerah — bahkan surat kabar daerah pada umumnya walaupun berbahasa Indonesia.

Kemampuan wartawan dalam menyusun berita dalam bahasa daerah, haruslah ditingkatkan. Kalau pihak masyarakat tak mampu menyelenggarakan usaha peningkatan itu, maka hal itu menjadi tugas pemerintah. Apalagi karena yang sekarang aktif menyiarkan berita-berita dalam bahasa daerah adalah studio-studio RRI yang menyelenggarakan siaran warta berita dalam bahasa daerah. Dalam rangka program "koran masuk desa", saya kira masalah ini akan menjadi lebih aktual lagi.

Sebaliknya majalah-majalah berbahasa daerah yang bersifat umum atau hiburan — pendeknya yang tidak mendasarkan dirinya kepada kecepatan berita — cukup banyak dan hidup segar atas dukungan masyarakat pemakai bahasa yang bersangkutan. Hal itu kelihatan dalam bahasa Jawa dan Sunda yang sekarang ini masing-masing mempunyai beberapa majalah mingguan, dua mingguan atau bulanan dengan oplah yang cukup lumayan.

Kalau kita perhatikan, walaupun majalah itu memuat juga karangan-karangan yang bersifat umum, misalnya penerangan tentang keluarga berencana, pewayangan, kebatinan, politik, dan ekonomi, tetapi sebagian besar isinya berupa cerita, baik cerita pendek, *feuilleton*, maupun cerita wayang atau cerita lama lainnya.

Juga apabila kita perhatikan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa daerah, maka akan nampak bahwa kecuali primbon-primbon dan cerita-cerita lama, yang baru umumnya merupakan roman atau kumpulan cerita pendek. Hal itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa mengenai banyak hal lain, misalnya untuk menulis karangan-karangan ilmiah, orang cenderung untuk tidak mempergunakan bahasa daerah. Biasanya mereka menulis dalam bahasa Indonesia — dan sekarang ada pula kecenderungan menulis dalam bahasa Inggris.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa kecenderungan yang sekarang kelihatan ialah bahwa masyarakat pemakai bahasa daerah yang bersangkutan telah menjurus ke arah pemakaian bahasa daerah yang tertulis, khususnya kepada penulisan yang bersifat ekspresi rohani atau hiburan. Penulisan kembali cerita-cerita lama dapat kita anggap sebagai usaha memelihara dan melanjutkan warisan kebudayaan yang bernilai kepada generasi yang kemudian.

Dalam kertas kerja saya mengenai pengembangan kesusastraan dalam Praseminar Politik Bahasa Nasional bulan Oktober yang lalu, saya telah mengemukakan pentingnya penterjemahan karya-karya bernilai yang ditulis dalam bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia agar dengan demikian kekayaan daerah ditingkatkan menjadi kekayaan nasional. Dalam lingkungan daerah yang bersangkutan usaha untuk memelihara kekayaan kebudayaan itu harus dilakukan juga dalam bahasa daerahnya, dengan catatan bahwa mengingat adanya perubahan-perubahan fundamental dalam visi mengenai hidup kemasyarakatan dalam lingkungan Republik Indonesia, dan mengingat pula bahasa lama yang sulit dicerminkan oleh generasi muda sekarang, maka untuk konsumsi bacaan anak-anak, perlu adanya usaha berencana mengenai penulisan kembali karya-karya tersebut dalam bahasa daerah yang baru. Apalagi kalau kita ingat bahwa banyak warisan kebudayaan daerah itu yang masih belum lagi dituliskan sehingga usaha berencana untuk merekam dan mendokumentasikan kekayaan rohani daerah itu harus dilaksanakan segera.

Dalam usaha mengembangkan kreativitas yang diekspresikan dalam bahasa daerah, dan memupuk serta mendorong usaha-usaha penerbitan bahasa daerah yang selama ini dilaksanakan oleh pihak swasta dan mengingat pula kebutuhan akan bacaan dalam bahasa daerah di daerah yang bersangkutan, maka pihak pemerintah harus memasukkan buku-buku berbahasa daerah

dalam rangka mengisi perpustakaan baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa (yang sampai sekarang belum ada), misalnya melalui Proyek Inpres Pendidikan dan Pelita Perpustakaan.

### III. Bahasa Daerah yang Mana?

Menurut informasi terakhir dari pihak Lembaga Bahasa Nasional, ternyata bahasa daerah di seluruh wilayah Indonesia itu berjumlah bukan hanya kira-kira 250, tetapi kira-kira 400. Tentu saja masing-masing mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, demikian juga jumlah pemakainya, ada yang puluhan juta, ada pula yang hanya beberapa ratus kepala saja.

Kenyataan itu menyebabkan siapa pun yang harus membuat kebijaksanaan tentang bahasa daerah bertanya: Bahasa daerah yang mana yang harus dikembangkan? Apakah ke-400 bahasa itu semuanya harus dikembangkan? Bagaimana pula caranya, karena kebanyakan bahasa-bahasa itu bukan saja belum diselidiki karena belum ada ahlinya, tetapi juga belum mengenal tulisan.

Penjelasan UUD 1945 memberikan batasan bahwa negara akan memelihara hanya bahasa-bahasa yang dipelihara rakyatnya dengan baik-baik saja. Tapi masalahnya apakah batasan "dipelihara rakyatnya dengan baik-baik" itu? Apakah hanya yang sudah mempunyai bahasa tertulis saja? Kalau demikian, berapa banyak bahasa daerah di Indonesia yang sudah mempunyai bahasa tertulis? Saya kira mengenai hal ini pun belum lagi diadakan penelitian. Apakah bahasa yang belum mengenal tulisan itu berarti tidak dipelihara rakyatnya? Dan bagaimanakah menentukan apakah suatu bahasa dipelihara rakyatnya atau tidak? Bukankah mungkin bahwa bahan daerah yang belum mengenal tulisan pun dipelihara oleh rakyatnya dengan baik? Apalagi kalau kita ingat bahwa ada ucapan-ucapan adat dan bentuk kesenian atau tata cara yang tetap hidup dan dipelihara oleh rakyat yang bersangkutan di daerahnya yang tak dapat dipisahkan dari penggunaan bahasa.

Di samping itu harus pula kita ingat bahwa walaupun rakyat pemakai suatu bahasa daerah kelihatannya tidak memelihara bahasa itu, belumlah berarti bahwa mereka tidak mau memeliharanya. Mungkin sebenarnya mereka mau memeliharanya tetapi tidak atau belum mendapat kesempatan untuk melakukannya.

Karena itu sebaiknya diputuskan saja dahulu suatu kebijaksanaan umum dalam menetapkan bahasa-bahasa yang akan dipelihara oleh negara secara konkret. Misalnya, dengan menetapkan bahwa bahasa-bahasa daerah yang akan dipelihara oleh negara, dalam arti dibina dan dikembangkan, adalah bahasa-bahasa daerah yang telah mempunyai bahasa tulisan saja dahulu, dengan catatan bahwa dalam jangka waktu lima atau sepuluh tahun hal itu

akan ditinjau kembali sehingga mungkin jumlah bahasa daerah yang akan dipelihara itu akan berubah-bertambah atau berkurang. Sementara itu, usaha penelitian bahasa daerah, baik yang sudah mengenal tulisan maupun yang belum, harus dilakukan dengan intènsif, baik berupa perekaman cerita rakyat maupun pengumpulan dan penyalinan naskah-naskah kuna, sehingga dengan demikian kita benar-benar merawat kekayaan kebudayaan kita sendiri. Jangan sampai usaha semacam itu kita serahkan sepenuhnya kepada belas kasihan sarjana-sarjana asing dengan topangan yayasan-yayasan asing pula.

#### IV. Kesimpulan

Akhirnya saya ingin menyimpulkan segala apa yang sudah saya kemukakan itu sebagai berikut :

1. Perlu ditetapkan suatu batasan mengenai bahasa-bahasa daerah yang mana yang dimaksudkan dalam Penjelasan UUD 1945 pasal 36 dengan "bahasa daerah yang dipelihara rakyatnya dengan baik-baik", misalnya bahasa yang sudah mempunyai tulisan dahulu, atau bagaimana, dengan catatan bahwa setiap lima atau sepuluh tahun ketetapan itu akan ditinjau kembali sehingga jumlahnya dapat berubah.
2. Dalam mengamalkan penjelasan UUD 1945 yang berbunyi: "... akan dihormati dan dipelihara juga oleh Negara", pemerintah bukan hanya harus menjadikan bahasa daerah itu obyek studi bahasa yang sudah mati atau sebagai mata pelajaran pilihan, melainkan harus memasukkannya ke dalam kurikulum sejak sekolah dasar sebagai mata pelajaran penting di daerah yang bersangkutan. Anggapan bahwa meskipun bahasa daerah tidak diajarkan di sekolah-sekolah, anak-anak pasti akan menguasainya adalah keliru, dan akibatnya hanya menurunkan derajat bahasa daerah yang sudah menjadi bahasa sastra dan budaya menjadi bahasa pergaulan belaka. Dengan mempelajarinya secara teratur penguasaan bahasa daerah si anak akan lebih baik, dan penguasaan bahasa daerah yang baik akan baik pula manfaatnya bagi penguasaan bahasa Indonesia si anak itu.
3. Perlu adanya suatu penelitian yang cermat dan menyeluruh mengenai pengaruh bahasa daerah kepada perkembangan kecerdasan dan kejiwaan si anak didik, sebelum mengubah pemakaian bahasa daerah (bahasa ibu) sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Mungkin dari hasil penelitian itu, kita harus mengambil kebijaksanaan yang berbeda untuk setiap daerah, atau untuk suatu lingkungan kebudayaan tertentu (kota dan pedesaan), dan lain-lain.
4. Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu membentuk suatu panitia yang terdiri dari para ahli yang bertugas mengumpulkan dan

mempelajari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai universitas dan IKIP, juga lembaga-lembaga lainnya atau perseorangan, berkenaan dengan masalah penggunaan dan pengajaran bahasa daerah (dan bahasa Indonesia juga).

5. Agar pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah berjalan baik, tidak cukup apabila kita hanya mencantumkannya dalam kurikulum, melainkan kita juga harus menyediakan guru-guru dan buku-buku dalam perpustakaan sekolah dan menjadikannya mata pelajaran ujian. Untuk pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah itu guru harus mendapat perhatian istimewa.
7. Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa daerah sebagai alat komunikasi (lisan) yang praktis dalam bidang penerangan pedesaan, maka perlu adanya penataran berbahasa daerah yang baik bagi para pamong desa dan para pejabat pemerintah yang bertugas untuk memberi penerangan pedesaan seperti dari Jawatan Pertanian, dan Penerangan. Mata pelajaran bahasa daerah perlu dicantumkan dalam kurikulum sekolah-sekolah yang berada dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, seperti Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.
8. Untuk lebih merawat dan memelihara warisan kebudayaan yang ditulis dalam bahasa daerah, pemerintah harus secara berencana mengadakan penelitian-penelitian. Dan di samping harus diperkenalkannya ke lingkungan nasional melalui terjemahan atau saduran dalam bahasa Indonesia, juga perlu dituliskan kembali dalam bahasa daerah yang bersangkutan dalam bentuk yang lebih supaya visinya lebih sesuai dengan lingkungan negara Republik Indonesia.
9. Untuk mendorong dan merangsang penulisan dan penerbitan berbahasa daerah, dan supaya lebih mengakrabkan warisan kebudayaan yang ditulis dalam bahasa daerah, pemerintah harus memasukkan buku-buku bahasa daerah ke dalam program pembelian buku pengisi perpustakaan seperti Proyek Inpres Pendidikan dan Proyek Pelita Perpustakaan. Pemerintah pun harus menyediakan hadiah atau anugerah kepada pengarang-pengarang berbahasa daerah di samping para pengarang yang menulis dalam bahasa Indonesia.
10. Perlu adanya suatu usaha untuk mengadakan penataran bahasa daerah bagi para wartawan yang hendak berkecimpung dalam pers berbahasa daerah, terutama sehubungan dengan program "koran masuk desa".

**9**

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI  
BAHASA ASING DI INDONESIA**

**GIRI KARTONO**

## 1. Pendahuluan

Di dalam kertas kerja yang pendek dan sederhana ini saya mencoba mengemukakan pendapat saya pribadi mengenai kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa asing di Indonesia dengan menitik-beratkan fungsi bahasa asing yang mempunyai implikasi langsung bagi pengajaran di sekolah-sekolah dan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pembahasan pendapat saya ini didasarkan kepada pola pemikiran sosiolinguistik dan hasil studi perbandingan serta analisa sumber bacaan yang masih sangat terbatas jumlahnya. Semoga pendapat saya ini dapat menambah bahan seminar yang saya percaya telah saudara-saudara miliki.

## 2. Fungsi Bahasa

Biarpun masih belum ada kesempatan di antara para ahli bahasa mengenai perincian ciri-ciri bahasa, sebagian besar di antara mereka telah sepakat mengenai ciri-ciri bahasa yang dasar termasuk fungsi bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi manusia baik secara tertulis maupun lisan (Wardhaugh; 1972: 3-8). Fungsi bahasa ini mencakup lima fungsi dasar yang menurut Kinneavy disebut *expression, information, exploration, persuasion* dan *entertainment* (Michel, 1967: 51). Tiga dari kelima fungsi bahasa ini, menurut pendapat saya, merupakan fungsi yang penting untuk memenuhi kebutuhan kita. Dari pandangan ilmu bahasa, fungsi bahasa yang hakiki inilah yang harus selalu mendasari pembicaraan-pembicaraan mengenai semua masalah kebahasaan, termasuk kedudukan dan status suatu bahasa. Dalam hubungan ini yang saya maksud ialah bahasa asing. Di samping ciri-ciri bahasa yang umum kita tidak boleh melupakan kenyataan bahwa bahasa merupakan satu unsur kebudayaan dalam arti yang luas, bahkan bahasa adalah satu dengan kebudayaan sehingga sebenarnya kita dalam beberapa hal tidak dapat memisahkan bahasa terlepas dari masalah kebudayaan penutur asli bahasa itu. Terlepas dari fakta ini, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, ada di antara para ahli yang mencoba membahas, menganalisa, dan memisahkan bahasa dengan tidak atau sedikit-tidaknya mengurangi keterlibatan unsur kebudayaan. Dengan tidak mengurangi fungsi bahasa yang hakiki, fungsi bahasa asing di Indonesia, menurut hemat saya, harus didasarkan pertamata-tama atas program pembangunan pemerintah.

## 3. Arti Bahasa Asing

Saya kira kita semua dapat menyetujui bahwa yang dimaksud dengan bahasa asing untuk Indonesia ialah semua bahasa kecuali bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah. Bahasa asing dipakai oleh orang Indonesia yang menguasainya apabila diperlukan, dan tidak dipakai baik sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, bahasa resmi negara maupun sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Dengan demikian bahasa asing hanya dipakai pada saat tertentu apabila bahasa Indonesia dan bahasa daerah tidak dapat dimengerti. Atas dasar itu, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, Rusia, Perancis,

Arab, Vietnam, Tagalog dan lain-lain adalah bahasa asing untuk orang Indonesia.

Pengertian bahasa asing tersebut jelas tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Bab 15 Pasal 36 dan penjelasannya. Dalam hubungan dengan status bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah, perlu kiranya kita membedakan secara jelas istilah "bahasa asing" (*foreign language*) dan "bahasa kedua" (*second language*) karena untuk situasi tertentu seperti di dalam bidang pengajaran, beberapa ahli pengajaran bahasa mempergunakan kedua istilah tersebut sebagai istilah yang identik. Bahasa Inggris di Pilipina, Malaysia, Singapore, dan India berstatus sebagai "bahasa kedua" di samping berkedudukan sebagai bahasa resmi. Sebaliknya, bahasa Inggris di Thailand, Jepang, dan Indonesia berstatus sebagai bahasa asing dan bukan bahasa kedua. Untuk orang-orang imigran di Amerika Serikat bahasa Inggris adalah bahasa kedua dan tidak disebut sebagai bahasa asing.

Di samping itu, apabila kita mendasarkan interpretasi istilah "bahasa kedua" atas urutan saat permulaan belajar bahasa, maka bahasa Indonesia bagi saya dan mungkin bagi sebagian besar para hadirin yang ada di ruangan ini adalah bahasa kedua, sedangkan bahasa Inggris merupakan bahasa yang ketiga. Istilah bahasa pertama dan bahasa kedua dalam arti yang diterangkan di atas memang tidak lazim dipakai di Indonesia karena istilah tersebut secara psikologis menurunkan status bahasa nasional yang sebenarnya dapat disebut sebagai bahasa pertama dalam arti bahwa bahasa Indonesia mempunyai status terpenting.

#### 4. Fungsi dan Kedudukan Bahasa Asing

Seperti telah disebutkan di atas, fungsi bahasa asing secara umum harus didasarkan kepada tujuan pendidikan, yaitu mencetak manusia Pancasila yang trampil dalam membangun. Dengan demikian, bahasa asing harus dikuasai sedemikian rupa sehingga dapat dipakai *sebagai alat untuk membantu mempercepat proses pembangunan negara dan bangsa* biarpun secara tidak langsung. Penguasaan bahasa asing harus pula dapat membantu mewujudkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, termasuk mengadakan persahabatan dengan semua negara di dunia. Apabila kita memperhatikan dasar-dasar saran UNESCO No. 59 kepada Menteri-menteri Pendidikan yang diputuskan dalam konferensi internasional mengenai pendidikan tanggal 23 Juli 1965, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa penguasaan satu bahasa asing bagi warga dunia adalah sangat penting. Pertimbangan saran-saran UNESCO tersebut (UNESCO, 1965: 299) antara lain:

Considering that the knowledge of one or more modern foreign languages is a part of the pupil's general culture and intellectual training at least in the same way as other subjects in the secondary school curriculum . . . . .  
Considering that the knowledge of modern foreign language accelerates the spread of scientific and technical discoveries, thereby contributing

effectively to the economic and cultural development of the countries . . . . .

Di samping dasar tujuan tersebut, kita tidak boleh melupakan faktor-faktor lain yang akan menentukan urutan bahasa asing yang harus dipelajari menurut prioritas. Faktor-faktor yang menentukan di dalam pemilihan bahasa asing antara lain ialah faktor politik, keagamaan, kebudayaan, dan ekonomi. Mengenai kedudukan bahasa-bahasa asing, mengingat bunyi Undang-Undang Dasar 45, Bab 15 pasal 36, dan mengingat fungsi bahasa-bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, maka jelas bahwa bahasa asing menempati kedudukan nomor tiga di dalam urutan menurut kegunaannya, yaitu setelah bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Kalau kita perhatikan fungsi dan tujuan bahasa asing di sekolah menengah di Amerika Serikat, misalnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam kenyataannya yang diutamakan ialah memenuhi untuk mendapatkan gelar, biarpun sudah mulai ada kecenderungan di beberapa universitas untuk menghapuskan syarat tersebut.

## 5. Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing Pertama

Karena kenyataan bahwa bahasa nasional kita pada saat ini belum dapat dipakai sebagai alat komunikasi dengan dunia luar dalam rangka politik luar negeri dan untuk menjalin persahabatan dengan bangsa-bangsa lain, dan kenyataan bahwa bahasa Inggris mempunyai kurang lebih 300 juta penutur asli dan telah menjadi bahasa komunikasi internasional, bahasa ilmu pengetahuan, teknologi modern, perdagangan, politik, dan dipakai hampir di semua bidang, maka bahasa Inggris jelas harus diberi prioritas pertama untuk dipelajari di antara bahasa-bahasa asing yang lain.

Untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern demi kemajuan dan pembangunan negara kita diperlukan bahasa yang ampuh. Karena bahasa Inggrislah yang sampai dewasa ini dan untuk masa mendatang tampaknya masih akan tetap merupakan bahasa ilmu pengetahuan, maka sudah selayaknya bahasa Inggris mendapat tempat yang terpenting di antara bahasa-bahasa asing lainnya itu. Demi suksesnya program lembaga-lembaga pendidikan tinggi, jelas tidak ada bahasa asing lainnya yang efektif kecuali bahasa Inggris untuk menggali ilmu pengetahuan yang terpendam di perpustakaan-perpustakaan. Pertimbangan inilah yang antara lain dijadikan dasar surat keputusan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.096/1967 tanggal 12 Desember 1967, yang menetapkan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa asing yang pertama. Sebenarnya jauh sebelum surat keputusan tersebut dikeluarkan, yaitu di dalam tahun 1955, Kepala Inspeksi Pengajaran Bahasa Inggris, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sudah menggariskan fungsi bahasa Inggris di Indonesia. (Gregory, 1964: 18):

As for its function, English is not and will never be a social language in the Indonesian community. Neither is it nor will it be the second official

language in the administration of the administration of this country.  
... It is no more and no less than the "first foreign language"

Sehubungan dengan surat keputusan tersebut di atas, pertanyaan yang kadang-kadang timbul adalah sebagai berikut. Kalau bahasa Inggris hanya akan diperlukan untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi modern pada tingkat pendidikan tinggi, apakah bahasa Inggris perlu diajarkan di sekolah-sekolah menengah kejuruan karena dalam kenyataannya sebagian besar tamatan sekolah tersebut tidak melanjutkan pelajaran mereka ke lembaga pendidikan tinggi? Menurut pendapat saya, di samping kita memerlukan bahasa Inggris untuk tingkat pendidikan tinggi, kita tetap harus mengajarkan bahasa Inggris di sekolah-sekolah menengah kejuruan untuk memberikan bekal kepada tamatan sekolah-sekolah itu agar mereka dapat memakai bahasa Inggris sebagai alat untuk memperdalam pengetahuan atau ketrampilan mereka sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Walaupun data mengenai jumlah tamatan sekolah kejuruan yang memerlukan penguasaan bahasa Inggris yang sederhana belum ada, saya berpendapat bahwa masalah penguasaan bahasa Inggris yang sederhana ini tidak dapat kiranya diserahkan Pemerintah begitu saja kepada pihak swasta atau kursus-kursus.

Saya mengetahui bahwa ada segolongan orang yang berpendapat bahwa pengajaran bahasa Inggris di sekolah menengah kejuruan sebenarnya tidak perlu karena diperkirakan persentase jumlah tamatan sekolah kejuruan yang benar-benar memerlukan bahasa Inggris sangat rendah. Dengan demikian pengajaran bahasa Inggris di sekolah menengah kejuruan menurut pendapat mereka akan sia-sia belaka dan merupakan pemborosan. Di samping pendapat ini banyak pula di antara kita yang menafsirkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.096/1967 dengan mengatakan bahwa tujuan pengajaran bahasa Inggris sebagai *working knowledge* yang diperinci menjadi empat ketrampilan bahasa itu memang diperlukan sekali terutama oleh mahasiswa. Jadi secara jelas disebutkan bahwa pengajaran bahasa Inggris tidak semata-mata merupakan kepentingan mahasiswa. Dengan demikian pengajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah kejuruan tidak bertentangan dengan surat keputusan itu. Mungkin untuk menghilangkan keragu-raguan bagi sebagian orang perlu kiranya dikeluarkan kebijaksanaan yang menggariskan dasar pemikiran pengajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah kejuruan. Salah satu alternatif ialah bahwa bahasa Inggris diajarkan di sekolah-sekolah kejuruan sebagai mata pelajaran pilihan.

Sebenarnya ada kecenderungan di antara beberapa orang untuk menyarankan agar bahasa Inggris di sekolah menengah pun dijadikan mata pelajaran pilihan. Kecenderungan ini didasarkan pula atas kenyataan bahwa hanya sebagian kecil tamatan sekolah menengah yang dapat melanjutkan pelajaran mereka ke perguruan tinggi, dan ada masalah-masalah yang timbul sebagai akibat ditetapkannya pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib.

## 6. Status dan Fungsi Bahasa Asing yang Lain

Mengenai bahasa asing yang lain, sampai pada saat ini belum ada surat keputusan yang menetapkan fungsi dan pengajarannya di sekolah-sekolah menengah kecuali kebijaksanaan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum. Hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan bahasa asing mana yang perlu diajarkan pertama-tama ialah kegunaan bahasa tersebut sebagai alat untuk membantu mempercepat pengembangan teknologi modern, khususnya untuk memahami buku-buku rujukan pada perguruan tinggi. Untuk ini bahasa Jerman merupakan bahasa yang dapat menempati tempat kedua setelah bahasa Inggris. Biarpun penelitian belum pernah diadakan mengenai berapa persen buku-buku pada tingkat perguruan tinggi yang ditulis dalam bahasa Jerman, sudah dapat dipastikan bahwa bahasa Jerman merupakan bahasa teknologi dan ilmu pengetahuan yang penting di samping bahasa Inggris.

Di samping kedua bahasa tersebut masih banyak bahasa-bahasa asing yang harus kita pertimbangkan untuk dapat diajarkan di sekolah-sekolah menengah. Khususnya bahasa Prancis memang sudah lama diajarkan di jurusan bahasa pada sekolah-sekolah menengah tingkat atas. Nampaknya dasar yang dipakai untuk mempertimbangkan dimasukkannya kedua bahasa asing tersebut (Jerman dan Prancis) ke dalam kurikulum sekolah menengah ialah pertimbangan praktis, yaitu gurunya relatif mudah dicari dan sudah sejak zaman Belanda kedua bahasa itu diajarkan.

Salah satu bahasa asing yang perlu pula kita pertimbangkan untuk diajarkan di sekolah-sekolah menengah jurusan bahasa ialah bahasa yang dipakai oleh bangsa yang mulai memegang peranan penting di dalam bidang ekonomi dan industri di dunia. Bahasa yang saya maksud ialah bahasa Jepang. Terlepas dari ketidaksamaan pendapat dalam hal-hal tertentu, kita harus berani mengakui kenyataan bahwa pengaruh negara Jepang di dalam bidang industri dan ekonomi makin terasa di mana-mana.

Biarpun bahasa-bahasa asing yang lain seperti Rusia, Cina, dan Arab masih belum terasa kegunaannya yang penting di dunia, untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas tertentu perlu kiranya dipikirkan langkah-langkah untuk mendidik kader-kader untuk mengajarkannya. Bidang intelijen, kepariwisataan, diplomatik, militer, terjemahan, dan sebagainya adalah bidang-bidang yang memerlukan tenaga-tenaga yang menguasai bahasa asing lainnya di samping bahasa Inggris. Dalam hubungan dengan bahasa-bahasa yang tidak mempunyai daya tarik tetapi sebenarnya diperlukan khususnya oleh instansi Pemerintahan, perlu kiranya dipikirkan kemungkinan memberikan bantuan atau bea siswa kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mempelajari bahasa asing tersebut.

## 7. Kapan Bahasa-bahasa Asing Diajarkan

Menurut hemat saya, bahasa Inggris tetap diajarkan mulai dari tingkat sekolah lanjutan pertama, biarpun pada prinsipnya menurut pertimbangan

didaktik dan metodik pengajaran bahasa, makin muda usia anak makin mudah mereka mempelajari bahasa yang baru. Tetapi karena pertimbangan psikologis dan untuk menghindari adanya interferensi bahasa di dalam keadaan yang multilingual, terutama karena bahasa Indonesia masih memerlukan waktu untuk dipelajari dengan baik, maka sebaiknya pelajaran bahasa asing tidak dimulai di sekolah dasar. Dalam hubungan ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menunggu hasil yang konkret dari pengajaran yang diadakan di SD Percobaan di IKIP Malang. Kita semua pasti tertarik kepada hasil sementara yang menunjukkan bahwa justru pelajaran bahasa Inggris pada tingkat sekolah dasar itu memberikan efek yang positif terhadap kemahiran anak-anak dalam bahasa Indonesia terutama dalam karang-mengarang. (Lihat Kumpulan Karangan IKIP Malang, 1974: 59).

Saya condong untuk menyarankan agar semua bahasa asing kecuali bahasa Inggris diajarkan pada tingkat sekolah menengah atas, dan sebagai mata pelajaran pilihan untuk jurusan di luar bidang bahasa dan sebagai mata pelajaran wajib untuk jurusan bahasa. Menurut pendapat saya, apabila pada suatu ketika benar-benar dirasakan perlunya pengajaran bahasa-bahasa asing di samping bahasa Inggris di sekolah menengah pertama, keputusan itu harus didasarkan atas hasil penelitian.

## 8. Penutup

Dengan memperhatikan uraian di atas, jelas bahwa bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, menduduki tempat yang ketiga di dalam urutan atas dasar pentingnya di dalam pemakaian dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pengajaran bahasa asing harus didasarkan atas tujuan penguasaan bahasa sebagai alat. Perlu kita sadari bahwa untuk menjadikan bahasa asing alat yang dapat diandalkan perlu dicari metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan tersebut. Khususnya mengenai bidang pengajaran bahasa asing tentunya akan dibicarakan secara mendalam oleh Dr. Retmono. Tetapi salah satu aspek yang penting dalam pengajaran bahasa ialah latihan memakai bahasa yang sedang dipelajari itu pada situasi yang tepat, termasuk di dalamnya unsur *reinforcement*. Unsur inilah yang kadang-kadang dapat menimbulkan ketakutan pada beberapa orang bahwa bahasa Inggris dapat mendesak kedudukan bahasa Indonesia. Kekhawatiran seperti ini saya kira tidak perlu ada. Bahasa Indonesia tidak mungkin terdesak oleh bahasa asing selama kedudukan dan fungsi bahasa asing di negara kita ini tetap tidak berubah, yaitu sebagai bahasa asing. Apalagi kalau kita melihat kenyataan bahwa faktor-faktor yang langsung ataupun tidak langsung, resmi dan tidak resmi, memupuk atau memaksa pertumbuhan bahasa nasional kita, jumlahnya jauh lebih banyak dari faktor-faktor negatif yang dapat menghambat atau menahan, yang timbul karena bahasa asing. Demi kemajuan bangsa, dan demi terciptanya persahabatan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, marilah kita bersama membasmi benih-benih yang mungkin timbul menjadi "*exolingua-phobia*" ataupun "*linguistic schizophrenia*". Akhirnya, perkenankanlah saya

mengutip kalimat Ferguson (1966, 24): "It must be recognized . . . that language policies . . . are not determined simply on the line of rational analysis. In fact, decision on language questions are notoriously influenced by emotional issues . . ."

## Daftar Pustaka

- Chastain, K. 1971. *The Development of Modern Language Skills: Theory to Practice*. Philadelphia: The Center for Curriculum Development, Inc.
- Fishman, Joshua A. 1971. *Sociolinguistics*. Rowley: Newbury House Publishers.
- Gregory, O.D. 1964. *Three Projects in English Instruction in Indonesia*. Jakarta.
- IKIP Malang, 1974. "Kumpulan Karangan, Penerbitan Khusus Dalam Rangka Lustrum IV".
- Kartono, Giri. 1973. "A Study of Several Development Factors in the Revision and Updating of the National English Language Program in Indonesia." Disertasi. The University of Texas.
- Lev, Daniel S. 1961. *A Brief Review of Foreign Assistance in Indonesia's English Language Program*. Jakarta.
- Marckwardt, A.H. dan Randolph Quirk. 1965. *A Common Language*. Washington, D.C.: U.S.I.S.
- Michel, J. 1967. *Foreign Language Teaching*. New York: The Mac Millan Company.
- Perren. G.P. 1968. *Teacher of English as a Second Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- UNESCO. 1971. *Regional Meeting of Experts on Teaching of English in Asia*. Tokyo: Japanese National Commission for UNESCO.
- Rivus, W.M. 1968. *Teaching Foreign Language Skills*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Thomas, R.M. 1968. *Strategies for Curriculum Change: Cases from 13 Nations*. Seraton International Textbook Coy.
- Vaidman, A. 1966. *Trends in Language Teaching*. New York: Mc. Grawn Hill Book Company.
- Wardhaugh, R.V. 1972. *Introduction to Linguistics*. New York: mc Grawn Hill Book Company.
- Ferguson, C.A. 1966. "On Sociologically Oriented Language Surveys". *The Linguistic Reporter*. Vol. VIII, No. 4.

**10**

**PENGAJARAN BAHASA ASING  
DALAM RANGKA POLITIK  
BAHASA NASIONAL**

**RETMONO**

## Pendahuluan

Kertas kerja ini diawali dengan permohonan agar hendaknya peranan pengajaran bahasa asing di dalam rangka politik bahasa nasional jangan terlalu dibesar-besarkan. Artinya, letakkanlah pengajaran bahasa asing di tempat yang sewajarnya, yaitu sebagai alat pembantu dalam mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kemajuan teknologi modern, sebagai alat komunikasi dengan bangsa-bangsa lain, dan sebagai alat untuk memperkenalkan kebudayaan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia kepada dunia. Dengan kata lain, bahasa-bahasa asing hendaknya dipakai apabila bahasa Indonesia tidak atau belum dapat menjalankan fungsinya. Perlu dijelaskan di sini bahwa apa yang saya sarankan di atas adalah dalam rangka pengajaran bahasa asing secara resmi, melalui apa yang disebut pendidikan formal. Usaha seseorang atau kelompok untuk mempergunakan bahasa asing di luar saran tersebut sepenuhnya menjadi hak yang bersangkutan.

Yang ingin kita hindarkan ialah terbentuknya manusia-manusia Indonesia yang tidak dapat berfikir atau berbicara bilamana tidak memakai bahasa asing, karena seharusnya mereka dapat berfikir dan berbicara dalam bahasa nasionalnya. Sebaliknya, kita juga tidak menghendaki timbulnya anak-anak yang sukar mengembangkan pengetahuan dan pandangannya hanya oleh karena ketidak mampuannya mempergunakan bahasa asing.

Dewasa ini hampir semua negara mencantumkan pengajaran bahasa asing di dalam sistem pendidikannya yang resmi. Hal ini dapat dimengerti karena di dalam memenuhi kebutuhannya pada abad ke-20 ini, semua negara merasakan mutlaknya hubungan dengan dunia luar, baik di bidang politik, ekonomi maupun di bidang kebudayaan. Bahkan negara-negara yang menganut ideologi yang bertentangan dengan negara lain yang memakai bahasa tertentu mencantumkan bahasa tersebut di dalam program pengajaran bahasa asingnya.

Di dalam penerapannya di Indonesia, tentu saja kita harus menempatkan pengajaran bahasa asing sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang nyata. Untuk lebih menjabarkan apa yang saya utarakan di atas, maka judul kertas kerja ini, "Pengajaran Bahasa Asing dalam Rangka Politik Bahasa Nasional", dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang berbentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa bahasa asing diajarkan dan dipelajari?
2. Siapa yang memerlukan pengajaran bahasa asing?
3. Ketrampilan apa yang diinginkan dalam pengajaran bahasa asing?
4. Cara apa sebaiknya yang dipakai dalam mengajarkan bahasa asing?

## Mengapa Bahasa Asing Diajarkan dan Dipelajari

Banyak alasan yang dipakai oleh seseorang untuk mempelajari bahasa asing atau bahasa lain. Ada yang mempelajarinya karena terpaksa, ada yang mempelajarinya oleh karena dorongan yang kuat untuk memperoleh imbalan yang lebih baik, dan ada pula yang mempelajarinya untuk kesenangan pribadi. Tetapi sebagian besar murid-murid kita mempelajari bahasa asing karena mata pelajaran tercantum dalam pelajaran sekolahnya. Oleh karena itu kita harus mempunyai alasan yang kuat mengapa bahasa tersebut diajarkan kepada mereka.

Bilamana kepada pengajar-pengajar bahasa asing ditanyakan mengapa bahasa asing tersebut diajarkan di sekolah, maka akan diperoleh bermacam-macam jawaban. Beberapa di antara jawaban-jawaban itu mungkin adalah sebagai berikut: Untuk mengembangkan kemampuan kecerdasan seorang anak melalui pengajaran bahasa asing; untuk memperkaya pengalaman budaya murid melalui karya-karya budaya yang ditulis di dalam bahasa asing; untuk menambah pengertian murid mengenai bagaimana bahasa itu berfungsi, dan dengan demikian memperoleh kesadaran yang lebih mendalam tentang bahasanya sendiri; untuk memberikan kepada murid ketrampilan membaca di dalam bahasa asing itu sehingga ia dapat mengikuti tulisan-tulisan ilmiah di bidangnya masing-masing dan informasi mengenai berbagai-bagai hal; untuk membawa murid ke arah pengertian yang lebih mendalam tentang bahasa lain dengan jalan memberikan keterangan-keterangan mengenai cara hidup bangsa tersebut. Salah satu atau beberapa jawaban tersebut di atas dapat dijadikan tujuan pengajaran bahasa asing di sekolah lanjutan.

Sekarang ini kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan begitu pesatnya, dan sekolah-sekolah lanjutan selalu didesak untuk setiap waktu menyesuaikan kurikulumnya dengan kemajuan ini. Perkembangan yang cepat dari bidang-bidang studi dan penambahan informasi baru yang bertubi-tubi dari bidang yang telah ada menurut diberikannya pengetahuan dasar yang telah ada menuntut diberikannya pengetahuan dasar yang bermacam-macam di tingkat sekolah lanjutan. Namun jumlah jam pelajaran seminggunya di sekolah lanjutan tetap tidak berubah. Untuk ini kurikulum secara terus-menerus diubah sesuai dengan kebutuhan sekarang ini masa mendatang. Jadi, alasan menempatkan suatu mata pelajaran dalam kurikulum sekolah lanjutan karena hal ini telah berlangsung sejak dahulu sesudah tak dapat diterima lagi. Setiap mata pelajaran harus dapat dipertanggungjawabkan kehadirannya dan dipertimbangkan penempatannya dengan mata-mata pelajaran yang lain.

Salah satu alasan penempatan mata pelajaran bahasa asing dalam kurikulum sekolah lanjutan ialah kegunaannya yang praktis kelak dalam

kehidupan murid. Apabila bahasa asing yang diajarkan adalah bahasa yang banyak dipakai dalam pergaulan dunia dan kerap dipergunakan dalam hubungan dengan penutur asli dan bangsa-bangsa lain yang berkunjung ke negara murid, maka alasan kegunaan praktis dapat diterima. Tak dapat disangkal lagi bahwa kemampuan mempergunakan salah satu bahasa asing yang dipakai dalam hubungan internasional akan berguna dalam karier seseorang di lapangan perdagangan, perekonomian perwakilan internasional, korps diplomatik, persuratkabaran, dan lain-lainnya. Selain kepentingan negara perlu pula adanya sekelompok orang yang dapat berhubungan dengan bangsa lain dengan memakai bahasa ibu bangsa tersebut. Letak geografis, hubungan internasional, dan kebudayaan suatu negara akan menentukan bahasa asing mana yang dapat dipertimbangkan untuk diajarkan di sekolah menengah.

Khusus untuk Indonesia, ada pendapat yang menyatakan bahwa bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Inggris, perlu diajarkan di sekolah-sekolah lanjutan karena masih banyak kegiatan di perguruan tinggi yang memerlukan bahasa asing, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pendapat ini tercermin pula dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 096, tanggal 12 Desember 1967, yang menggariskan tujuan pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing pertama, disertai dengan urutan ketrampilan yang dikehendaki. Urutan ketrampilan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan:

1. membaca buku-buku dalam bahasa Inggris yang masih banyak dipergunakan di perguruan-perguruan tinggi;
2. mengikuti dan memahami kuliah-kuliah yang diberikan dalam bahasa asing dan oleh pengajaran-pengajaran tamu;
3. menulis catatan-catatan di dalam kelas yang mempergunakan bahasa asing
4. memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada bangsa asing; dan
5. berkomunikasi dengan guru dan mahasiswa asing serta orang asing pada umumnya.

Bila kita teliti kebutuhan-kebutuhan yang tercantum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah lanjutan terutama diperuntukan bagi mereka yang akan meneruskan pelajarannya ke perguruan tinggi, padahal kita mengetahui bahwa pada akhir Repelita I, dari sejumlah 1,5 juta pelajar sekolah lanjutan pertama, hanya 0.9 juta yang dapat ditampung di sekolah-sekolah lanjutan atas. dan dari jumlah tersebut, hanya 22% yang akhirnya dapat ditampung atau mampu meneruskan pelajarannya ke perguruan tinggi. Pertanyaannya sekarang ialah: apakah pengajaran bahasa asing di sekolah lanjutan yang akhirnya hanya akan langsung bermanfaat bagi kurang lebih 200.000 calon mahasiswa saja dapat dipertanggungjawabkan?

## Siapa Memerlukan Pengajaran Bahasa Asing

Bila program pengajaran bahasa asing didasarkan semata-mata atas kebutuhan murid yang nyata dan praktis, maka jawaban atas pertanyaan kedua di atas ialah bahwa hanya mereka yang terbukti mempunyai kecerdasan yang tinggi untuk dapat masuk ke perguruan tinggi patut mendapat pelajaran bahasa asing. Dengan demikian pengajaran bahasa asing hanya akan dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Akan tetapi, siapakah yang akan dapat menetapkan sejak semula, mulai dari kelas pertama sekolah lanjutan pertama, murid-murid mana yang kelak akan sanggup meneruskan ke perguruan tinggi?

Sistem pendidikan kita harus memungkinkan setiap murid mengembangkan setiap aspek kepribadian dan bakatnya dengan sebaik-baiknya. Masing-masing harus memperoleh kesempatan yang sama dalam menerima dasar-dasar ilmu pengetahuan yang mungkin berguna bagi mereka kelak, walaupun sebagian besar akhirnya tidak akan mempergunakannya karena satu dan lain hal. Ada pula kemungkinan bahwa walaupun seorang murid tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi, Pengetahuan dan ketrampilannya berbahasa asing justru akan diperlukan di dalam lapangan pendidikannya atau pekerjaannya. Kita akan menutup kesempatan ini bila kita memberikan pengajaran bahasa asing hanya kepada mereka yang diharapkan akan dapat belajar di tingkat yang lebih tinggi.

Faktor yang mendorong kita untuk tetap memberikan pengajaran bahasa asing mulai dari sekolah lanjutan pertama ialah kenyataan bahwa pada tingkat umur pendidikan itu anak-anak lebih mudah mempelajari bahasa yang lain dari bahasa ibunya, bilamana cara yang dipakai untuk mengajarkannya tepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: anak-anak belum merasa malu menirukan bunyi yang asing baginya, dan struktur bahasa ibunya masih belum begitu berpengaruh sehingga pemindahan struktur ini ke dalam struktur bahasa asing yang dipelajarinya jarang terjadi.

Mungkin ada yang merasa khawatir bahwa dengan diajarkannya bahasa asing di tingkat sekolah lanjutan pertama pengajaran bahasa Indonesia akan terdesak. Kekhawatiran ini tidak perlu ada. Pertama, faktor lingkungan akan sangat membantu penguasaan bahasa Indonesia. Walaupun pemakaian bahasa Indonesia belum seluas yang kita harapkan, anak akan mendengar dan membaca bahasa Indonesia di sekelilingnya, siaranharapkan, anak akan mendengar dan membaca bahasa Indonesia di sekelilingnya setiap hari. Guru-guru yang mengajarnya, lagu-lagu yang didengarnya, siaran televisi yang dilihatnya, surat kabar serta majalah yang dibacanya, bahkan penjual obat yang dilihat dan didengarnya, semuanya mempergunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, jam pelajaran bahasa Indonesia yang lebih banyak dan

pemakaiannya secara efektif akan memberikan jaminan bahwa bahasa Indonesia akan dikuasainya dengan lebih baik daripada bahasa-bahasa lain yang diajarkannya. Selain itu, kesempatan untuk memakai bahasa Indonesia pasti lebih banyak daripada kesempatan untuk memakai bahasa lain, dan kita mengetahui bahwa hal ini sangat berpengaruh terhadap penguasaan sesuatu bahasa.

Ada pula yang berpendapat bahwa sebaiknya pengajaran bahasa asing, juga bahasa Inggris, hanya diberikan di sekolah lanjutan atas, dengan alasan bahwa bahasa tersebut baru diperlukan di perguruan tinggi dan bahwa bahasa asing sebaiknya diganti dengan mata-mata pelajaran yang langsung berguna bagi murid. Pendapat saya malahan sebaliknya: Pengajaran bahasa asing yang nyata-nyata diperlukan, dalam hal ini bahasa Inggris sebagai bahasa asing pertama, sebaiknya dimulai di sekolah lanjutan pertama, dengan memberikan ketrampilan dasar bahasa, terutama yang berhubungan dengan struktur bunyi, bentuk dan, urutan (*order*). Kecuali perhitungan plastisitas anak pada umur tersebut, juga harus diperhitungkan pemberian kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan pengajaran bahasa asing. Jadi, pengajaran bahasa asing tidak hanya terbatas kepada mereka yang akan dapat memasuki perguruan tinggi saja.

Alasan mengganti bahasa asing dengan mata-mata pelajaran lain yang "langsung berguna" bagi anak-anak agaknya juga kurang tepat. Sedikit sekali mata pelajaran di sekolah lanjutan yang dapat dipertahankan kehadirannya dengan alasan "langsung berguna" bagi anak. Langsung berguna untuk apa? Untuk mencari nafkah? Untuk meneruskan pelajaran? untuk hiburan diri sendiri? Aljabar, ilmu ukur, ilmu hayat, ilmu alam, dan kesenian tidak akan lebih langsung berguna bagi murid daripada bahasa Inggris.

Seyogianya bahasa Inggris sebagai bahasa asing pertama diajarkan di sekolah lanjutan pertama sebagai mata pelajaran wajib, dengan alasan yang telah diberikan terdahulu, sedangkan di sekolah lanjutan atas bahasa Inggris dapat diberikan sebagai mata pelajaran pilihan. Mereka yang merasa akan lebih memerlukan mata pelajaran ini dapat memilih mengikuti pelajaran ini, dengan titik berat ketrampilan tertentu. Juga bahasa asing lainnya dapat diberikan di sekolah lanjutan atas sebagai program pilihan.

Umumnya dikenal 4 ketrampilan dalam pengajaran bahasa, yaitu:

1. ketrampilan menyimak;
2. ketrampilan berbicara;
3. ketrampilan membaca;
4. ketrampilan menulis.

Secara ideal, urutan memperoleh ketrampilan dalam suatu bahasa ialah seperti yang tertera di atas. Artinya, ketrampilan yang berikut akan lebih

mudah dikuasai bilamana ketrampilan yang mendahuluinya telah dikuasai. Ini tidak berarti bahwa bila seseorang telah menguasai ketrampilan menyimak, dengan sendirinya ia akan menguasai ketrampilan untuk berbicara dalam bahasa yang dipelajarinya. Berbagai-bagai hal ikut mempengaruhi taraf penguasaan ketrampilan seseorang berbahasa asing. Hal-hal ini antara lain ialah: Beberapa: banyaknya waktu yang tersedia, contoh atau model yang dipakai untuk mempelajari bahasa tersebut, berapa kuatnya dorongan yang menyebabkan seseorang mempelajari bahasa asing, dan berapa seringnya bahasa yang dipelajari itu dipakai di lingkungan murid.

Memang di bidang pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing ini ada dua hal yang seolah-olah bertentangan satu dengan yang lain. Di satu pihak kita menginginkan supaya pengajaran bahasa asing dapat mengikuti pola dan urutan yang sama dengan yang ditempuh oleh seorang anak dalam menguasai bahasa ibunya. Cara ini dianggap cara yang sebaik-baiknya untuk mempelajari suatu bahasa, tetapi di pihak lain kita harus menyadari bahwa kondisi yang terdapat pada waktu seorang anak mempelajari bahasa ibunya sukar sekali diadakan atau ditiru pada waktu kita mengajarkan bahasa asing, apalagi bilamana ini dilakukan secara besar-besaran, dalam tingkat nasional, yang meliputi murid yang jumlahnya berjuta-juta.

Oleh karena alasan seperti di atas inilah maka apa yang di beberapa negara disebut FIES (*Foreign Language in the Elementary School*) seyogianya tidak usah dilakukan di Indonesia. Selain kondisi lingkungan yang ada berbeda, hasilnya sampai sekarang belum dapat dibuktikan kebaikannya. Oleh sebab ini pula, dalam menentukan ketrampilan apa yang ingin kita ajarkan kepada murid-murid dalam pengajaran bahasa asing, kita juga harus berfikir sesuai dengan kenyataan dan juga sesuai dengan tujuan pengajaran bahasa asing itu sendiri.

Kebanyakan murid di Indonesia adalah calon-calon dwibahasawan ketika mereka memasuki sekolah lanjutan pertama. Untuk menuntut supaya mereka juga mahir di dalam bahasa asing, semahir mereka mempergunakan dua bahasa yang telah mereka kuasai (bahasa daerah dan bahasa Indonesia), rasanya sukar, bila tidak dapat dikatakan tidak mungkin. Lagi pula hal ini tidak begitu perlu mengingat tujuan yang telah digariskan untuk pengajaran bahasa asing, dan kiranya kurang sesuai dengan rencana politik bahasa nasional yang menghendaki agar bahasa Indonesia tidak disaingi oleh bahasa lainnya, apalagi oleh bahasa asing.

Tujuan nasional dalam mengembangkan ketrampilan berbahasa asing (dalam hal ini bahasa Inggris), sesuai dengan keputusan pemerintah dan sesuai dengan kegunaannya ialah:

1. kemampuan membaca secara efektif;
2. kemampuan mengerti bahasa lisan;
3. kemampuan menulit; dan
4. kemampuan berbicara.

Persoalannya sekarang ialah bagaimana menyerasikan tujuan nasional yang titik beratnya adalah penguasaan bahasa asing oleh mereka yang diharapkan akan menduduki bangku perguruan tinggi dengan proses belajar bahasa yang mempunyai urutan penguasaan ketrampilan yang agak berbeda dengan tujuan tersebut tadi. Tujuan nasional menghendaki dikuasainya ketrampilan membaca dan menyimak dan berbicara dahulu, baru yang lain-lainnya.

Kiranya kedua hal yang seolah-olah bertentangan ini dapat dipertemukan melalui suatu program seperti yang telah diuraikan terdahulu, yaitu program wajib untuk bahasa Inggris di sekolah-sekolah lanjutan pertama, dan program lanjutan pilihan (selektif) untuk bahasa Inggris dan bahasa asing lain yang dianggap perlu. Di tingkat sekolah lanjutan pertama diberikan penguasaan dasar ketrampilan berbahasa dengan titik berat pada menyimak dan berbicara. Hal ini diharapkan dapat dicapai dengan penguasaan struktur bunyi, bentuk, dan urutan (*order*), dengan kosa kata yang cukup untuk melayani ketiga struktur tersebut. Sedangkan di sekolah lanjutan atas, dengan program pilihan, murid dapat mengembangkan dasar ketrampilan yang telah dimilikinya, sesuai dengan tujuan pribadinya, yaitu lebih mementingkan ketrampilan membaca atau ketrampilan berkomunikasi secara lisan.

#### **Cara Apa yang Sebaiknya Dipakai dalam Mengajarkan Bahasa Asing**

Beberapa macam cara mengajar bahasa asing telah dan masih dipergunakan di Indonesia, dan masing-masing mempunyai pendukung-pendukungnya. Akan tetapi, pada saat ini mereka yang tidak terlalu fanatik dan selalu mengikuti perkembangan pengajaran bahasa serta mau belajar dari pengalaman akan berpendapat bahwa tidak ada satu cara yang terbaik untuk segala macam keadaan.

Masing-masing cara mengajar, apakah itu cara tradisional atau cara audio-lingual, dengan murid-murid yang sesuai disertai syarat-syarat yang semuanya terpenuhi, dan dengan mengingat batas-batas kemampuan masing-masing cara tersebut. Menarik sekali apa yang dikerjakan oleh G. Scherer dengan kawan-kawannya di Universitas Chicago pada tahun 1960 sampai 1962. Dari hasil penelitian yang dikerjakan secara mendalam dan terkontrol secara ilmiah selama dua tahun terhadap dua kelompok mahasiswa Amerika yang belajar bahasa Jerman, dapat ditarik kesimpulan yang meyakinkan tentang pemakaian dua cara mengajar bahasa asing.

Kelompok pertama yang terdiri dari 150 orang mahasiswa, diajar dengan cara audio-lingual, dengan praktek di laboratorium bahasa. Bahan-bahan

tertulis baru diberikan kepada mereka setelah minggu yang ke-13. Pelajaran terdiri dari latihan percakapan dan pengulangan pola kalimat. Sedang kelompok kedua, yang merupakan "control group" dan terdiri dari 130 orang mahasiswa, diajar dengan cara tradisional, mempergunakan cara pendekatan ganda ("multi-purpose approach" yang mengajarkan semua ketrampilan sekaligus dari permulaan, dengan titik berat pada analisa tata bahasa. Dengan kondisi-kondisi lainnya yang seimbang (persiapan bahan-bahan, guru-guru, pemimpin proyek), maka sebagian hasilnya yang dapat kita anggap penting dalam hubungannya dengan hasilnya yang dapat kita anggap penting dalam hubungannya dengan pemakaian cara mengajar bahasa tertentu di Indonesia ialah sebagai berikut.

Dalam MENYIMAK, kelompok pertama ternyata lebih baik dalam tahun pertama, tetapi kelebihan ini hilang pada akhir tahun kedua.

Dalam BERBICARA, kelompok pertama tetap lebih unggul selama eksperimen berlangsung.

dalam MEMBACA, kelompok kedua ternyata lebih unggul pada akhir tahun pertama, tetapi keunggulan ini hilang pada akhir tahun kedua.

Dalam MENULIS, kelompok kedua tetap lebih unggul selama eksperimen berlangsung.

Dalam MENTERJEMAHKAN dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris, kelompok kedua tetap lebih unggul selama eksperimen berlangsung.

MENTERJEMAHKAN dari bahasa Inggris ke bahasa Jerman, kelompok kedua lebih unggul pada akhir tahun pertama, tetapi keunggulan ini hilang pada akhir tahun kedua.

Dengan hasil-hasil tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa yang diajar dengan cara audio-lingual memperoleh hasil yang serupa dengan mereka yang diajar yang lebih tradisional, dan bahwa para mahasiswa akan mencapai hasil baik dalam ketrampilan yang meneng dipentingkan oleh suatu cara tertentu.

Sebagai pengajar bahasa, hendaknya kita juga ingat apa yang pernah ditulis oleh John B. Carroll, yaitu bahwa sebagian besar pengajar mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan yang yakin akan kebaikan cara mengajar yang dipakainya, tetapi yang tetap membuka fikirannya terhadap kemungkinan adanya pendapat, bahan-bahan teknik baru yang didasarkan atas penelitian yang seksama, dapat selalu bersedia mencobakan hal-hal yang baru ini. Yang lebih penting lagi, hendaknya cara yang kita pakai di dalam mengajarkan bahasa asing disesuaikan dengan tujuan yang hendak kita capai.

## Kesimpulan

Secara singkat, dalam bentuk yang didapatkan, akan saya coba menyimpulkan apa yang telah diutarakan pada halaman-halaman terdahulu:

1. dalam rangka politik bahasa nasional, tempatkanlah pengajaran bahasa asing pada kedudukan yang semestinya: dianggap penting sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia, tetapi jangan sampai mengalahkan usaha menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi;
2. bahasa asing hendaknya diajarkan di sekolah-sekolah kita bukan hanya untuk menyiapkan murid-murid yang akan memasuki perguruan tinggi, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang memerlukan ketrampilan dasar bahasa asing yang kelak dapat dikembangkan sesuai dengan keperluannya;
3. letak geografis Indonesia, hubungan internasional serta hubungan kebudayaan kita dengan negara-negara tertentu dapat dijadikan patokan untuk memilih bahasa-bahasa asing mana yang perlu diajarkan di Indonesia;
4. bahasa Indonesia sebagai bahasa asing pertama dapat diajarkan mulai di sekolah lanjutan pertama, dengan memberikan dasar-dasar ketrampilan berbahasa, berdasarkan alasan-alasan pertumbuhan jiwa dan jasmani anak-anak pada waktu itu. Untuk mengembangkan pengajaran bahasa asing selanjutnya, di sekolah lanjutan atas dapat disusun program pilihan (elektif), yang disesuaikan dengan keperluan yang diinginkan;
5. Ketrampilan yang dikembangkan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengajaran bahasa tertentu, demikian pula cara mengajar yang dipilih hendaknya sesuai pula dengan tujuan itu.

## Daftar Pustaka

- Brooks, Nelson. 1964. *Language and Language Learning*. New York: Harcourt, Brace and World, Inc.
- Christopherson, Paul. 1973. *Second-Language Learning*. Harmondsworth: Penguin Books, Inc.
- Corder, S. Pit. 1973. *Introducing Applied Linguistics*. Harmondsworth: Penguin Books, Inc.
- Lado, Robert. 1964. *Language teaching: A Scientific Approach*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Rivers, Wilga M. 1964. *The Psychologist and the Language Teacher*. Chicago: The University of Chicago Press.
- , 1968. *Teaching Foreign Language Skills*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Savage, John F., Editor. 1973. *Linguistics for Teachers*. Chicago: Science Research Associates.
- Postman, Neil dan Charles Weingartner. 1966. *Linguistics: A Revolution in Teaching*. New York: Dell Publishing Co.
- Valdman, Albert, Editor. 1966. *Trends in Language Teaching*. New York: McGraw-Hill Book Company.

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO. 096/1967

tentang

FUNGSI DAN TUJUAN PENGAJARAN BAHASA INGGRIS  
PADA LEMBAGA—LEMBAGA PENDIDIKAN  
TINGKAT LANJUTAN DALAM LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN P DAN K  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Telah membaca: Surat Sdr. Kepala Biro Perpustakaan dan Pembinaan Buku Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Nopember 1967 No. 265/I—Um/67, tentang Penetapan Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengenai tujuan pengajaran bahasa Inggris.

Menimbang:

- a. bahwa guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur diperlukan "maximum development of human and economic resources";
- b. bahwa pengembangan sumber-sumber kemampuan manusia akan menghasilkan skilled man-power dalam segala bidang dan tenaga kader untuk leadership negara, dan pemanfaatan sumber kekayaan alam di bawah tanah, di darat dan laut akan membawa kesejahteraan seluruh bangsa;
- c. bahwa pengembangan tersebut secara maksimal tidak mungkin dicapai melalui media bahasa Indonesia saja mengingat bahwa ilmu pengetahuan serta teknologi dunia sebagian besar terkandung dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sehingga penguasaan yang efektif dari tamatan lembaga pendidikan tingkat lanjutan terhadap bahasa Inggris mutlak diperlukan;
- d. bahwa ketidakmampuan para mahasiswa untuk memanfaatkan reference Inggris tersebut untuk sementara waktu dapat diimbangi dengan penerbitan diktat-diktat, yang mengakibatkan kemerosotan kemampuan para sarjana baru, sehingga dengan manpower semacam itu tidak mungkin dapat dicapai "maximum development of human and economic resources";
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut, dipandang perlu segera ditetapkan adanya *fungsi dan tujuan pengajaran bahasa Inggris di Indonesia terutama* pada lembaga-lembaga pendidikan tingkat lanjutan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

### Mengingat;

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  1. No. 163 tahun 1966;
  2. No. 173 tahun 1966;
  3. No. 171 tahun 1967;
- b. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/KEP/11/1966.

Mengingat pula: Hasil perundingan antara Team Pembina Pengajaran Bahasa Inggris dengan kepala Seksi Bahasa Inggris pada Pusat Penelitian Kurikulum Metodika dan Didaktika-Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah disetujui pula oleh Rapat Kerja Persiapan Upgrading Guru-guru Bahasa Inggris di SMP yang diselenggarakan di Tugu pada tanggal 26 sampai dengan 29 Nopember 1967.

### M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Pertama

Fungsi dan tujuan pengajaran Bahasa Inggris di Indonesia terutama pada lembaga-lembaga pendidikan tingkat lanjutan dalam lingkungan Departemen pendidikan dan Kebudayaan, ialah:

- a. fungsi: ialah sebagai alat untuk:
  1. mempercepat proses pembangunan negara dan bangsa;
  2. membentuk persahabatan dengan bangsa-bangsa lain;
  3. menjalankan "foreign policy" kita;
- b. tujuan: ialah "working knowledge of English" yang terperinci sebagai berikut:
  1. effective reading ability;
  2. ability to understand spoken English;
  3. writing ability;
  4. speaking ability;

yang masing-masing diperlukan terutama oleh para mahasiswa untuk:

1. menyelami isi textbook dan reference material dalam bahasa Inggris yang merupakan 90 % dari semua reference;
2. menangkap kuliah dosen bangsa asing dalam rangka afiliasi dengan perguruan tinggi di luar negeri atau untuk berhubungan dengan per-orangan serta mahasiswa asing;
3. mencatat kuliah dosen bangsa asing secara tertulis, serta juntut memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada bangsa lain;

4. berhubungan dengan dosen, perseorangan maupun mahasiswa asing secara lisan.

Kedua:

Memberi wewenang kepada para Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" pada lembaga-lembaga pendidikan tingkat lanjutan yang ada dalam lingkungan masing-masing.

Ketiga:

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Desember 1967

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jendral,

d.t.o.

(Prof. Dr. Soemantri Hardjoprakoso)

Mayor Jendral TNI

**KESIMPULAN, PENDAPAT, DAN USUL  
SEMINAR POLITIK BAHASA NASIONAL**

# KESIMPULAN, PENDAPAT, DAN USUL SEMINAR POLITIK BAHASA NASIONAL

Seminar Politik Bahasa Nasional dalam sidang-sidangnya pada tanggal 25–28 Februari 1975 di Jakarta.

setelah mempertimbangkan:

- a. Pidato Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
- b. Pidato Pengarahan Seminar oleh Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

dan setelah membahas kertas-kertas kerja:

1. "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia" — Amran Halim,
2. "Ciri-ciri Bahasa Indonesia Baku" — Anton M. Moeliono,
3. "Tata Cara Pembakuan dan Pengembangan Bahasa Indonesia" — Hari-murti Kridalaksana,
4. "Pengajaran Bahasa Indonesia" — I Gusti Ngurah Oka,
5. "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Daerah" — S. Wojowasito,
6. "Pengembangan Bahasa Daerah" — Ajip Rosidi,
7. "Pengajaran Bahasa Daerah" — Tarwotjo,
8. "Inventarisasi Bahasa Daerah" — S. Effendi,
9. "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Asing" — Giri Kartono,
10. "Pengajaran Bahasa Asing" — Retmono;

mengambil kesimpulan dan pendapat, serta mengajukan usul sebagai berikut:

## A. KESIMPULAN

### 1. Pengertian Dasar

#### 1.1 Kebijakan Nasional

Politik bahasa nasional ialah kebijaksanaan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan. Masalah kebahasaan di Indonesia merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah pemakaian dan pemanfaatan bahasa-bahasa asing tertentu di Indonesia. Pengolahan keseluruhan masalah bahasa ini memerlukan adanya satu kebijaksanaan nasional yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pengolahan masalah bahasa itu benar-benar berencana, terarah, dan menyeluruh.

#### 1.2 Bahasa Nasional

Bahasa nasional ialah bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dan yang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 dinyatakan sebagai bahasa negara, dan yang dirumuskan lebih lanjut dalam Kongres Bahasa Indonesia di Medan pada tahun 1954.

#### 1.3 Bahasa Daerah

Bahasa daerah ialah bahasa yang di samping bahasa nasional dipakai sebagai bahasa perhubungan intradaerah di wilayah Republik Indonesia. Bahasa-bahasa daerah merupakan bagian daripada kebudayaan Indonesia yang hidup, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang berhubungan dengan Bab XV, Pasal 36.

#### 1.4 Bahasa Asing

Bahasa asing untuk Indonesia ialah semua bahasa kecuali bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, termasuk bahasa Melayu. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia perlu dibedakan antara bahasa asing modern dan bahasa asing klasik.

### 2. Kedudukan dan Fungsi

#### 2.1 Batasan

Salah satu masalah kebahasaan yang perumusan dan dasar penggarapannya perlu dicakup oleh kebijaksanaan nasional di dalam bidang kebahasaan adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan *fungsi bahasa* di dalam hubungan ini adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu di dalam kedudukan yang diberikan

kepadanya. Yang dimaksud dengan *kedudukan bahasa* adalah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya, yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan.

## 2.2 Bahasa Indonesia

### 2.2.1 Kedudukan

Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu, yang mendasari bahasa Indonesia itu, telah dipakai sebagai *lingua franca* selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air, dan bahwa di dalam masyarakat tidak terjadi "persaingan bahasa", yaitu persaingan di antara bahasa daerah yang satu dan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa nasional.

Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36.

### 2.2.2 Fungsi

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan (4) bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.

## 2.3 Bahasa Daerah

### 2.3.1 Kedudukan

Di dalam hubungannya dengan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa seperti Sunda, Jawa, Bali, Madura, Bugis, Makassar, dan Batak, yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan sebagai bahasa daerah. Kedudukan ini berdasarkan kenyataan bahwa bahasa daerah itu adalah salah satu unsur kebudayaan nasional dan dilindungi oleh negara, sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 36, Bab XV, Undang-Undang Dasar 1945.

### 2.3.2 Fungsi

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa-bahasa seperti

Sunda, Jawa, Bali, Madura, Bugis, Makassar, dan Batak berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah.

Di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (3) alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah.

## 2.4 Bahasa Asing

### 2.4.1 Kedudukan

Di dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa seperti Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dan bahasa lainnya kecuali bahasa Indonesia dan bahasa daerah serta bahasa Melayu, berkedudukan sebagai bahasa asing. Kedudukan ini didasarkan atas kenyataan bahwa bahasa asing tertentu itu diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan pada tingkat tertentu, dan di dalam kedudukan demikian, bahasa-bahasa asing itu tidak bersaing dengan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, serta dengan bahasa-bahasa daerah baik sebagai lambang nilai sosial budaya maupun sebagai alat perhubungan masyarakat daerah.

### 2.4.2. Fungsi

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa asing, bahasa-bahasa seperti Inggris, Perancis dan Jerman berfungsi sebagai (1) alat perhubungan antarbangsa, (2) alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, dan (3) alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional.

## 3. Pembinaan dan Pengembangan

### 3.1 Pengertian

Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan dalam hubungannya dengan masalah kebahasaan di Indonesia adalah usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya.

Usaha-usaha pembinaan dan pengembangan tersebut tidak hanya menyangkut masalah-masalah bahasa belaka, tetapi juga masalah kesusastraan karena kesusastraan merupakan faktor penunjang perkembangan bahasa dan kebudayaan yang bersangkutan.

### 3.2 Bahasa Indonesia

Mengingat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia maka pembinaan dan

pengembangan bahasa Indonesia diperlukan secara mutlak di dalam negara Republik Indonesia. Untuk itu harus dilakukan usaha-usaha pembakuan sebagai berikut:

- a. Usaha pembakuan bahasa bertujuan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasi; dalam hubungan ini perlu ditetapkan kaidah-kaidah yang berupa aturan dan pegangan yang tepat di bidang ejaan, kosa kata, tata bahasa, dan peristilahan.
- b. Dalam usaha pembakuan bahasa Indonesia perlu didahulukan bahasa tulis karena corak yang lebih tetap dan batas bidang-bidangnya lebih jelas; selain daripada itu, diperlukan pula pembakuan lafal bahasa Indonesia sebagai pegangan bagi para guru, penyiar televisi dan radio, serta masyarakat umum.
- c. Pembakuan bahasa Indonesia perlu dilaksanakan dengan mengusahakan:
  1. kodifikasi menurut situasi pemakai dan pemakaiannya yang akan menghasilkan pelbagai ragam dan gaya bahasa, seperti yang dipakai dalam administrasi pemerintahan, perundang-undangan, lingkungan pengajaran, sarana komunikasi massa, dan ilmu pengetahuan;
  2. kodifikasi menurut struktur bahasa sebagai sistem komunikasi, yang akan menghasilkan tata bahasa dan kosa kata serta peristilahan yang baku;
  3. tersedianya sarana pembakuan seperti kamus ejaan, kamus umum, buku tata bahasa, pedoman umum ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan pedoman gaya tulis-menulis;
  4. kerja sama dengan para ahli bahasa, guru, wartawan, penyiar radio dan televisi, sastrawan, cendekiawan, lembaga-lembaga pendidikan, badan pemerintah dan swasta, serta masyarakat umum.

### 3.3 Bahasa Daerah

Sejalan dengan Penjelasan Pasal 36, Bab XV, Undang-Undang Dasar 1945, maka bahasa-bahasa daerah yang dipakai di wilayah Negara Republik Indonesia perlu dipelihara dan dikembangkan. Keadaan bahasa daerah di Indonesia di dalam hubungannya dengan jumlah keseluruhannya di satu pihak, dan jumlah pener, daerah pemakaian serta variasi pemakaian masing-masing bahasa daerah di pihak lain memerlukan perencanaan yang bertahap dan teliti serta melibatkan banyak orang dan badan-badan baik pemerintah maupun swasta. Usaha-usaha pembinaan dan pengembangan bahasa daerah meliputi kegiatan-kegiatan (1) inventarisasi dan (2) peningkatan mutu pemakaian.

#### 3.3.1 Inventarisasi

Kegiatan inventarisasi bahasa daerah dalam segala aspeknya, termasuk pengajarannya, perlu untuk penelitian, perencanaan, pembinaan dan

pengembangan bahasa daerah. Kegiatan ini harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.

Kegiatan inventarisasi akan berjalan dengan baik dan lancar jika:

- a. dilaksanakan melalui kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan lembaga-lembaga, badan-badan atau perseorangan baik di pusat maupun di daerah, dan
- b. tersedia tenaga-tenaga yang cukup, cakap, dan terlatih dalam bidang penelitian bahasa.

### 3.3.2. Peningkatan Mutu Pemakaian

Dalam rangka mempercepat pembangunan yang merata di seluruh pelosok tanah air, bahasa daerah merupakan alat komunikasi (lisan) yang praktis di daerah pedesaan. Sehubungan dengan itu, perlu disusun suatu program penataran di bidang bahasa daerah bagi:

- a. para pejabat yang bertugas memberikan penerangan ke pedesaan, dan
- b. para wartawan yang akan berkecimpung dalam pers daerah.

Dalam rangka usaha memelihara warisan kebudayaan daerah dan usaha membina serta mengembangkan kebudayaan nasional, bentuk-bentuk kebudayaan yang ditulis dalam bahasa daerah perlu ditulis kembali baik dalam bentuk bahasa daerah versi baru atau dalam bentuk saduran atau terjemahan ke dalam bahasa Indonesia untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas.

Dalam rangka usaha mendorong dan merangsang penulisan dan penerbitan berbahasa daerah, demi mengakrabkan warisan kebudayaan yang ditulis dalam bahasa daerah, pemerintah perlu:

- a. melalui Proyek Inpres Pendidikan dan Proyek Pelita Perpustakaan, memasukkan buku-buku bahasa daerah ke dalam program pembelian buku pengisi perpustakaan,
- b. menyediakan hadiah atau anugerah kepada pengarang-pengarang yang menulis dalam bahasa daerah, di samping para pengarang yang menulis dalam bahasa Indonesia.

## 4. Pengembangan Pengajaran

### 4.1 Pengertian

Yang dimaksud dengan pengembangan pengajaran ialah usaha-usaha dan kegiatan yang ditujukan kepada pengembangan pengajaran bahasa agar dapat dicapai tujuan pengajaran bahasa itu sendiri, yaitu agar penutur bahasa itu memiliki ketrampilan berbahasa, pengetahuan yang baik tentang bahasa itu, dan sikap positif terhadap bahasa itu, termasuk hasil sastranya.

### 4.2 Bahasa Indonesia

Pengembangan pengajaran bahasa Indonesia bertujuan meningkatkan

mutu pengajaran bahasa Indonesia sedemikian rupa sehingga penuturnya memiliki:

- a. ketrampilan berbahasa Indonesia,
- b. pengetahuan yang baik mengenai bahasa Indonesia, dan
- c. sikap positif terhadap bahasa Indonesia termasuk sastranya.

Pengajaran bahasa Indonesia adalah sarana yang diperlukan untuk:

- a. mempertahankan keutuhan kepribadian Indonesia,
- b. menyebarkan pemakaian bahasa Indonesia secara luas,
- c. mengarahkan perkembangan, dan
- d. membakukan ragam-ragam bahasanya.

Untuk mencapai tujuan pengajaran tersebut perlu dirancangan program yang berikut:

- a. Penelitian masalah pengajaran bahasa dan jalan pemecahannya.
- b. Perumusan kurikulum yang memperinci tiap aspek tujuan menjadi kelompok satuan yang dapat diukur menurut tingkat dan jenis sekolah.
- c. Persiapan program khusus pengajaran bahasa Indonesia yang secara langsung dapat menghasilkan ahli bahasa, serta program khusus bagi pengajaran bahasa Indonesia di luar sekolah dan untuk orang asing.
- d. Penentuan didaktik dan metodik bahasa yang paling cocok.
- e. Pengembangan kepustakaan.

#### 4.3. Bahasa Daerah

Pengembangan pengajaran bahasa daerah bertujuan meningkatkan mutu pengajaran bahasa daerah sedemikian rupa sehingga penuturnya memiliki:

- a. ketrampilan berbahasa daerah,
- b. pengetahuan yang baik tentang bahasa daerah, dan
- c. sikap positif terhadap bahasa daerah dan sastranya.

Pengajaran bahasa daerah adalah sarana yang ikut:

- a. menunjang pembinaan unsur kebudayaan nasional,
- b. mengarahkan perkembangan bahasa daerah, dan
- c. membakukan ragam-ragam bahasanya.

Untuk mencapai tujuan pengajaran tersebut perlu dirancangan program yang berikut:

- a. Penelitian masalah pengajaran bahasa daerah dan jalan pemecahannya.
- b. Perumusan kurikulum yang memerinci tiap aspek tujuan menjadi kelompok satuan yang dapat diukur menurut tingkat dan jenis sekolah.
- c. Persiapan program khusus pengajaran bahasa daerah yang secara langsung dapat menghasilkan ahli bahasa daerah.
- d. Penentuan didaktik dan metodik bahasa yang paling cocok.
- e. Pengembangan kepustakaan.

#### 4.4 Bahasa Asing

Pengembangan pengajaran bahasa asing bertujuan meningkatkan mutu pengajaran bahasa asing sedemikian rupa sehingga bahasa asing terutama bahasa Inggris, benar-benar dapat dipergunakan sebagai:

- ✓ alat penggalian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan teknologi modern,
- ✓ alat perhubungan antarbangsa, alat untuk keperluan yang praktis, seperti penggunaannya di bidang kepariwisataan, perdagangan, diplomatik, dan militer, dan
- ✓ salah satu sumber kebahasaan untuk memperlaya bahasa Indonesia.

Untuk mencapai tujuan pengajaran bahasa asing itu perlu dirancang program sebagai berikut:

- Penelitian masalah pengajaran bahasa asing dan jalan pemecahannya.
- Perumusan kurikulum yang memerinci tiap aspek tujuan menjadi kelompok satuan yang dapat diukur menurut tingkat dan jenis sekolah.
- Persiapan program khusus pengajaran bahasa asing yang secara langsung dapat menghasilkan ahli bahasa asing.
- 1. Penentuan didaktik dan metodik yang paling cocok.
- 2. Pengembangan kepustakaan.

#### 5. Bahasa Pengantar

##### 5.1 Batasan

Secara luas bahasa pengantar adalah bahasa yang dipakai secara resmi untuk mengadakan komunikasi dengan sejumlah orang yang terhimpun dan terikat dalam suatu situasi lingkungan yang resmi, seperti rapat umum, rapat kerja, dan simposium. Dalam pengertian sempit, bahasa pengantar adalah bahasa resmi yang dipergunakan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran kepada murid di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam hubungan ini, penggunaan ketiga macam bahasa yang dirumuskan di atas (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing), sebagai bahasa pengantar akan dibatasi kepada pengertian sempit itu.

##### 5.2 Bahasa Indonesia.

Sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar pada semua jenis dan tingkat lembaga pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali di daerah-daerah tertentu.

##### 5.3 Bahasa Daerah

Sementara menunggu hasil penelitian jangka panjang mengenai kerugian dan keuntungan yang dapat diambil dari pemakaian bahasa Indonesia atau bahasa daerah sebagai satu-satunya bahasa pengantar, bahasa daerah dapat dipakai sebagai bahasa pengantar mulai dari kelas satu sampai dengan kelas

tiga sekolah dasar di daerah-daerah tertentu, dengan catatan bahwa bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran diajarkan mulai kelas satu sekolah dasar.

#### 5.4. Bahasa Asing

Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam menyajikan mata pelajaran bahasa asing yang bersangkutan. Bahasa asing dipergunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi pada jurusan bahasa asing tersebut. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi oleh tenaga pengajar atau ahli asing yang tidak menguasai pemakaian bahasa Indonesia.

### B. PENDAPAT

Seminar Politik Bahasa Nasional dalam sidang-sidangnya pada tanggal 25-28 Februari 1975, setelah mendengar pendapat dan tanggapan para peserta, yang mencerminkan berbagai bidang keahlian dan profesi, serta yang datang dari berbagai-bagai daerah, dalam rangka pembahasan kertas-kertas kerja, akhirnya menyimpulkan pendapat dan tanggapan tersebut sebagai berikut:

1. Politik Bahasa Nasional merupakan penjabaran Penjelasan Pasal 36, Bab XV, Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahasa Indonesia dewasa ini dilihat baik dari segi bentuknya, penggunaannya, pengajarannya maupun dari segi penelitiannya masih jauh dari memuaskan.
3. Bahasa daerah dan karya-karya dalam bahasa daerah selama ini kurang mendapat perhatian.
4. Tenaga-tenaga untuk menangani masalah bahasa masih kurang sekali.
5. Sarana-sarana kebahasaan juga masih kurang.
6. Motivasi untuk mempelajari bahasa, terutama bahasa Indonesia dan bahasa daerah, sangat kurang.
7. Pengajaran bahasa daerah mulai dari kelas satu sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan bermanfaat bagi pembinaan ketrampilan berbahasa bagi anak didik. Sebagian peserta seminar meragukan adanya manfaat tersebut.
8. Hasil pengajaran bahasa asing mungkin akan lebih baik (menurut sebagian peserta) kalau yang diajarkan hanya bahasa Inggris saja.

### C. USUL

1. Seminar Politik Bahasa Nasional mengusulkan kepada Pemerintah agar Pemerintah turun tangan dalam usaha pengindonesiaan nama-nama asing yang masih dipakai untuk badan pemerintah, lembaga-lembaga resmi, dan

badan usaha umum seperti hotel, bank, dan gedung pertemuan.

2. Seminar Politik Bahasa Nasional mendesak supaya usaha penterjemahan yang berencana segera dilancarkan.
3. Seminar Politik Bahasa Nasional menyarankan kepada pihak-pihak yang berwenang agar memikirkan sanksi atas pelanggaran terhadap bahasa baku dalam situasi yang menuntut pemakaian ragam bahasa itu.

# DAFTAR PESERTA

## DAFTAR PESERTA

1. Abdullah Mustappa      Majalah *Mangle*, Jalan Lodaya 19, Bandung.
2. Achmaddin Dalip      Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Bengkulu, Jalan Majen S. Parman, Bengkulu.
3. Ajip Rosidi      Ketua IKAPI, Jalan Pengarengan 32, Jakarta.
4. Alan M. Stevens      Jalan Ijen 79, Malang.
5. Alfons Taryadi      Harian *Kompas*, Jalan Palmerah Selatan 26-28, Jakarta.
6. Amran Halim      Universitas Sriwijaya, Jalan Bukit Besar, Palembang.
7. Andi Hakim Nasution      Institut Pertanian, Bogor.
8. Anton M. Moeliono      Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
9. Asmah Haji Omar      Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
10. Astuti Hendrato      Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta.
11. A.D. Donggo      Harian *Empat Lima*, Jalan K.H. Wahid Hasyim 85, Jakarta.
12. A. Rahman      Kepala Lembaga Bahasa Nasional, Cabang II, Jalan Jenderal Sudirman No. 35, Ujungpandang.
13. A.S. Broto      IKIP Rawamangun; Jakarta.
14. A.S.M. Tambunan      Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
15. Bakran Jacob      IAIN Syarif hidayatullah, Ciputat, Jakarta.
16. Basjuni Surjamihardja      ketua Pengurus Besar PGRI, Jalan Tanah Abang III/24, Jakarta.
17. Basuki Suhardi      Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta.
18. Benny H. Hoed      Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta.
19. Bistok Sirait      FKSS IKIP, Jalan Merbau No. 38A, Medan.

20. Brian D. Smith                      Jalan Joko Sutono No. 27, Kebayoran Baru, Jakarta.
21. B.A. Siahaan                        FKSS IKIP, Rawamangun, Jakarta.
22. David Napitupulu                Ketua KNPI, Jakarta.
23. Djamalul Abidin                  Direktorat Radio, Departemen Penerangan, Jakarta.
24. Djoko Kentjono                  Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
25. D.H. ssegaff                        Harian *Suara Karya*, Jalan Bangka il/2, Jakarta.
26. Emil H. Hampp                    Direktur Balai Bahasa, Manado.
27. E.K.M. Masinambow              LRKN, Jakarta.
28. Fachruddin A.E.                  FKSS IKIP, Jalan Gunung Sari Baru, Ujungpandang.
29. Fahrurrozi Holip                 Fakultas Keguruan Universitas Sriwijaya, Jalan Bukit Besar, Palembang.
30. Gazali Dunia                        PGRI, Jalan Tanah Abang III/24, Jakarta.
31. Giri Kartono                        Sekretaris Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
32. Goenawan Mohamad              Majalah *Tempo*, Jalan Senen Raya 83, Jakarta.
33. Hari Mulyono                      FKSS IKIP, Jalan Kelud Utara III, Semarang.
34. Harimurti Kridalaksana         Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta.
35. Husein Widjajakusumah         Fakultas Sastra Universitas Pajajaran, Jalan Dipati Ukur 37, Bandung.
36. H.A. Latief Mukhtar              IAIN Sunan Gunung Jati, Jalan Tangkubanprahu 14, Bandung.
37. I Gustu Ngurah Bagus            Kepala Lembaga Bahasa Nasional Cabang I, Jalan Kolonel Ngurah rai 54, Singaraja.
38. I Gusti Ngurah Oka                FKSS IKIP, Jalan Semarang 5, Malang.
39. Ilen Surianegara                 Majalah *Budaja Djaja*, Jakarta.
40. Imam Samudra                    Subdirektorat Hubungan Lembaga, Direktorat Pembinaan Hubungan Masyarakat, Departemen Penerangan, Jakarta.

41. Imam Sukarsono Departemen Pertahanan Keamanan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta.
42. Ismail Dahanam Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
43. Jazir Burhan FKSS IKIP, Jalan Setiabudi km 8, Bandung.
44. J.F. Pattiasina Lembaga Bahasa Nasional Cabang III, Jalan Jenderal Sudirman 35, Ujungpandang.
45. Kajat Hartoyo Harian *Suara Karya*, Jalan Bangka II/2, Jakarta.
46. Ki Soeratman Majelis Luhur Taman Siswa, Jalan Taman Siswa 33, Yogyakarta.
47. Kuntamadi Lembaga Bahasa Nasional, Jakarta.
48. Koentjaraningrat LIPI, Jalan Cik Ditiro 43, Jakarta.
49. La Side Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Jalan G. Batuputih 59, Ujungpandang.
50. Leo Apituley FKSS IKIP, Manado.
51. Liek Wilardjo Universitas Kristen Satya Wacana, Jalan Diponegoro 54-58, Salatiga.
52. Livain Lubis Fakultas Sastra Universitas Pajajaran, Jalan Dipati Ukur 37, Bandung.
53. Lukman Ali Lembaga Bahasa Nasional, Jakarta.
54. Maman Sumantri Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, Jalan Karyawan 12, Bandung.
55. Mariana Karim FKSS IKIP, Rawamangun, Jakarta.
56. Matullada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Kotak Pos 23, Ujungpandang.
57. Mudasir Harian *Berita Buana*, Jalan Tanah Abang II/33-35, Jakarta.
58. Mudjanattistomo Kepala Lembaga Bahasa Nasional Cabang II, Yogyakarta.
59. Muhadjir Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta.
60. Muh. Rustandi Kartakusuma Jalan Pajagalan 71, Bandung.

61. Muljanto Sumardi      Direktur Pendidikan Tinggi Agama, Departemen Agama, Jalan Thamrin, Jakarta.
62. M. Hutaeruk      Jalan Kramat IV/11, Jakarta.
63. M. Silitonga      Direktur Balai Bahasa Medan, Jalan Merbau 38, Medan.
64. M. Wonohito      Harian *Kedaulatan Rakyat*, Jalan Serayu No. 3, Yogyakarta.
65. Noer toegiman      FKSS IKIP, Karangmalang, Yogyakarta.
66. Retmono      FKSS IKI P, Jalan Kelud Utara III, Semarang.
67. M.M. Purbo Hadiwidjojo      Jalan Kidang Pananjung, Bandung.
68. Sabaruddin Ahmad      Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatra Utara, Medan.
69. Samsuri      FKSS IKIP, Jalan Semarang 5, Malang.
70. Siti Sundari Tjitrosubono      Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta.
71. Satyagraha Hoerip      Harian *Sinar Harapan*, Jalan Pintu Besar Selatan 80 (atas), Jakarta.
72. Surono Martorahardjo      FKSS IKIP, Kampus IKI P, Surabaya.
73. Sri Sukei Adiwarta      Lembaga Bahasa Nasional, Jakarta.
74. Sjahrul Sjarif      FKSS IKIP, Jalan Setiabudi, Bandung.
75. Supomo Poedjosoedarmo      IKIP Sanata Dharma, Kotak Pos 29, Yogyakarta.
76. Suratman Markasan      Kesatuan guru-guru Melayu, Singapura.
77. Suripan Sadi Hutomo      FKSS IKIP, Surabaya.
78. Sutoko      Fakultas Sastra Universitas Jember, Jalan P.B. Sudirman (Gedung Tri Ubaya Sakti).
79. Susilomurti      LKB Antara, Jalan Antara 53-57, Jakarta.
80. Suwardi M.S.      Dekan Fakultas Keguruan Universitas Riau, Pekanbaru.
81. Suwesi Montana      Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

82. S uyoto Suryodipuro, Departemen Luar Negeri, Jalan Veteran 17, Jakarta.
83. S. Effendi Lembaga Bahasa Nasional, Jakarta.
84. S. Takdir Alisyahbana Universitas Nasional, Jakarta.
85. S. Wjowasito FKS S IKIP, Jalan Semarang 5, Malang.
86. Syahdan Manurung Fakultas Sastra, Universitas S umatra Utara, Jalan Universitas 19, Medan.
87. Ny. S.D. S yah universitas Nusa Cendana, Kupang.
88. S.W. Rujati Mulyadi Lembaga Bahasa Nasional, Jakarta.
89. Tarwotjo Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
90. Taufiq Ismail Ketua LPKJ, Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya 73, Jakarta.
91. Tasrir Ismail Lembaga Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Sumatra Utara, Jalan Universitas 19, Medan.
92. Th Kundjana S.J. IKIP Sanata Dharma, Kotak Pos, 29, Yogyakarta.
93. Ulrich Krats Kedutaan Besar Jerman Barat, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta.
94. Ukun Surjaman Fakultas Sastra Universitas Pajajaran, Jalan Dipati Ukur 37, Bandung.
95. Wahab Ismail Direktorat Publikasi, Departemen Penerangan, Jakarta.
96. Wayan Bawa Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
97. Wayan Jenda Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
98. Yogia Adikara Harian *Berita Yudha*, Jakarta.
99. Yus Rusyana FSS IKIP, Jalan Setiabudi, Bandung.
100. Zainudin Iljas Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

07-3757

PANITIA PENYELENGGARA

Ketua : Amran Halim  
Sekretaris : Zulkarnain  
Anggota : S.W. Rujati Mulyadi  
Lukman Ali  
S. Effendi  
Hans Lapoliwa  
Djajanto Supraba  
Sekretariat : Hasjmi Dini  
Suparyanto  
E. Asmad  
Notulis : Farid Hadi  
Sumardi  
Yayah B. Lumintaintang  
Adi Sunaryo

PERPUSTAKAAN  
PUSAT PEMBINAAN DAN  
PENGEMBANGAN BAHASA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

160

4542

93-2213

OFFSET BUMIRESTU - JAKARTA